



Katalog BPS

2301014



Analisis Mobilitas Tenaga Kerja

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2014



Analisis Mobilitas Tenaga Kerja

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2014

ANALISIS MOBILITAS TENAGA KERJA HASIL SAKERNAS 2014

ISBN : 978-979-064-877-7
Katalog BPS : 2301014
No. Publikasi : 04140.1501
Ukuran Buku : ISO B5 (17,6 cm x 25 cm)
Jumlah Halaman : xxii + 146 halaman

Naskah :
Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja

Gambar Kulit :
Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh :
Bagian Peggandaan

TIM PENYUSUN

ANALISIS MOBILITAS TENAGA KERJA

HASIL SAKERNAS 2014

Pengarah : Razali Ritonga

Editor : Rini Savitridina
Ika Luswara
Tri Windiarso

Penulis : Widaryatmo
Yeni Farida

Pengolah Data : Widaryatmo

Kontributor Data : Subdirektorat Statistik
Ketenagakerjaan

KATA PENGANTAR

Sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) mulai secara teratur yaitu setiap dua tahun sekali menyajikan publikasi hasil analisis mengenai mobilitas tenaga kerja. Publikasi analisis mobilitas tenaga kerja ini merupakan publikasi keempat, setelah sebelumnya BPS menerbitkan publikasi ini pada tahun 2009, 2011 dan 2013. Secara umum, publikasi ini membahas tentang pola mobilitas nonpermanen tenaga kerja di Indonesia, serta menganalisis mobilitas pekerjaan yaitu perpindahan lapangan pekerjaan atau pergeseran status pekerjaan dari para tenaga kerja.

Data yang digunakan untuk penulisan publikasi ini diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2014 dan sebagian dari hasil Sakernas tahun-tahun sebelumnya. Untuk melengkapi analisis, publikasi ini juga menyajikan informasi tentang konsep dan teori migrasi serta beberapa definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam analisis.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Semua kritik dan saran sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Jakarta, November 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Dr. Suryamin, M.Sc

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan temuan Hugo (2000) bahwa semakin lama mobilitas nonpermanen akan terus meningkat di Indonesia. Pada tahun 2010 tercatat persentase pekerja pelaku mobilitas non permanen sebanyak 7 persen meningkat terus menjadi 8,1 persen pada tahun 2014. Jika dipisahkan antara pekerja komuter dan pekerja sirkuler, tren peningkatan pekerja komuter jauh lebih besar dibandingkan pekerja sirkuler.

Proporsi laki-laki yang melakukan kegiatan mobilitas ulang-alik atau sirkuler masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Perempuan lebih cenderung menjadi *stayers* atau bekerja di lokasi yang sama dengan tempat tinggalnya. Kemungkinan hal tersebut terkait dengan peran dan tugasnya dalam rumah tangga.

Berdasarkan status perkawinannya, proporsi mereka yang belum kawin yang melakukan mobilitas ulang-alik lebih besar dibandingkan yang berstatus kawin dan cerai. Sebaliknya untuk mobilitas sirkuler, justru proporsi tertinggi adalah mereka yang berstatus kawin. Yang menarik di sini ditemukan bahwa mereka yang tidak melakukan mobilitas nonpermanen (*stayers*) yang terbesar adalah yang berstatus cerai.

Mereka yang melakukan mobilitas adalah yang berpendidikan SMA ke atas. Untuk yang berpendidikan di bawah SMA paling banyak menjadi *stayers*. Ini menunjukkan bahwa utilitas pekerja berbeda menurut tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin individu ingin memaksimalkan utilitasnya dengan melakukan mobilitas ke daerah lain. Pada kasus komuter dan sirkuler, tampak bahwa proporsi terbesar komuter adalah pekerja yang berpendidikan SMA ke atas. Sebaliknya untuk pekerja sirkuler adalah pekerja dengan pendidikan di bawah SMA.

Mobilitas nonpermanen lebih banyak terjadi pada kelompok umur 20-49 tahun. Baik pekerja komuter ataupun pekerja sirkuler keduanya membentuk huruf U terbalik. Keduanya berpuncak pada kelompok umur 25-44 tahun. Perbedaannya adalah komuter terjadi lebih banyak pada usia muda sebaliknya sirkuler bergeser ke yang lebih tua. Yang menarik adalah kenyataan bahwa pada kelompok usia 15-19 tahun dan kelompok usia tua 55 tahun ke atas, proporsi mereka yang tidak melakukan mobilitas nonpermanen merupakan yang tertinggi. Semakin tua, semakin kecil kecenderungan pekerja melakukan mobilitas nonpermanen. Mereka lebih memilih bekerja di kabupaten/kota yang sama dengan tempat tinggal mereka.

Lapangan pekerjaan utama penyerap komuter terbesar adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (24,7 persen), sektor industri (24,3 persen), dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan (23,8 persen). Berbeda dengan pekerja komuter, lapangan pekerjaan utama penyerap sirkuler terbesar adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (24,6 persen), sektor konstruksi (23,9 persen), dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan (13,6 persen).

Menurut jenis pekerjaannya, yang paling banyak digeluti oleh pekerja komuter adalah tenaga produksi, operator alat angkutan dan pekerja kasar (36,0 persen). Disusul kemudian oleh pejabat pelaksana, tenaga tata usaha, dan yang sejenis (18,8 persen), dan tenaga usaha penjualan (16,5 persen). Pola yang hampir serupa terjadi pada pekerja sirkuler. Separuh pekerja sirkuler menggeluti profesi sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar. Diikuti dengan sekitar 21,3 persen pekerja sirkuler sebagai tenaga usaha penjualan, dan sisanya bervariasi sebagai tenaga lain.

Selanjutnya jika dilihat dari status pekerjaan utama pekerja komuter, status sebagai buruh/karyawan/pegawai mendominasi para

pekerja ini (82,8 persen). Sisanya 6,2 persen berusaha sendiri, 5,3 persen berusaha dibantu buruh tetap atau buruh tidak tetap, 4,4 persen pekerja bebas, dan 1,3 persen pekerja keluarga/tak dibayar. Sementara itu, dominasi proporsi pekerja sirkuler yang berstatus buruh/karyawan/pegawai (54,0 persen) jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pekerja komuter. Selain itu, pekerja sirkuler yang berstatus pekerja bebas dan berusaha sendiri memiliki proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan komuter. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pekerja sirkuler yang bekerja di sektor formal jauh lebih sedikit dibandingkan pekerja komuter. Hal tersebut tidak terlepas dari tingkat pendidikan pekerja sirkuler yang lebih rendah dari pekerja komuter.

Komuter yang bekerja sesuai jam kerja normal paling banyak ditemui di sektor listrik, gas dan air bersih, sektor lembaga keuangan, sektor industri, sektor transportasi, sektor pertambangan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan. Sementara komuter yang bekerja tidak sesuai dengan jam kerja normal, atau bekerja di bawah jam kerja normal dominan ditemui di sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Kondisi ini menyiratkan bahwa komuter yang merupakan penganggur terselubung banyak ditemui di dua sektor ini. Pola serupa juga berlaku pada pekerja sirkuler. Sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor industri menduduki posisi tertinggi penggunaan jam kerja normal dan sektor pertanian menduduki peringkat terendah penggunaan jam kerja normal. Jika dibandingkan dengan pekerja komuter terbukti bahwa pekerja sirkuler kalah produktif dengan pekerja komuter hampir di semua lapangan pekerjaan.

Sepuluh lebih pekerja komuter membutuhkan waktu satu jam menuju tempat kerja. Sebagian kecil lainnya memakan waktu di atas dua jam. Pekerja komuter yang tidak menggunakan angkutan sama sekali atau dapat dikatakan hanya berjalan kaki menuju tempat

kerjanya membutuhkan kurang dari tiga puluh menit. Wajar saja karena tempat kerja dan tempat tinggalnya berbatasan langsung dan jaraknya tidak jauh. Sementara itu pola yang serupa berlaku untuk jenis transportasi umum, bersama dan kendaraan pribadi. Separuh lebih pekerja komuter menghabiskan waktu sekitar satu jam menuju tempat kerjanya. Dan sebagian kecil lainnya memerlukan waktu di atas dua jam.

Pekerja di Indonesia lebih banyak bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi tempat tinggalnya yaitu dalam satu kabupaten/kota (*stayers*). Tercatat bahwa pada tahun 2014 sebanyak 91,9 persen pekerja merupakan *stayers*, sisanya 8,1 persen merupakan pelaku mobilitas nonpermanen (*movers*).

Berdasarkan distribusi *stayers* dan *movers* menurut provinsi, dapat dilihat bahwa ada enam provinsi dengan persentase *stayers* berada di bawah angka nasional yaitu DKI Jakarta (75,6 %), Banten (80,3 %), DI Yogyakarta (85,1 %), Jawa Barat (87,1 %), Bali (90,0 %), dan Jawa Tengah (91,4 %). Hal ini berarti persentase *movers* di enam provinsi tersebut berada di atas angka nasional. Kondisi tersebut terjadi karena kota-kota besar di Indonesia terdapat di provinsi-provinsi tersebut, sehingga terdapat sarana prasarana yang cukup baik yang mendukung para pekerja untuk melakukan mobilitas baik secara harian, mingguan, maupun bulanan.

Persentase pekerja komuter lebih banyak dibandingkan dengan pekerja sirkuler (6,1 % untuk pekerja komuter dan 2,0 % untuk pekerja sirkuler). Sebanyak 24 provinsi memiliki pola yang sama dengan pola nasional, yaitu persentase pekerja komuternya lebih besar jika dibandingkan dengan persentase pekerja sirkuler. Provinsi-provinsi yang persentase pekerja komuternya lebih besar dari pekerja sirkuler umumnya didominasi oleh provinsi-provinsi di kawasan barat

Indonesia. Sebaliknya provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia, persentase pekerja sirkulernya lebih besar dari pekerja komuter.

Penyumbang komuter terbesar di Indonesia adalah provinsi-provinsi di pulau Jawa yang mencapai angka 81,1 persen. Hal ini wajar karena memang kota-kota besar di Indonesia kebanyakan berada di Pulau Jawa. Pada tingkat provinsi, Jawa Barat adalah provinsi dengan persentase pekerja komuter yang paling besar yaitu sebesar 25 persen. Provinsi DKI Jakarta berada di urutan berikutnya yakni 15,9 persen. Selanjutnya diikuti oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan DI Yogyakarta. Sementara untuk Provinsi Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Selatan dan Lampung merupakan provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa dengan persentase pekerja komuter yang cukup besar.

Tiga provinsi penyumbang pekerja sirkuler terbanyak di Indonesia berada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebanyak 33,1 persen pekerja sirkuler berada di Jawa Barat, 26,9 persen di Jawa Tengah, 10,5 persen di Jawa Timur, dan sisanya tersebar di provinsi-provinsi lainnya.

Apabila dilihat menurut pulau-pulau besar di Indonesia maka pekerja sirkuler terbanyak di Pulau Sumatera adalah di Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Pekerja sirkuler terbanyak di Pulau Jawa berturut-turut adalah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang sekaligus merupakan tiga provinsi penyumbang pekerja sirkuler terbesar di Indonesia. Kemudian pekerja sirkuler terbanyak di Pulau Kalimantan adalah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Pekerja sirkuler terbanyak di Pulau Sulawesi adalah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, persentase pekerja sirkuler di kawasan timur Indonesia (Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua) berkisar antara 0,2 sampai 0,3 persen.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, proporsi pekerja laki-laki yang pernah pindah pekerjaan sedikit lebih banyak dibandingkan

pekerja perempuan. Perempuan cenderung tidak pernah pindah pekerjaan. Kondisi ini disebabkan karena perempuan sudah merasa cukup dengan pekerjaan yang ada. Kemungkinan lainnya adalah karena perempuan bukan pencari nafkah utama dalam keluarga sehingga mereka tidak berkeinginan untuk mencari pekerjaan yang lain.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pekerja di perkotaan sedikit lebih banyak yang pernah pindah pekerjaan daripada pekerja yang tinggal di perdesaan. Kondisi ini didukung oleh karena perkotaan menyediakan pekerjaan di sektor *nonfarm* (bukan pertanian) dalam jumlah yang sangat besar. Dengan demikian, memudahkan mereka untuk mencari/pindah pekerjaan sesuai minatnya.

Semakin tua umur pekerja semakin kecil proporsi yang pernah pindah pekerjaan. Pekerja muda, yaitu pekerja yang berumur antara 15–34 tahun, cenderung pernah pindah pekerjaan karena pada usia muda masih banyak kesempatan untuk memilih lapangan pekerjaan yang lebih sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, kecenderungan untuk pindah pekerjaan juga disebabkan karena adanya sistem kontrak pegawai. Bagi para pekerja berumur muda yang baru masuk dunia kerja, biasanya mereka masih menjadi pegawai kontrak sehingga ketika masa kontrak habis, mereka akan mencari pekerjaan yang lain. Sementara pekerja yang berusia lebih tua biasanya sudah menjadi pegawai tetap sehingga mobilitas pekerjaannya sudah mulai berkurang.

Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar proporsi mereka yang pernah pindah pekerjaan. Seperti pernah diulas sebelumnya bahwa tingkat pendidikan sangat terkait dengan tingkat kepuasan terhadap nilai nominal penghasilan yang diperoleh setiap individu. Harapan tingkat upah yang tinggi berdasarkan tingkat pendidikannya merupakan nilai *rate of return* yang ingin dicapai setiap

pekerja. Pekerja dengan pendidikan tamat SD ke bawah cenderung tidak berpindah pekerjaan. Mereka sudah cukup puas dengan pekerjaannya sekarang karena ketiadaan pilihan untuk bisa masuk ke pekerjaan lain akibat rendahnya tingkat pendidikan yang dimilikinya.

Apabila dilihat menurut status perkawinan, pekerja yang belum kawin cenderung pernah pindah pekerjaan. Mereka masih ingin mencoba-coba mencari pekerjaan yang paling sesuai. Belum adanya keluarga yang harus ditanggung membuat mereka lebih berani untuk melakukan perpindahan pekerjaan. Sementara bagi pekerja yang berstatus kawin cenderung untuk tidak pindah pekerjaan.

Berdasarkan lapangan usaha/pekerjaan sebelum pindah pekerjaan, yang paling banyak pindah pekerjaan adalah mereka yang bekerja di sektor jasa (43,8 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pekerja pada sektor jasa lebih mudah untuk keluar-masuk bekerja di sektor ini. Pekerja pada sektor industri berada pada urutan kedua dengan persentase sebesar 33,5 persen. Mereka yang bekerja pada sektor pertanian adalah kelompok yang paling sedikit mengalami perpindahan pekerjaan, yaitu sebesar 22,7 persen.

Secara umum semakin tinggi umur pekerja maka akan semakin kecil kecenderungan untuk pindah dari tempat kerja. Tingginya kecenderungan *turn over* pada kelompok umur produktif (15-24, 25-34, dan 35-44 tahun) mengindikasikan dinamisnya pasar kerja di Indonesia.

Pekerja yang lapangan pekerjaan sebelum dan sesudah perpindahan tetap pada sektor pertanian persentasenya cukup tinggi, yaitu mencapai 12,0 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja pada sektor pertanian sulit untuk pindah ke sektor yang lain. Sebagaimana diketahui, pekerja pada sektor pertanian di Indonesia memiliki pendidikan yang relatif rendah. Sementara untuk masuk ke sektor lainnya memerlukan pendidikan atau keterampilan tertentu sehingga

mereka yang bekerja pada sektor pertanian meskipun pindah pekerjaan namun masih tetap pada sektor yang sama. Sebaliknya, sektor jasa ternyata cukup berpotensi untuk menjadi penyerap tenaga kerja dan juga sebagai penarik terjadinya mobilitas pekerjaan menuju sektor ini.

Lebih dari separuh (54,7 persen) dari pekerja yang pernah pindah pekerjaan, sebelumnya berstatus buruh/karyawan/pegawai. Sebagian besar dari mereka walaupun pindah pekerjaan namun tetap memilih untuk menjadi buruh/karyawan/pegawai. Risiko kerja yang relatif kecil, lingkungan kerja yang nyaman, tingkat upah yang lebih baik serta adanya jaminan sosial dari tempat kerja menjadi daya rekat utama bagi mereka yang pindah pekerjaan namun tetap bertahan pada status pekerjaan yang sama. Adanya sistem kontrak yang diberlakukan pada perusahaan-perusahaan juga diduga menjadi penyebab tingginya perpindahan yang terjadi di kalangan pekerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai. Perpindahan pekerjaan dari mereka yang berstatus buruh/karyawan/pegawai, selain tetap menjadi buruh, berusaha sendiri merupakan pilihan yang banyak diminati, disusul kemudian dengan pekerja tak dibayar dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Pertanyaan Penulisan	5
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.5 Manfaat Penulisan	6
1.6 Sistematika Penyajian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Konsep Mobilitas Penduduk	7
2.2 Determinan Mobilitas Penduduk.....	10
2.3 Mobilitas Penduduk Nonpermanen.....	12
2.3.1 Mobilitas Ulang Alik/ <i>Commuting</i>	17
2.3.2 Mobilitas Sirkuler.....	18
2.3.3 Mobilitas Pekerjaan.....	23
BAB III METODE PENULISAN	25
3.1 Sumber Data.....	25
3.2 Kerangka Sampel	26
3.3 Unit Analisis	27
3.4 Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
3.5 Definisi Operasional	30
3.5.1 Variabel Sakernas yang Digunakan	30
3.5.2 Mobilitas Nonpermanen.....	38
3.5.3 Mobilitas Pekerjaan.....	38
3.6 Metode Analisa.....	39
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	41
4.1 Kondisi Pasar Kerja Indonesia	41
4.2 Mobilitas Nonpermanen di Indonesia.....	45
4.2.1 Karakteristik Pekerja Komuter dan Sirkuler Ditinjau dari Aspek Sosiodemografi.....	46
4.2.2 Karakteristik Pekerja Komuter dan Sirkuler Ditinjau dari Aspek Ekonomi	55

	4.2.3	Karakteristik Pekerja Komuter dan Sirkuler Ditinjau dari Aspek Aksesibilitas.....	74
4.3		Mobilitas Nonpermanen Menurut Provinsi.....	75
	4.3.1	Distribusi <i>Stayers</i> dan <i>Movers</i> Menurut Provinsi.....	75
	4.3.2	Karakteristik Pekerja Komuter Menurut Provinsi.....	78
	4.3.3	Karakteristik Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi.....	86
4.4		Mobilitas Pekerjaan di Indonesia.....	90
	4.4.1	Karakteristik Pelaku Mobilitas Pekerjaan	92
	4.4.2	Mobilitas Pekerjaan Menurut Lapangan Usaha/Pekerjaan Utama	100
	4.4.3	Mobilitas Pekerjaan Menurut Status Pekerjaan Utama	104
BAB V		KESIMPULAN DAN SARAN	107
	5.1	Kesimpulan.....	107
	5.2	Saran.....	111
		DAFTAR PUSTAKA	115
		LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

Halaman

BAB III METODE PENULISAN

Tabel 3.1	Matriks Kegiatan Formal Informal.....	37
-----------	---------------------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENGOLAHAN SAKERNAS 2014

Tabel 4.1	Karakteristik Pasar Tenaga Kerja Indonesia, 2010-2014	41
Tabel 4.2	Distribusi Persentase Angkatan Kerja Indonesia Menurut Tingkat Pendidikan, 2010-2014.....	43
Tabel 4.3	Distribusi Persentase Pekerja Indonesia Menurut Sektor Ekonomi, 2010-2014.....	44
Tabel 4.4	Karakteristik Sosiodemografi Pekerja Pelaku Mobilitas Nonpermanen, 2014.....	47
Tabel 4.5	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Tiga Sektor Unggulan, 2014.....	58
Tabel 4.6	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Tiga Sektor Unggulan, 2014.....	59
Tabel 4.7	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014	61
Tabel 4.8	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014	62
Tabel 4.9	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jam Kerja/Minggu, 2014	65
Tabel 4.10	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jam Kerja/Minggu, 2014	66
Tabel 4.11	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jam Kerja/Minggu, 2014	67
Tabel 4.12	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jam Kerja/Minggu, 2014	68
Tabel 4.13	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Sektor Pekerjaan, 2014 ..	69
Tabel 4.14	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Sektor Pekerjaan, 2014 ..	70
Tabel 4.15	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Lapangan Usaha Utama dan Sektor Pekerjaan, 2014.....	71

Tabel 4.16	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Lapangan Usaha Utama dan Sektor Pekerjaan, 2014.....	72
Tabel 4.17	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Sektor Pekerjaan, 2014.....	73
Tabel 4.18	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Sektor Pekerjaan, 2014.....	74
Tabel 4.19	Distribusi Persentase Waktu Tempuh Pekerja Komuter Menurut Jenis Transportasi yang Digunakan, 2014.....	75
Tabel 4.20	Distribusi Persentase <i>Stayers</i> dan <i>Movers</i> Menurut Provinsi, 2014	77
Tabel 4.21	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi di Indonesia, 2014.....	80
Tabel 4.22	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan pada Provinsi Terpilih, 2014	81
Tabel 4.23	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Sektor Pekerjaan pada Provinsi Terpilih, 2014	82
Tabel 4.24	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Lapangan Usaha Utama pada Provinsi Terpilih, 2014.....	83
Tabel 4.25	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Waktu Tempuh pada Provinsi Terpilih, 2014.....	84
Tabel 4.26	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Jenis Transportasi pada Provinsi Terpilih, 2014	85
Tabel 4.27	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi di Indonesia, 2014.....	87
Tabel 4.28	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan pada Provinsi Terpilih, 2014	88
Tabel 4.29	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Sektor Pekerjaan pada Provinsi Terpilih, 2014	89
Tabel 4.30	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Lapangan Usaha Utama pada Provinsi Terpilih, 2014.....	89
Tabel 4.31	Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah dan yang Tidak Pernah Pindah Pekerjaan menurut Karakteristik Demografi, 2014	94
Tabel 4.32	Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah Pekerjaan Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama Sebelum Pindah Pekerjaan, 2014	95
Tabel 4.33	Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah Pekerjaan Menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan Utama Sebelum Pindah Pekerjaan, 2014	97
Tabel 4.34	Distribusi Persentase Pekerja yang Pindah Pekerjaan Menurut Kelompok Umur dan Alasan Pindah Pekerjaan, 2014.....	98

Tabel 4.35	Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah Pekerjaan Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Sebelumnya dan Lapangan Pekerjaan Utama Sekarang, 2014	102
Tabel 4.36	Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah Pekerjaan Menurut Status Pekerjaan Utama Sebelumnya dan Status Pekerjaan Utama Sekarang, 2014.....	105

LAMPIRAN

HASIL PENGOLAHAN SAKERNAS 2013

Tabel L.1	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Tiga Sektor Unggulan, 2013	123
Tabel L.2	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Tiga Sektor Unggulan, 2013	123
Tabel L.3	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2013.....	124
Tabel L.4	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2013.....	124
Tabel L.5	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jam Kerja/Minggu, 2013.....	125
Tabel L.6	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jam Kerja/Minggu, 2013.....	125
Tabel L.7	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jam Kerja/Minggu, 2013.....	126
Tabel L.8	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jam Kerja/Minggu, 2013.....	126
Tabel L.9	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Sektor Pekerjaan, 2013..	127
Tabel L.10	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Sektor Pekerjaan, 2013..	127
Tabel L.11	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Lapangan Usaha Utama dan Sektor Pekerjaan, 2013	128
Tabel L.12	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Lapangan Usaha Utama dan Sektor Pekerjaan, 2013	128
Tabel L.13	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Jenis Pekerjaan dan Sektor Pekerjaan, 2013.....	129
Tabel L.14	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Jenis Pekerjaan dan Sektor Pekerjaan, 2013.....	129
Tabel L.15	Distribusi Persentase Waktu Tempuh Pekerja Komuter Menurut Jenis Transportasi yang Digunakan, 2013	130

Tabel L.16	Distribusi Persentase <i>Stayers</i> dan <i>Movers</i> Menurut Provinsi, 2013.....	131
Tabel L.17	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Provinsi di Indonesia, 2013	132
Tabel L.18	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan pada Provinsi Terpilih, 2013	133
Tabel L.19	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Sektor Pekerjaan pada Provinsi Terpilih, 2013.....	133
Tabel L.20	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Lapangan Usaha Utama pada Provinsi Terpilih, 2013	134
Tabel L.21	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Waktu Tempuh pada Provinsi Terpilih, 2013	134
Tabel L.22	Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Jenis Transportasi pada Provinsi Terpilih, 2013	135
Tabel L.23	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Provinsi di Indonesia, 2013	136
Tabel L.24	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan pada Provinsi Terpilih, 2013	137
Tabel L.25	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Sektor Pekerjaan pada Provinsi Terpilih, 2013.....	137
Tabel L.26	Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Lapangan Usaha Utama pada Provinsi Terpilih, 2013	138
Tabel L.27	Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah dan yang Tidak Pernah Pindah Pekerjaan Menurut Karakteristik Demografi, 2013.....	139
Tabel L.28	Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah Pekerjaan Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama Sebelum Pindah Pekerjaan, 2013.....	140
Tabel L.29	Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah Pekerjaan Menurut Kelompok Umur Status Pekerjaan Utama Sebelum Pindah Pekerjaan, 2013.....	140
Tabel L.30	Distribusi Persentase Pekerja yang Pindah Pekerjaan Menurut Kelompok Umur dan Alasan Pindah Pekerjaan, 2013	141
Tabel L.31	Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah Pekerjaan Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Sebelumnya dan Lapangan Pekerjaan Utama Sekarang, 2013.....	141
Tabel L.32	Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah Pekerjaan Menurut Status Pekerjaan Utama Sebelumnya dan Status Pekerjaan Utama Sekarang, 2013	142

DAFTAR GAMBAR

Halaman

BAB III METODE PENULISAN

Gambar 3.1	Alur Pemilihan Sampel Pekerja Pelaku Mobilitas Nonpermanen	28
Gambar 3.2	Alur Pemilihan Sampel Pekerja Pelaku Mobilitas Pekerjaan	29

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Gambar 4.1	Pola Mobilitas Nonpermanen Menurut Kelompok Umur Pekerja, 2014.....	51
Gambar 4.2	Pola Mobilitas Nonpermanen Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Pekerja, 2014	53
Gambar 4.3	Pola Mobilitas Nonpermanen Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Pendidikan Pekerja, 2014	54
Gambar 4.4	Distribusi Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Pekerja Komuter, 2014.....	55
Gambar 4.5	Distribusi Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Pekerja Sirkuler, 2014.....	57
Gambar 4.6	Distribusi Persentase Jenis Pekerjaan Utama Pekerja Komuter, 2014.....	60
Gambar 4.7	Distribusi Persentase Jenis Pekerjaan Utama Pekerja Sirkuler, 2014.....	60
Gambar 4.8	Distribusi Persentase Status Pekerjaan Utama Pekerja Komuter, 2014.....	63
Gambar 4.9	Distribusi Persentase Status Pekerjaan Utama Pekerja Sirkuler, 2014.....	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep kependudukan dan pembangunan tidak dapat dipisahkan. Seperti yang terpatri pada *International Conference on Population and Development* (ICPD, 1994) di Cairo yang mendeklarasikan bahwa penduduk merupakan pusat dari pembangunan. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. Pembangunan yang sesungguhnya merupakan pembangunan manusia yang seutuhnya. Memahami perilaku penduduk merupakan salah satu cara untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang ramah penduduk. Salah satu dari perilaku penduduk tersebut adalah keputusan untuk melakukan mobilitas. Permasalahan mengenai mobilitas penduduk ini sudah cukup mendapatkan perhatian dari pemerintah, terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan. Peraturan pemerintah ini merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan Umum. Oleh karena itu diperlukan kajian tentang mobilitas penduduk, khususnya mobilitas tenaga kerja, yang menyajikan informasi mengenai fenomena mobilitas yang terjadi di Indonesia.

Fenomena mobilitas tenaga kerja yang terjadi di Indonesia terdiri dari dua jenis mobilitas, yaitu mobilitas tenaga kerja secara spasial dan mobilitas tenaga kerja non spasial. Mobilitas tenaga kerja secara spasial terdapat dua jenis, yaitu mobilitas secara

permanen dan nonpermanen. Sementara mobilitas tenaga kerja non spasial merupakan perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, baik menurut sektornya maupun status pekerjaannya.

Yang membedakan mobilitas permanen dengan nonpermanen adalah masalah dimensi waktu dan tujuannya. Dikatakan permanen jika seseorang pindah ke tempat lain dengan tujuan menetap dalam waktu enam bulan atau lebih, selain dari itu merupakan mobilitas nonpermanen. Mobilitas nonpermanen sendiri dibedakan menjadi mobilitas ulang alik dan sirkuler. Pasar kerja yang fleksibel telah meningkatkan jumlah pekerja yang melakukan mobilitas nonpermanen.

Menurut Ananta dan Chotib (1998) pola mobilitas di Indonesia telah diwarnai oleh mobilitas permanen dan nonpermanen dengan arah yang berubah. Perbaikan sarana transportasi pada gilirannya mampu mengubah pola mobilitas yang terjadi. Kepemilikan kendaraan bermotor yang kian mudah dan beragamnya sarana transportasi mempunyai andil relatif besar dalam proses mobilitas. Aksesibilitas ini kemudian mengubah pola mobilitas menjadi bersifat nonpermanen.

Secara lebih terperinci ILO (2004) menyebutkan bahwa ada beberapa sebab mengapa mobilitas nonpermanen lebih banyak diminati antara lain disebabkan karena jenis mobilitas seperti ini sangat cocok dengan partisipasi kerja di sektor informal di daerah tujuan karena komitmen waktu yang fleksibel yang memungkinkan untuk mudik ke kampung halaman lebih sering. Di lain sisi biaya hidup di daerah tujuan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah asal membuat para pekerja lebih memilih untuk *nglaju*. Tingkat upah yang lebih tinggi di daerah

tujuan dan standar hidup di daerah asal yang relatif lebih rendah membuat para pekerja mendapatkan keuntungan berlebih. Seperti telah disebutkan sebelumnya, sistem transportasi yang relatif terjangkau dan banyak jenisnya, memungkinkan pekerja kembali ke kampung halamannya dengan cepat, dan segera dapat melakukan diversifikasi pekerjaan di tempat asal.

Arus mobilitas ulang alik ini akan kian menajam manakala tingkat kesenjangan pembangunan antar daerah kian dalam. Tingkat kesuburan kegiatan ekonomi di suatu wilayah akan menentukan seberapa kuat daya tarik wilayah tersebut. Semakin terpusat kegiatan ekonomi akan ditangkap oleh para pelaku mobillitas ulang alik atau sering disebut komuter sebagai momentum pengejawantahan manfaat ekonomis dari berpindah. Akibat dari kian mahalny biaya hidup di pusat kegiatan ekonomi telah memaksa pekerja untuk pulang dan pergi pada hari yang sama. Tingginya harga tanah di tempat kerja telah memaksa komuter untuk bertempat tinggal di luar wilayah tersebut, dimana sebagian besar dari mereka memilih untuk tinggal di wilayah perbatasan. Selain karena mahalny biaya tempat tinggal di pusat kota, kemudahan sarana transportasi dan beban *opportunity cost* juga disinyalir menjadi faktor tingginya mobilitas ulang alik.

Selain pelaku mobilitas nonpermanen, perpindahan pekerjaan juga merupakan topik yang penting dalam masalah ketenagakerjaan. Kejadian pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain pada sektor formal banyak terjadi akhir-akhir ini. Salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian ini adalah banyak perusahaan yang menggunakan sistem kontrak pada pegawainya. Perpindahan pekerjaan bisa dikarenakan memang keinginan dari pekerjanya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan,

pendapatan yang diterima kurang memuaskan, atau diberhentikan dari perusahaan karena pengurangan tenaga kerja atau karena habis masa kontrak kerja.

Perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain memiliki peran penting dalam perekonomian, karena dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Selain itu dengan adanya perpindahan pekerjaan, terjadi suatu penyesuaian antara perusahaan dan tenaga kerja, dimana pihak perusahaan menginginkan tenaga kerja yang berkualitas sementara di pihak pekerja mengharapkan upah yang tinggi. Ponzio (2009 dalam Rahayu 2010) menyatakan bahwa perpindahan tenaga kerja merupakan mekanisme yang digunakan pasar tenaga kerja untuk mengoreksi kesalahan tempat kerja dan dapat mengarah pada alokasi sumber daya manusia yang lebih baik dan efisien.

1.2 Perumusan Masalah

Tjiptoherijanto (2003) menyebutkan bahwa mobilitas penduduk semakin tinggi di waktu mendatang. Pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain akan lebih intensif di masa depan. Apalagi didukung dengan semakin baiknya sarana transportasi dan semakin mudahnya memiliki kendaraan pribadi, tidak mustahil tingkat mobilitas nonpermanen akan semakin tinggi. Di lain sisi, masih tingginya pertumbuhan angkatan kerja, dengan jumlah penduduk yang masih tinggi yang diikuti dengan usia harapan hidup yang terus meningkat, sudah dapat diperkirakan semakin banyak pencari kerja. Sementara itu lapangan kerja yang tersedia amat terbatas mengakibatkan peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja di wilayah asal semakin tertutup. Desakan pemenuhan kebutuhan hidup juga

mengharuskan para tenaga kerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Keseluruhan hal tersebut berpotensi menciptakan mobilitas tenaga kerja baik secara spasial maupun non spasial.

1.3 Pertanyaan Penulisan

1. Bagaimana struktur pasar tenaga kerja secara umum?
2. Bagaimana karakteristik pekerja yang melakukan mobilitas nonpermanen secara nasional?
3. Bagaimana karakteristik pekerja yang melakukan mobilitas nonpermanen di 10 provinsi terpilih?
4. Bagaimana pola mobilitas pekerjaan secara nasional?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi potensi mobilitas tenaga kerja, dilihat dari sisi pekerja pelaku mobilitas nonpermanen dan pekerja pelaku mobilitas pekerjaan (*job mobility*). Tujuan utama penulisan ini adalah:

1. Menyoroti pola mobilitas nonpermanen pekerja di Indonesia.
2. Mengidentifikasi karakteristik pekerja yang melakukan mobilitas nonpermanen.
3. Mengamati pola mobilitas pekerja menurut sektor ekonomi dalam upaya untuk melihat sektor ekonomi yang paling berpotensi untuk menyerap pekerja .
4. Selain itu, dalam rangka memperkaya analisis mobilitas tenaga kerja, dilakukan analisis mobilitas pekerjaan dari para pekerja.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Sebagai tambahan referensi analisis mobilitas kependudukan khususnya mobilitas ketenagakerjaan.
2. Sebagai masukan bagi pemerintah untuk kembali memetakan target dan rencana pembangunan sektoral berbasis ketenagakerjaan.
3. Sebagai masukan bagi pembuat kebijakan regional yang terkait dengan percepatan pembangunan di daerah asal agar secara tidak langsung dapat mengurangi arus pekerja migran keluar dari wilayah asal.

1.6 Sistematika Penyajian

Penulisan ini diawali dengan latar belakang penulisan, perumusan masalah, pertanyaan penulisan, tujuan dan manfaat penulisan. Bab 2 mengulas tinjauan pustaka yang berisi teori dan konsep terkait serta beberapa hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penulisan. Bab 3 mengenai metode penulisan, mencakup sumber data dan metode analisis. Bab 4 merupakan hasil pembahasan dan analisis. Ditutup dengan kesimpulan dan saran pada Bab 5. Pada bagian akhir disertakan lampiran data hasil Sakernas tahun sebelumnya (2013) dan kuesioner Sakernas Agustus 2014.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Mobilitas Penduduk

Mantra, Kastro dan Keban (1999) dalam Waridin (2002) menyebutkan bahwa ada beberapa teori yang mengungkapkan mengapa seseorang melakukan mobilitas, diantaranya adalah teori kebutuhan dan tekanan (*need* dan *stress*). Setiap individu mempunyai kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan ekonomi, sosial, politik, dan psikologi. Apabila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi terjadilah tekanan/*stress*. Tinggi rendahnya stres yang dialami oleh individu berbanding terbalik dengan proporsi pemenuhan kebutuhan. Ada dua akibat dari stres diatas, kalau stres seseorang tidak terlalu besar (masih dalam batas toleransi), orang tersebut tidak akan pindah. Dia tetap tinggal di daerah asal dan menyesuaikan kebutuhannya dengan keadaan lingkungan yang ada. Sebaliknya apabila stres yang dialami seseorang diluar batas toleransinya, orang tersebut mulai memikirkan untuk pindah ke daerah lain di tempat kebutuhannya dapat terpenuhi. Maka dapat dikatakan bahwa seseorang akan pindah dari tempat yang memiliki nilai kefaedahan wilayah (*place utility*) lebih rendah ke daerah yang memiliki nilai kefaedahan wilayah yang lebih tinggi agar kebutuhannya dapat terpenuhi.

Mantra (2000) menyatakan bahwa mobilitas penduduk terbagi menjadi dua macam, yaitu mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horisontal. Mobilitas penduduk vertikal lebih dikenal dengan perubahan status, sementara mobilitas penduduk

horizontal merupakan mobilitas penduduk secara geografis. Mantra memisahkan mobilitas penduduk horizontal menjadi dua, yaitu mobilitas penduduk permanen dan mobilitas penduduk nonpermanen. Pembagian bentuk mobilitas ini berdasarkan niat. Jika mobilitas yang dilakukan diniatkan untuk menetap maka digolongkan sebagai mobilitas permanen, sedangkan jika diniatkan untuk tidak menetap digolongkan menjadi mobilitas nonpermanen.

Mobilitas penduduk adalah gerak (*movement*) penduduk yang melintasi daerah satu menuju daerah lain dalam periode waktu tertentu. Batasan wilayah yang umumnya digunakan di Indonesia adalah batas administratif seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa bahkan sampai dukuh.

Beberapa bentuk perpindahan tempat (mobilitas) :

- ✓ Perubahan tempat yang bersifat rutin, misalnya orang yang pulang balik kerja (*Recurrent Movement*).
- ✓ Perubahan tempat yang bersifat sementara seperti perpindahan tempat tinggal bagi para pekerja musiman.
- ✓ Perubahan tempat tinggal dengan tujuan menetap dan tidak kembali ke tempat semula (*Non Recurrent Movement*).

Dalam sosiologi menurut sifatnya mobilitas dibedakan menjadi dua, yaitu :

- ✓ Mobilitas vertikal yaitu perubahan status sosial.
- ✓ Mobilitas horizontal yaitu perpindahan penduduk secara teritorial, spasial atau geografis.

Gerak penduduk nonpermanen dibagi menjadi dua yaitu ulang alik (*nglaju/commuting*) dan dapat *menginap/mondok* di daerah tujuan yang biasa disebut sirkuler/*circulation*. Ulang alik adalah gerak penduduk dari daerah asal menuju ke daerah tujuan

dalam batas waktu tertentu kembali ke daerah asal pada hari itu juga. Jika dibandingkan antara penduduk yang melakukan mobilitas ulang alik, mobilitas sirkuler, dan migrasi, maka penduduk yang melakukan mobilitas ulang alik memiliki frekuensi terbesar disusul oleh sirkuler, dan migrasi.

Secara operasional, macam-macam bentuk mobilitas penduduk tersebut diukur berdasarkan konsep ruang dan waktu. Misalnya, mobilitas ulang alik, konsep waktunya diukur dengan meninggalkan daerah asal dan kembali pada hari yang sama, sirkuler diukur dari meninggalkan daerah asal lebih dari satu hari tetapi kurang dari enam bulan, sedangkan mobilitas permanen diukur dari lamanya meninggalkan daerah asal enam bulan atau lebih termasuk orang yang sejak semula berniat menetap di daerah tujuan meskipun lamanya meninggalkan daerah asal belum enam bulan.

Sifat dan perilaku pekerja sirkuler di daerah tujuan adalah bekerja tidak mengenal waktu karena mereka berusaha mempergunakan waktu untuk bekerja sebanyak mungkin agar mendapatkan upah sebanyak mungkin untuk dikirim ke daerah asal. Di daerah tujuan mereka tidak dikenai kewajiban untuk kerja bakti, ronda malam dan bergotong royong memperbaiki prasarana jalan atau saluran irigasi. Jadi di daerah tujuan mereka mempunyai kesempatan berusaha keras untuk mendapatkan upah sebanyak-banyaknya. Pada umumnya para pekerja sirkuler menuju ke kota terdorong oleh adanya tekanan kondisi ekonomi perdesaan, dimana semakin sulit mencukupi nafkah keluarga. Dorongan ekonomi tersebut terutama ditimbulkan oleh permasalahan sempitnya lahan pertanian di desa dan hambatan dalam mengelolanya. Kondisi ekonomi penduduk perdesaan yang

kembang kempis tersebut jelas perlu adanya perbaikan. Oleh karena itu, pelaksanaan mobilitas dengan tujuan ekonomis sebagai salah satu upaya untuk mengubah kondisi ketertekanan ekonomi diatas.

Meskipun ada perbedaan antara mobilitas penduduk permanen dan nonpermanen, mobilitas nonpermanen masih dikategorikan sebagai bentuk perpindahan penduduk. Analisa dan teori tentang migrasi dapat diterapkan dalam menganalisis perpindahan penduduk nonpermanen (Widaryatmo, 2009).

2.2 Determinan Mobilitas Penduduk

Teori migrasi menurut Ravenstein (1985) mengungkapkan tentang perilaku mobilitas penduduk (migrasi) yang disebut dengan hukum-hukum migrasi yang masih relevan sampai sekarang. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Para migran cenderung memilih tempat tinggal terdekat dengan daerah tujuan.
- b. Faktor paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi adalah sulitnya memperoleh pendapatan di daerah asal dan kemungkinan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan.
- c. Berita-berita dari sanak saudara atau teman yang telah pindah ke daerah lain merupakan informasi yang sangat penting.
- d. Informasi yang negatif dari daerah tujuan mengurangi niat penduduk untuk bermigrasi.
- e. Semakin tinggi pengaruh kekotaan terhadap seseorang, semakin besar tingkat mobilitas orang tersebut.
- f. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitas orang tersebut.

- g. Para migran cenderung memilih daerah dimana telah terdapat teman atau sanak saudara yang bertempat tinggal di daerah tujuan.
- h. Pola migrasi bagi seseorang maupun sekelompok penduduk sulit untuk diperkirakan.
- i. Penduduk yang masih muda dan belum menikah lebih banyak melakukan migrasi dibandingkan mereka yang berstatus menikah.
- j. Penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi biasanya lebih banyak mobilitasnya dibandingkan yang berpendidikan rendah.

Menurut Mitchell (1961) ada kekuatan yang menarik seseorang untuk tetap tinggal di daerah asal dan kekuatan mendorong seseorang untuk meninggalkan daerah asal. Kekuatan yang mengikat seseorang untuk tetap tinggal di daerah asal disebut kekuatan sentripetal (*centripetal force*) dan sebaliknya kekuatan yang mendorong seseorang untuk meninggalkan daerah asal disebut dengan kekuatan sentrifugal (*centrifugal force*) (Mantra, 2000). Kekuatan sentripetal antara lain: keterikatan pada warisan, menunggu orangtua yang sudah lanjut, adanya kegotongroyongan, dan daerah asal sebagai tempat kelahiran nenek moyang. Sedangkan kekuatan sentrifugal anatara lain: terbatasnya pasar kerja dan terbatasnya fasilitas pendidikan (Mantra, 1999 dalam Sudibia 2007). Keputusan seseorang untuk tetap tinggal di daerah asal atau meninggalkan daerah asal, tergantung pada keseimbangan kedua kekuatan tersebut.

2.3 Mobilitas Penduduk Nonpermanen

Mobilitas penduduk nonpermanen dibagi menjadi dua yaitu mobilitas sirkuler/*circulation* dan mobilitas ulang-alik/*commuting*. Beberapa konsep terkait mobilitas nonpermanen ini diungkapkan oleh beberapa peneliti. Jellinek (1986) menyebutkan pelaku mobilitas sirkuler sebagai migran sirkuler yaitu migran yang meninggalkan daerah asal hanya untuk mencari nafkah, tetapi mereka menganggap dan merasa bahwa tempat tinggal permanen mereka adalah di tempat asal, di mana terdapat isteri, anak, dan kekayaannya. Para pelaku mobilitas sirkuler tidak tinggal menetap di tempat kerja.

Sedangkan Mantra (1989) menguraikan bentuk mobilitas ulang-alik sebagai pergerakan yang terjadi ketika orang pergi ke tempat kerja dan pulang ke rumah pada hari yang sama (jawa=*nglaju*, inggris=*commuting*). Mereka melakukan aktifitas di kota pada siang hari dan pada waktu malam hari berkumpul kembali dengan keluarganya di daerah asal. Pelaku mobilitas ulang-alik disebut komuter. Selanjutnya dalam tulisan ini kita menyebut pekerja yang melakukan mobilitas sirkuler sebagai pekerja sirkuler dan pekerja yang melakukan mobilitas ulang-alik sebagai pekerja komuter.

Pada awal 1970-an Hugo telah memperlihatkan kejadian dan arti sosio-ekonomi migrasi sirkuler dan komutasi dari perdesaan ke perkotaan yang menyebar luas di Indonesia. Meskipun tidak didukung oleh ketersediaan data yang dikumpulkan dalam sensus atau survei nasional, jelas bahwa tempo pergerakan mobilitas nonpermanen sangat meningkat pada dua dekade terakhir. Banyak studi kasus yang memperlihatkan

peningkatan pergerakan mobilitas nonpermanen secara substansial (Singarimbun 1986; Keyfits, 1985) dan menemukan bahwa perubahan ini mendasari terjadinya perbaikan keadaan ekonomi di desa-desa melalui aliran *remittances*. Kutipan dari dua studi tadi akan cukup merekam pola peningkatan tempo migrasi sementara keluar dari desa-desa di Jawa pada dua dekade terakhir.

Barangkali bukti paling kuat dari pola peningkatan skala dan signifikansi migrasi nonpermanen di Jawa sejak studi pertama di Jawa Barat dilakukan pada tahun 1973 (Hugo, 1973), diperoleh dari studi longitudinal yang menyeluruh pada 37 desa di Jawa yang berlangsung pada periode 1967 hingga 1991. Pada studi tersebut Collier dkk. menyimpulkan :

Twenty five years ago many of the landless labourers on Java had very few sources of income....Now most of the landless rural families on Java have at least one person who is working outside of the village, and in a factory or service job.

Pada semua desa-desa yang di survei ulang tahun 1992-1993, tercatat adanya migrasi besar-besaran keluar desa untuk pekerjaan-pekerjaan yang terdapat di kota-kota yang lebih besar. Dan hanya 20 persen saja merupakan rumah tangga yang menggantungkan hidupnya pada pertanian. Limpahan pergerakan tersebut pada dasarnya sementara atau temporer¹.

Di antara ketiga bentuk mobilitas penduduk di atas yaitu mobilitas ulang-alik, sirkuler dan migrasi, Mantra (1981) menunjukkan bahwa mobilitas ulang-alik lebih banyak dilakukan daripada mobilitas sirkuler atau migrasi. Atau bila mobilitas

¹ Hugo, Graeme J.(1999).*Changing patterns of internal and international population mobility in Indonesia*. Makalah disampaikan pada seminar sehari, Kantor Menteri Negara Kependudukan, Jakarta

ulang-alik/*commuting* dan mobilitas sirkuler digabungkan, maka frekuensi mobilitas nonpermanen ini lebih banyak dibandingkan mobilitas yang permanen. Beberapa alasan memilih strategi migrasi nonpermanen daripada pindah secara permanen telah diuraikan oleh Hugo (1999), sebagai berikut :

- Tipe mobilitas ini sangat sesuai bagi angkatan kerja di sektor informal perkotaan karena komitmen waktu yang lebih fleksibel yang memungkinkan untuk sirkuler ke kampung halaman. Selain itu kemudahan memasuki sektor informal perkotaan juga turut menjadi pemicu.
- Kemampuan berpartisipasi dalam pekerjaan baik di perdesaan dan perkotaan secara sekaligus mengurangi risiko karena peluang sebuah keluarga memperoleh pendapatannya menjadi beragam.
- Biaya hidup di wilayah perkotaan (khususnya di Jakarta) yang sangat tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan membuat migran meninggalkan keluarga tetap di desa dan upah dari kota untuk memenuhi kebutuhan dan standar hidup perdesaan akan membuat mereka mendapatkan keuntungan berlebih.
- Banyak pekerjaan-pekerjaan di kota, khususnya sektor informal, dapat dikombinasikan dengan kunjungan ke desa secara rutin dan teratur.
- Sistem transportasi di Jawa yang murah dan merata dapat menghantarkan para pekerja dari tempat tinggalnya di desa ke tempat kerjanya di kota dengan cepat.
- Pilihan pekerjaan di desa, khususnya selama peningkatan permintaan musiman akan tenaga kerja (seperti masa

panen) tetap bisa dipertahankan. Karenanya mengambil risiko dengan menyebar beberapa sumber pendapatan.

- Banyak pengusaha sektor formal dan informal di kota-kota besar, khususnya Jakarta, menyediakan barak/pemondokan untuk para pekerjanya.
- Sering pergerakan merupakan bagian dari suatu strategi penempatan tenaga kerja keluarga yang beberapa anggotanya dikirim keluar desa untuk menyokong pendapatan keluarga di desa.
- Di banyak kasus terdapat pilihan bagi kehidupan sosial keluarga dengan membawa anak-anak ke desa dalam rangka menghindari dampak negatif dan pengaruh non tradisional jika tinggal di perkotaan.
- Jaringan sosial penting dalam perkembangan bentuk mobilitas ini. Sebagian besar migran temporer memulai pergerakan ini dengan mengikuti migran yang berpengalaman atau bergabung dengan keluarga atau mencari teman yang sudah mapan di tempat tujuan.

Keadaan di atas menggambarkan bahwa perubahan pola dan besaran mobilitas mulai terasa. Mobilitas penduduk berubah dari mobilitas yang relatif permanen (untuk menetap) ke mobilitas yang relatif tidak permanen (tidak untuk menetap). Mereka tidak harus menetap di daerah baru, melainkan berintegrasi dengan perekonomian di daerah baru. Mereka mempengaruhi pasar kerja setempat, selain itu juga mempengaruhi pola konsumsi, pola produksi, dan pola pembiayaan daerah yang mereka datangi (Ananta dan Chotib, 1998). Dengan kata lain, mobilitas nonpermanen merupakan strategi kompromi antara migrasi dan

tidak pindah. Di sini keuntungan yang didapatkan berupa kedekatan sosial dengan masyarakat di tempat asal tetap terjaga, kesempatan meneruskan pengolahan lahan, biaya hidup yang rendah di desa dikomplementasikan dengan keuntungan bekerja di kota atau desa lain, atau pengembangan pendidikan (Goldstein, 1978).

Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa mobilitas penduduk merupakan suatu mekanisme penanggulangan (*coping mechanism*), maka terdapat klasifikasi daerah tempat tujuan bagi para pelaku mobilitas. Daerah yang paling umum dipilih antara lain adalah daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (tambang, kehutanan, dan perkebunan), daerah dengan proyek-proyek pembangunan skala besar, daerah diperbatasan yang perkembangannya sangat pesat (misalnya Batam), dan terutama daerah perkotaan (ILO, 2004).

Kedua bentuk mobilitas nonpermanen di atas tidak terlepas dari keputusan individu maupun rumah tangga dalam menentukan lokasi tempat kerja dan tempat tinggalnya. Berdasarkan ***Theory of Residential and Job Location Choice***, rumah tangga menentukan lokasi tempat tinggal dan tempat kerjanya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya, yang menerangkan *housing time*, *composite good*, dan *leisure time*. Begitu pun secara individu, pekerja akan menetapkan lokasi kerjanya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya dengan memperhatikan gradiasi upah dan gradiasi harga pasar perumahan (White, 1986).

2.3.1 Mobilitas Ulang Alik/*Commuting*

Penelitian mengenai perilaku mobilitas ulang alik lebih banyak dilakukan pada tenaga kerja, karena memang mobilitas ulang alik paling banyak dilakukan oleh para tenaga kerja. Hasil Supas 2005 menunjukkan bahwa sekitar 70,6 persen pelaku mobilitas ulang alik di Indonesia adalah mereka yang bekerja. Mobilitas ulang alik terjadi dikarenakan mahalnnya harga rumah dan mahalnnya biaya hidup di pusat kota, dimana pusat perekonomian berada dan tempat dimana banyak menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu para tenaga kerja lebih memilih tinggal di daerah pinggiran, dimana biaya hidup dan harga rumah relatif lebih murah.

Speare (1975) mengatakan bahwa migrasi tenaga kerja juga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti karakteristik sosio-demografis, tingkat kepuasan terhadap tempat tinggal, kondisi geografis daerah asal, dan karakteristik komunitas. Pada umumnya ketidakpuasan pada latar belakang yang berdimensi struktural ini akan dapat mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi. Sebagai contoh, daerah yang lahan pertaniannya tandus biasanya sebagian besar masyarakatnya akan mencari pekerjaan di tempat lain yang lebih subur atau banyak peluang ekonomi, khususnya pada sektor non pertanian, misalnya industri, perdagangan dan jasa.

Menurut Abler, Adam dan Gould (1972), gerak ulang-alik pada hakekatnya adalah interaksi antara satu daerah dengan daerah lainnya yang timbul akibat hal-hal sebagai berikut:

- Adanya kebutuhan (*demand*) di suatu daerah dan adanya pemasokan (*supply*) di daerah lainnya.

- Tidak terdapatnya sumber lain atau kesempatan antara (*intervening opportunity*) di antara daerah-daerah yang berinteraksi sehingga memberikan distorsi terhadap interaksi kedua daerah tersebut.
- Adanya kemungkinan melakukan gerak dalam kaitannya dengan kemampuan sarana dan prasarana yang mendukung terjadinya interaksi antara dua daerah.

Beberapa literatur menunjukkan bahwa pola mobilitas ulang-alik laki-laki berbeda dengan perempuan. Perempuan cenderung melakukan perjalanan komuting pada jarak pendek. Selain itu perempuan lebih suka bekerja paruh waktu, atau pekerjaan musiman dan tingkat *turn over* yang tinggi. Peran ganda yang disandang perempuan, yaitu sebagai ibu atau pekerja rumah tangga membuat terjadinya pembatasan jarak komuting.

Pekerja yang melakukan ulang alik mempunyai pola yang hampir sama di beberapa wilayah. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, mobilitas ulang alik banyak dilakukan oleh mereka yang berpendidikan SMA ke atas, sedangkan jika dilihat menurut kelompok umur, maka pelaku mobilitas ulang alik banyak dilakukan oleh mereka yang berumur 30-55 tahun (Sahara, 2010).

2.3.2 Mobilitas Sirkuler

Berbeda dengan migran permanen yang memboyong seluruh anggota keluarganya untuk menetap di tempat tujuan, pada umumnya migran sirkuler meskipun bekerja di tempat tujuan namun mereka meninggalkan keluarganya di desa. Kebanyakan mereka mondok atau menginap di tempat tujuan dan pada jangka waktu tertentu mereka secara reguler pulang ke

kampung halamannya. Menurut Jelinek (1986) migran sirkuler meninggalkan daerah asal hanya untuk mencari nafkah tetapi mereka menganggap dan merasa tempat tinggal permanennya di daerah asal, di mana terdapat anak, istri dan kekayaannya. (Haryono, n d, p.2). Seperti yang dikutip ILO dari Stark (1991) bahwa mobilitas sementara dianggap sebagai suatu cara untuk memaksimalkan pendapatan keluarga dan meminimalkan risiko.

Mantra (1986) dalam Studi Mobilitas Penduduk di Enam Kota Besar di Indonesia menyimpulkan sebab-sebab terjadinya mobilitas sirkuler, adalah:

- 1) Mobilitas sirkuler terutama didorong oleh karena penghasilan di daerah perdesaan tidak memadai dan tidak ada/kurang lapangan pekerjaan non pertanian;
- 2) Para migran ke kota-kota bukan mencari gemerlapan kota melainkan karena adanya harapan untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar di kota dan kemungkinan tersedia kesempatan kerja yang lebih luas di kota;
- 3) Dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong dan penarik dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi dominan dalam mobilitas sirkuler. Dengan terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal menyebabkan sebagian besar dari migran bekerja di sektor-sektor marjinal.

Dalam perkembangan mobilitas penduduk di Indonesia, perubahan lain dalam pola dan besaran mobilitas yang signifikan paling tinggi adalah peningkatan keterlibatan perempuan dalam pergerakan permanen dan temporer, khususnya pergerakan nonpermanen mengarahkan perempuan untuk bergerak dari desa ke kota. Perubahan lainnya adalah peningkatan jumlah sektor formal di kota-kota di Indonesia, khususnya Jakarta dan kota-kota

besar lainnya, telah membawa peningkatan jumlah migran untuk kurang lebih menetap secara permanen di kota dan tidak bebas pulang pergi ke/dari tempat tinggal mereka di desa sesering mungkin ketika bekerja di sektor informal.

Berbagai literatur yang membahas mobilitas penduduk selalu menunjukkan bahwa mobilitas penduduk ditentukan oleh kelompok umur dan jenis kelamin. Hasil penelitian yang dilakukan Saefullah (1996) menunjukkan bahwa umumnya pelaku mobilitas nonpermanen terdiri dari kelompok umur potensial yang kebanyakan berumur antara 20-40 tahun. Bahkan pada waktu mulai melakukan mobilitas atau pergi dari daerahnya, mereka berumur rata-rata di bawah 30 tahun. Orang-orang dalam kelompok umur tersebut masih idealis, penuh semangat dan memang sangat besar peranannya dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Ananta dan Wongkaren (1996) juga menyatakan bahwa secara agregat mobilitas penduduk dipengaruhi oleh struktur penduduk di suatu wilayah. Mereka yang lebih muda mempunyai kecenderungan mobilitas yang tinggi daripada mereka yang lebih tua. Untuk kasus migrasi sirkuler, Mantra (1986) dalam penelitiannya menemukan bahwa hampir 95 persen pelaku migrasi sirkuler berumur 15-44 tahun, terdiri dari 44 persen berumur 15-24 tahun, 50 persen berumur 25-44 tahun, dan sisanya berumur 45 tahun ke atas.

Berdasarkan jenis kelaminnya, pelaku mobilitas sirkuler kebanyakan adalah laki-laki dibandingkan perempuan (Soeharno, 1979; Mantra, 1986; Tarigan, 2004). Leinbach dan Suwarno (1985) menemukan bahwa untuk kasus komuter memang laki-laki lebih besar proporsinya dibandingkan perempuan, dan proporsinya akan jauh lebih besar lagi untuk kasus sirkuler di

mana hampir semua pelaku migran sirkuler adalah laki-laki. Ketidakseimbangan tersebut disebabkan karena status laki-laki sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan cara datang ke kota untuk bekerja tanpa membawa keluarganya. Sedangkan istri melakukan pekerjaan rutin serta bertanggung jawab dalam mengurus anak-anak dan kegiatan rumah tangga. Selain itu tingkat mobilitas laki-laki memang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Menurut Ananta, Anwar, dan Miranti (2001) perempuan yang berstatus kawin akan lebih cenderung melakukan mobilitas secara permanen daripada mobilitas nonpermanen. Kebanyakan mereka pindah tempat karena alasan mengikuti suami. Hal serupa diungkapkan Saefullah (1996) bahwa dominasi laki-laki dalam mobilitas tidak lepas dari kehidupan sosial budaya dan agama menyangkut kebebasan perempuan untuk bepergian di mana dalam suatu masyarakat yang masih kuat mematuhi adat kebiasaannya seorang perempuan tidak bebas untuk bepergian.

Untuk kasus sirkuler, pelaku mobilitas yang berstatus kawin sedikit lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan yang belum kawin (Mantra, 1986), dan diantara mereka lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Namun menurut Tarigan (2004) lebih banyak yang belum kawin karena tidak adanya keterkaitan khusus terhadap keluarga. Pernikahan merupakan faktor penghambat keputusan seseorang bermigrasi karena adanya tanggungjawab perhatian, kasih sayang dan moral terhadap keluarga untuk mendampingi secara langsung. Hugo (2000) menambahkan bahwa dalam banyak kasus migrasi adalah selektif untuk laki-laki (khususnya migrasi sirkuler), kelompok umur muda, berstatus kawin, dan yang lebih berpendidikan. Di antara

migran sirkuler, lebih banyak laki-laki muda yang bukan berstatus sebagai kepala rumah tangga, ini mencerminkan kenyataan bahwa di banyak kasus-kasus migrasi sirkuler merupakan strategi mempertahankan hidup, khususnya di area perkotaan melalui pengiriman anggota keluarga keluar untuk menyokong pendapatan keluarga pada masa menunggu panen. Tapi bagaimanapun, menurut Leinbach dan Suwarno (1985) pelaku *commuting* atau sirkuler paling banyak adalah mereka yang berstatus kawin.

Sektor yang paling banyak dimasuki oleh migran sirkuler adalah sektor informal. Seperti dijelaskan oleh Hugo sebelumnya, alasan mengapa migran memilih sektor informal, pertama, oleh karena waktu untuk bekerja di sektor ini bersifat luwes, sehingga pekerjaan para migran di perdesaan tidak terganggu. Hasil penelitian Universitas Sebelas Maret menunjukkan bahwa lebih dari separuh migran sirkuler di Surakarta masih memiliki pekerjaan di daerah perdesaan antara lain sebagai petani dan buruh tani (Soeharno, 1979). Kedua, bahwa para migran mudah masuk dan keluar dari sektor informal di banding sektor formal.

Berbeda dengan sektor formal, pekerjaan di sektor informal tidak memerlukan kualifikasi pendidikan yang tinggi. Sektor ini mudah dimasuki tenaga kerja yang tidak berpendidikan dan berketerampilan. Pada umumnya pendidikan kaum migran sirkuler rendah dan mereka tidak memiliki keterampilan yang memadai (*unskilled worker*) (Mantra, 1986; Hugo, 2000; Tarigan, 2004; Haryono, n.d). Seringkali ini mengakibatkan mereka mencari nafkah di kota dengan melakukan usaha mandiri kecil-kecilan, menggunakan peralatan dan keterampilan sederhana yang dikuasainya. Mereka bekerja sebagai pemulung, penjual keliling,

pedagang asongan, tukang becak, tukang ojek, pedagang kaki lima, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya yang pada umumnya merupakan bagian dari sektor informal (Hart, 1985).

Jangkauan kegiatan di sektor informal ini sangat luas. Kegiatan ini bisa dijumpai di sektor perbankan dalam bentuk kegiatan rentenir, di sektor angkutan dalam bentuk operasi tukang becak, di bidang jasa dalam bentuk kegiatan memulung, di sektor perdagangan ada kegiatan berdagang kaki lima, dan sektor konstruksi dalam bentuk penggunaan jasa pekerja bangunan dan mandor (Haryono, n.d).

2.3.3 Mobilitas Pekerjaan

Seseorang dikatakan pindah pekerjaan jika pekerjaan sekarang berbeda dengan pekerjaan sebelumnya baik berbeda lapangan usaha maupun status pekerjaan. Untuk menentukan pekerjaan sekarang dan pekerjaan terdahulu biasanya menggunakan rentang waktu tertentu. Rentang waktu itu sendiri tidak ada batasan.

Dalam mengambil keputusan untuk pindah pekerjaan atau tetap pada pekerjaan yang lama biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun biasanya faktor yang paling dominan adalah ingin mendapat pendapatan yang lebih besar. Menurut Borjas dan Bartel (1978) dalam Rahayu (2010), perpindahan pekerjaan dapat disebabkan oleh keinginan pekerja, karena menemukan pekerjaan yang lebih baik, atau dapat juga disebabkan karena diberhentikan oleh perusahaan tempatnya bekerja ataupun habis masa kontrak kerja.

Pergerakan tenaga kerja atau lebih dikenal dengan *labor turnover* atau *labor mobility* banyak terjadi di pasar kerja. Menurut

Schettkat (1996) dalam Rahayu (2010) pergerakan tenaga kerja itu dapat terjadi:

- dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain
- dari satu majikan ke majikan lain
- dari satu industri ke industri lain
- dari satu wilayah ke wilayah lain
- dari bekerja menjadi pengangguran
- dari bekerja menjadi bukan angkatan kerja.

Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Rahayu (2010) menunjukkan bahwa keputusan tenaga kerja untuk pindah kerja dipengaruhi oleh karakteristik sosial demografi individu dan faktor ekonomi, seperti kesenjangan penghasilan, umur, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, status perkawinan, keberadaan ART lain yang bekerja, status pekerjaan, lapangan usaha, serta jenis pekerjaan. Semakin besar gap penghasilan maka peluang pekerja untuk pindah pekerjaan akan semakin besar.

Rahayu (2010) juga menemukan bahwa pekerja di lapangan usaha manufaktur memiliki peluang lebih besar untuk pindah pekerjaan dibanding pekerja pada lapangan usaha jasa dan pertanian. Sedangkan pekerja yang memiliki peluang pindah kerja yang paling rendah adalah pekerja di lapangan usaha pertanian.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Sumber Data

Sumber data mobilitas tenaga kerja yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Informasi mengenai mobilitas tenaga kerja yang diperoleh dari hasil Sakernas sampai dengan tahun 2007 masih terbatas. Mulai tahun 2008, Sakernas mengumpulkan informasi mengenai mobilitas tenaga kerja secara lebih lengkap dan dapat disajikan sampai level kabupaten/kota. Selain itu, informasi tambahan yang disajikan tidak saja tentang perpindahan pekerja secara geografis, tetapi juga perpindahan lapangan pekerjaan dan pergeseran status pekerjaan.

Tujuan awal dari perancangan Sakernas adalah untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Dengan demikian maka karakteristik khusus serta informasi yang melekat dapat terekam. Pada awal pelaksanaan Sakernas, yakni tahun 1986 hingga tahun 1993, periode pencacahannya adalah triwulanan. Sakernas kemudian hanya dilakukan setahun sekali pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 tepatnya di bulan Agustus. Pada tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Sedangkan tahun 2005 sampai dengan 2010 Sakernas dilakukan secara semesteran pada bulan Februari dan Agustus.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan

data Sakernas sejak tahun 2011 mulai dilakukan kembali secara triwulanan, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Untuk kegiatan Sakernas pada bulan Agustus, selain secara sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, dimaksudkan untuk memperoleh angka tahunan sebagai estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota.

Penulisan publikasi analisis mobilitas tenaga kerja ini menggunakan sumber data utama hasil Sakernas Bulan Agustus 2014. Selain itu sebagai informasi tambahan/pembanding juga menggunakan data hasil Sakernas Bulan Agustus 2013.

3.2 Kerangka Sampel

Sakernas Agustus 2013 dan 2014 mencakup seluruh wilayah Indonesia. Pada setiap kabupaten/kota baik di daerah perkotaan maupun perdesaan terdapat sampel, dimana unit pengambilan sampel terkecilnya adalah rumah tangga. Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap pertama, kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap kedua dan kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap ketiga. Blok sensus dalam kerangka sampel dipilah menjadi dua kelompok, yaitu blok sensus terpilih untuk estimasi tingkat provinsi, dan blok sensus komplemen (sebagai tambahan untuk estimasi kabupaten/kota).

- ✓ Kerangka sampel pemilihan **tahap pertama** adalah daftar wilayah pencacahan (wilcah) SP2010 yang terpilih Susenas Triwulan I yang disertai dengan informasi banyaknya rumah tangga hasil listing SP2010 (Daftar RBL1), muatan blok sensus dominan (pemukiman biasa, pemukiman mewah, pemukiman

kumuh), informasi daerah sulit/tidak sulit, dan klasifikasi desa/kelurahan (*rural/urban*).

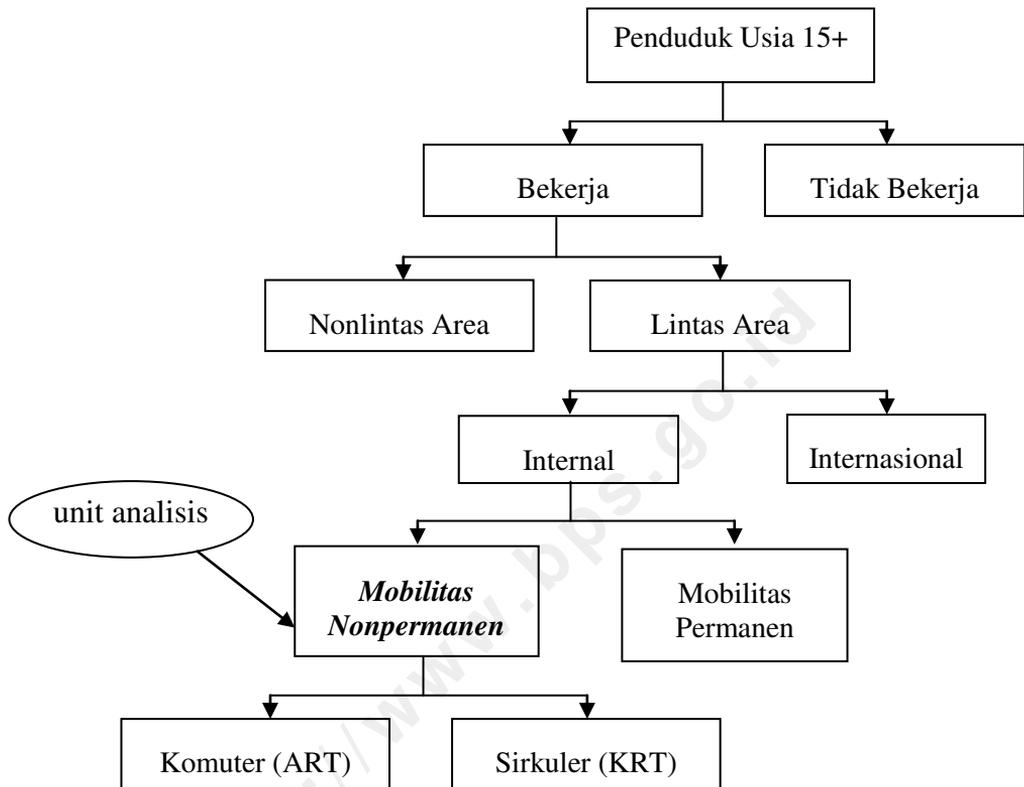
- ✓ Kerangka sampel pemilihan **tahap kedua** adalah daftar blok sensus pada setiap wilcah terpilih.
- ✓ Kerangka sampel pemilihan **tahap ketiga** adalah daftar rumah tangga biasa tidak termasuk *institutional household* (panti asuhan, barak polisi/militer, penjara, dsb) dalam setiap blok sensus sampel hasil pencacahan lengkap SP2010 (SP2010-C1) yang telah dimutakhirkan pada setiap menjelang pelaksanaan survei.

3.3 Unit Analisis

Tujuan penulisan publikasi ini sebagaimana sudah disampaikan pada bab pertama adalah untuk mengeksplorasi potensi mobilitas tenaga kerja, dilihat dari sisi pekerja pelaku mobilitas nonpermanen dan pekerja pelaku mobilitas pekerjaan (*job mobility*). Analisis dilakukan terhadap dua unit yang berbeda. Pertama, analisis terhadap pekerja pelaku mobilitas nonpermanen, dan kedua, analisis terhadap pekerja yang melakukan perpindahan pekerjaan.

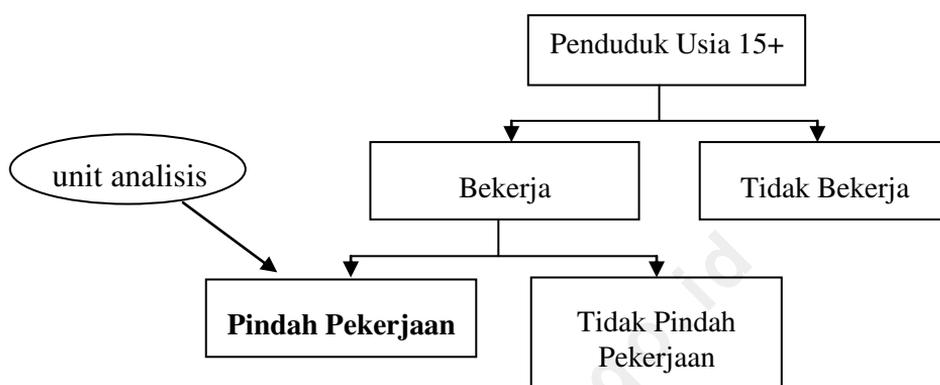
Unit analisis yang digunakan dalam menganalisis pekerja pelaku mobilitas nonpermanen adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, tempat tinggal dan tempat bekerjanya berbeda secara administratif, dan perjalanan dari/ke tempat tinggal ke/dari tempat kerja dilakukan pada hari yang sama. Batasan administratif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota. Alur pemilihan sampel dapat dilihat pada Gambar 3.1.

**Gambar 3.1. Alur Pemilihan Sampel Pekerja Pelaku
Mobilitas Nonpermanen**



Sementara, unit analisis yang digunakan dalam menganalisis pelaku perpindahan pekerjaan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan setelah 31 Agustus 2013 pernah pindah pekerjaan. Sedangkan unit analisis pelaku perpindahan pekerjaan dari Sakernas 2013 adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan setelah 31 Agustus 2012 pernah pindah pekerjaan. Alur pemilihan sampel untuk analisis pelaku perpindahan pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 3.2.

**Gambar 3.2. Alur Pemilihan Sampel Pekerja Pelaku
Mobilitas Pekerjaan**



3.4 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data Sakernas tahun 2014 dan tahun sebelumnya dilakukan dengan pencacahan terhadap 200.000 rumah tangga, yang dilaksanakan pada bulan Agustus dengan menggunakan daftar SAK14-AK dan SAK13-AK. Pelaksanaan lapangan Sakernas Agustus sejak tahun 2011 **tidak lagi** dalam bentuk TIM, melainkan terdiri dari Pengawas dan Pencacah. Pengawas adalah pegawai organik BPS Kabupaten/Kota atau Provinsi (diutamakan lulusan D III keatas), sedangkan Pencacah adalah pegawai organik BPS Kabupaten/Kota maupun non organik (mitra) BPS yang ditunjuk dan berpendidikan minimal SLTA (diutamakan D III ke atas). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mobilitas tenaga

kerja merupakan pertanyaan individu dalam kuesioner, sehingga diusahakan bersumber dari individu yang bersangkutan.

Pengolahan data meliputi *editing*, *coding*, *data entry*, *validasi* dan *tabulasi*. Kegiatan *editing* dan *coding* merupakan kegiatan pengolahan pra-komputer yang meliputi pemeriksaan isian daftar dan pemberian kode numerik. Pemeriksaan yang dimaksud adalah pengecekan isian pertanyaan, pemeriksaan konsistensi isian dalam blok maupun antar blok. Pada saat perekaman data (*data entry*), secara simultan dijalankan program *validasi*, sehingga begitu data terekam maka data sudah bersih. Penyuntingan lanjutan dilakukan untuk validasi data tertentu yang belum tercakup dalam program perekaman data, kemudian dilanjutkan dengan tabulasi. Hasil akhir yang disajikan adalah data berbentuk tabel. Tabel-tabel yang disajikan pada publikasi ini dikeluarkan dengan program tabulasi yang dibuat khusus.

3.5 Definisi Operasional

3.5.1 Variabel Sakernas yang Digunakan

Beberapa definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam analisis yang bersumber dari kuesioner Sakernas Agustus 2014 dan tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut :

1. **Rumah tangga** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur (pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu).
2. **Anggota rumah tangga** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.

Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang 6 bulan tetapi dengan tujuan akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga. Tamu yang telah tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih dan tamu yang tinggal dirumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga.

3. **Umur** dihitung dalam tahun dengan *pembulatan ke bawah* atau umur menurut *ulang tahun terakhir* sebelum pencacahan. Perhitungan umur didasarkan pada kalender Masehi. Terkait dengan kebutuhan analisis, maka variabel umur dikelompokkan menjadi kelompok umur sepuluh tahunan dengan batas bawah umur 15 tahun.
4. **Status Perkawinan** dikelompokkan menjadi Belum Kawin, Kawin, Cerai Hidup, dan Cerai Mati. **Kawin** adalah status dari mereka yang terkait dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri. **Cerai hidup** adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Mereka yang mengaku cerai, walaupun belum resmi secara hukum, dianggap cerai. Sebaliknya mereka yang sementara hidup terpisah tidak dianggap bercerai, misalnya suami/istri yang ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau sedang cekcok. **Cerai**

mati adalah status dari mereka yang suami/istrinya telah meninggal dunia dan belum kawin lagi.

5. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah). Kaitannya dengan penyajian pada buku ini, tingkat pendidikan dibagi menjadi 2 golongan yaitu: (1). Mereka yang tergolong **di bawah SMA**, mencakup mereka yang tidak/belum pernah sekolah, tidak/belum tamat Sekolah Dasar (SD), tamat SD atau sederajat dan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. (2). Mereka yang tergolong **SMA ke atas**, mencakup mereka yang tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan mereka yang tamat Perguruan Tinggi.
6. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
7. **Pekerjaan Utama**, cara penentuan suatu kegiatan merupakan pekerjaan utama atau bukan adalah sebagai berikut: (1). Jika responden pada seminggu yang lalu hanya mempunyai satu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dicatat sebagai pekerjaan utama; (2). Jika responden pada seminggu yang lalu mempunyai lebih dari satu pekerjaan, maka pekerjaan yang menggunakan *waktu terbanyak* dicatat sebagai pekerjaan utama. Jika waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan yang

memberikan *penghasilan terbesar* dianggap sebagai pekerjaan utama. Jika waktu yang digunakan sama dan penghasilannya juga sama besar, maka jenis pekerjaan diserahkan kepada responden, pekerjaan mana yang dianggap merupakan pekerjaan utama.

8. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Lapangan usaha/pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005.

Penyajian lapangan usaha pada publikasi ini ada juga yang membagi menjadi tiga kelompok, yaitu pertanian, manufaktur dan jasa-jasa. Kelompok **pertanian** mencakup tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya. Untuk kelompok **manufaktur** mencakup pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan gas, serta konstruksi/bangunan. Sedangkan yang termasuk kelompok **jasa-jasa** adalah perdagangan, hotel dan rumah makan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa kemasyarakatan, jasa pemerintahan dan perorangan, dan lainnya.

9. **Jenis Pekerjaan/Jabatan** adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2002 yang mengacu kepada ISCO 88.

10. **Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 (tujuh) kategori yaitu:

(a). *Berusaha sendiri* adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

(b). *Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar* adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.

(c). *Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar* adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.

(d). *Buruh/Karyawan/Pegawai* adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang *tidak mempunyai majikan tetap*, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki *majikan tetap* jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya 3 (tiga) bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

(e). *Pekerja bebas di pertanian*, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap

(lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik yang berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian. **Majikan** adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.

(f). Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistim pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan; sektor industri; sektor listrik, gas dan air; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi; sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan; dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

(g). Pekerja tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari: anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah; bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti

famili yang membantu melayani penjualan di warung; bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya.

Dalam publikasi ini juga mengelompokkan status pekerjaan menjadi formal dan informal dimana dasar pengelompokannya adalah berdasarkan matrik kegiatan formal informal pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Matriks Kegiatan Formal Informal

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama										
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Berusaha Sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tak Dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF	
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	
Pekerja Bebas di Non Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	
Pekerja Tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	

Catatan : F = Formal INF=Informal

3.5.2 Mobilitas Nonpermanen

Mobilitas penduduk nonpermanen adalah gerak penduduk dari suatu wilayah menuju ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan. Mobilitas nonpermanen mencakup mobilitas ulang alik dan mobilitas sirkuler. Mobilitas ulang alik adalah pergerakan penduduk secara rutin pergi ke tempat tujuan dan kembali ke tempat tinggal dalam waktu kurang dari 24 jam dengan melewati batas administratif tingkat kabupaten atau kota. Sedangkan mobilitas sirkuler adalah pergerakan penduduk secara rutin pergi ke tempat tujuan dan kembali ke tempat tinggal dalam jangka waktu mingguan atau bulanan dengan melewati batas administratif tingkat kabupaten atau kota.

Definisi yang digunakan antara lain:

- (1). Pekerja komuter adalah pelaku mobilitas ulang alik dengan tujuan utama untuk bekerja.
- (2). Pekerja Sirkuler adalah pelaku mobilitas sirkuler dengan tujuan utama untuk bekerja.
- (3). *Stayer* adalah pekerja yang tidak melakukan mobilitas nonpermanen atau dengan kata lain tempat bekerjanya berada di satu kabupaten/kota yang sama dengan tempat tinggalnya.

3.5.3 Mobilitas Pekerjaan

Mobilitas pekerjaan didefinisikan sebagai pindah lapangan pekerjaan dan atau status pekerjaan sehingga tidak lagi mempunyai ikatan dengan usaha (pekerjaan) atau organisasi tempat bekerja sebelumnya. Perubahan pekerjaan yang dicatat disini adalah yang terjadi setelah 31 Agustus 2013 (untuk

Sakernas 2014) atau setelah 31 Agustus 2012 (untuk Sakernas tahun sebelumnya).

3.6 Metode Analisa

Dalam rangka menyajikan informasi mobilitas tenaga kerja yang lengkap dan sesuai dengan ketersediaan data yang bersumber dari Sakernas 2014, maka analisis deskriptif merupakan alternatif utama yang akan digunakan. Secara umum skema analisis deskriptif dilakukan melalui tabulasi satu arah maupun dua arah dalam satuan persen. Angka nominal sengaja tidak ditampilkan karena data yang digunakan bersumber dari sampel, bukan mencakup seluruh populasi. Selain disajikan dalam bentuk tabulasi, analisis ini juga menampilkan visualisasi grafis dari beberapa informasi khusus yang terkait. Kelebihan dalam melakukan analisis deskriptif adalah bahwa analisis dapat dilakukan dengan membandingkan dan melihat rasio dari informasi tenaga kerja secara relevan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

4.1 Kondisi Pasar Kerja Indonesia

Sebagai negara dengan struktur penduduk “*intermediate*” yaitu transisi dari penduduk muda ke penduduk tua, Indonesia akan selalu mengalami penambahan jumlah penduduk usia kerja dari tahun ke tahun. Tabel 4.1 menunjukkan beberapa karakteristik pasar tenaga kerja di Indonesia sejak tahun 2010 hingga 2014. Perkembangan positif berlangsung selama periode 2010–2014. Pertambahan penduduk usia kerja diikuti oleh pertambahan angkatan kerja. Pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja mencapai 116,5 juta jiwa, dan meningkat menjadi 121,9 juta jiwa pada tahun 2014.

Tabel 4.1 Karakteristik Pasar Tenaga Kerja Indonesia, 2010 – 2014

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah penduduk usia kerja (juta orang)	172,1	173,9	176,9	179,9	182,9
Jumlah angkatan kerja (juta orang)	116,5	116,1	119,8	120,2	121,9
Persentase AK menurut jenis kelamin					
Laki-Laki (%)	61,7	62,6	62,0	62,3	62,2
Perempuan (%)	38,3	37,4	38,0	37,7	37,8
Persentase pekerja menurut sektor					
Formal (%)	41,0	46,6	46,4	47,0	46,8
Informal (%)	59,0	53,6	53,6	53,0	53,2
Persentase pengangguran (%)	7,1	7,4	6,1	6,2	5,9
Persentase pekerja menurut status mobilitas					
Pekerja komuter (%)	5,4	5,5	5,7	5,7	6,1
Pekerja sirkuler (%) *)	1,6	2,0	2,1	1,7	2,0

*) khusus KRT

Dibanding tahun 2010, proporsi perempuan yang masuk dalam angkatan kerja pada bulan Agustus tahun 2014 mengalami penurunan. Akan tetapi proporsinya meningkat dibandingkan tahun 2013. Ada peningkatan peran perempuan dalam angkatan kerja. Gejala positif lainnya adalah adanya peningkatan proporsi pekerja sektor formal. Polanya meningkat sejak tahun 2010–2013 dan turun sedikit antara 2013–2014. Semakin lama, semakin banyak tenaga kerja yang terserap dalam pekerjaan formal. Tercatat tahun 2010 sebesar 41,0 persen menjadi 46,8 persen pada tahun 2014. Hampir separuh pekerja Indonesia pada tahun 2014 berada pada kondisi yang cukup terjamin, tingkat upah mereka ada dalam pengawasan pemerintah.

Perkembangan baik lainnya juga dapat dilihat dari tren tingkat pengangguran pada periode 2010–2014. Terjadi penurunan dari 7,1 persen pada tahun 2010 menjadi 5,9 persen pada tahun 2014. Artinya adalah pasar kerja mempunyai kemampuan semakin kuat menyerap limpahan angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Tingkat penyerapan tenaga kerja semakin baik.

Seperti yang pernah diungkapkan Hugo (2000) bahwa semakin lama mobilitas non permanen akan terus meningkat di Indonesia. Pada tahun 2010 tercatat persentase pekerja pelaku mobilitas non permanen sebanyak 7 persen meningkat terus menjadi 8,1 persen pada tahun 2014. Jika dipisahkan antara pekerja komuter dan pekerja sirkuler, tren peningkatan pekerja komuter jauh lebih besar dibandingkan pekerja sirkuler.

**Tabel 4.2 Distribusi Persentase Angkatan Kerja Indonesia
Menurut Tingkat Pendidikan, 2010 - 2014**

Tingkat Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Di bawah SMA	67,8	67,1	66,0	64,9	63,6
Tidak sekolah	4,6	5,3	4,8	4,6	4,3
Tidak tamat SD	16,0	14,9	14,3	13,6	13,3
Tamat SD	28,1	27,7	28,6	28,2	28,0
Tamat SMP	19,1	19,2	18,4	18,5	18,0
SMA ke atas	32,2	32,9	34,0	35,1	36,4
Tamat SMA	24,1	24,9	25,0	25,8	26,6
Perguruan Tinggi	8,1	8,0	9,0	9,3	9,8

Tidak hanya kuantitas saja yang mengalami peningkatan, kualitas angkatan kerja di Indonesia juga mengalami hal serupa. Kualitas tenaga kerja dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Di sini angkatan kerja dikelompokkan ke dalam 2 golongan, yaitu berpendidikan di bawah SMA dan berpendidikan SMA ke atas. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kualitas angkatan kerja Indonesia 5 tahun belakangan ini terus mengalami perbaikan. Ditandai dengan tren proporsi angkatan kerja berpendidikan SMA ke atas yang terus naik selama 2010-2014. Tercatat pada tahun 2010 sebesar 32,2 persen dan naik menjadi 36,4 persen pada tahun 2014.

Jika dilihat menurut struktur ekonomi, tampak dengan jelas bahwa telah terjadi pergeseran struktur perekonomian di Indonesia. Transformasi pekerjaan dari sektor pertanian ke non pertanian terjadi belakangan ini. Meskipun masih banyak yang terserap di lapangan pekerjaan pertanian, semakin lama persentasenya semakin menurun. Tabel 4.3 menunjukkan tren sektor pertanian yang mengalami penurunan secara terus menerus. Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 38,4 persen dan

terus menurun hingga mencapai 34,0 persen pada tahun 2014. Sebaliknya dengan sektor non pertanian yang polanya terus meningkat. Perkembangan terbesar terjadi pada sektor jasa yang mengalami kenaikan dari 47,7 persen pada tahun 2010 menjadi 51,3 persen pada tahun 2014. Pada periode tersebut, ternyata pekerja Indonesia separuh lebih merupakan pekerja sektor non pertanian.

Tabel 4.3 Distribusi Persentase Pekerja Indonesia Menurut Sektor Ekonomi, 2010 - 2014

Sektor ekonomi	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	38,3	36,4	35,2	34,8	34,0
Industri	14,0	14,8	15,3	14,8	14,9
Pertambangan & penggalian	1,2	1,3	1,4	1,3	1,3
Manufaktur	12,8	13,5	13,9	13,5	13,6
Jasa	47,7	48,8	49,5	50,4	51,3
Perdagangan	20,8	20,8	20,9	21,4	21,7
Jasa selain perdagangan	26,9	28,0	28,6	29,0	29,6
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sejalan dengan penemuan Hugo (2000) yang menguraikan bahwa laju pertumbuhan industri pengolahan dan kesempatan kerja lainnya di kota cenderung menarik orang keluar dari sektor pertanian. Pekerjaan sektor non pertanian khususnya industri, merupakan ruang perluasan medan sosial ekonomi yang banyak dimasuki angkatan kerja perdesaan. Mengingat sebagian besar industri berlokasi di wilayah perkotaan, maka secara bersamaan terjadi perpindahan dari perdesaan ke perkotaan berupa mobilitas ulang-alik, sirkuler, maupun migrasi. Disamping itu, dalam era globalisasi dan modernisasi seperti saat ini, salah satu realitas

ketenagakerjaan yang berkembang di Indonesia adalah mulai berkurangnya minat angkatan kerja muda untuk bekerja di sektor pertanian. Sektor ini dianggap kurang mampu memberikan pendapatan yang memadai untuk hidup secara layak (Tarigan, 2004). Sekalipun tingkat upah buruh tani mengalami kenaikan, tapi masih jauh di bawah kenaikan tingkat upah sektor non pertanian. Menurut Kasryno (2000), penerimaan buruh tani per minggu hanya separuh penerimaan buruh sektor non pertanian.

4.2 Mobilitas Nonpermanen di Indonesia

Sebelumnya pernah dibahas bahwa transformasi pekerjaan dari pertanian ke non pertanian tengah berlangsung belakangan ini. Transformasi ini mendorong adanya pergerakan penduduk dari perdesaan ke perkotaan. Ketika tenaga kerja perdesaan lebih memilih bekerja di sektor industri dan jasa-jasa yang tersebar di perkotaan, dan didorong oleh motivasi ekonomi untuk memperoleh upah/pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan bekerja di sektor pertanian di daerah asalnya, maka tidak bisa dihindari arus mobilitas pekerja dari perdesaan ke perkotaan akan terjadi dan semakin membesar.

Berdasarkan *Theory of Residential and Job Location Choice*, rumah tangga akan memaksimalkan fungsi utilitasnya. Dalam menentukan lokasi tempat tinggal dan tempat kerjanya akan memperhatikan gradiasi upah dan harga pasar perumahan (White, 1986). Pada akhirnya akan ditemukan fenomena lokasi tempat kerja yang berbeda dengan lokasi tempat tinggalnya, dan akan terus berlangsung hingga saat ini. Pendapatan lebih tinggi yang diperoleh ketika bekerja di kota atau tempat lain dibandingkan

konsumsi rumah tangga dengan biaya lebih murah di daerah asalnya merupakan keuntungan tersendiri yang tidak akan diperoleh jika harus pindah tempat tinggal ke lokasi tempat bekerja. Kelebihan positif ini menjadi pertimbangan bagi para tenaga kerja untuk melakukan mobilitas nonpermanen dari pada berpindah (migrasi).

Hugo (1970) mengungkapkan bahwa tempo pergerakan mobilitas nonpermanen meningkat dalam dua dekade terakhir. Sesuai dengan data yang terdapat di Tabel 4.1, proporsi pekerja pelaku mobilitas nonpermanen belakangan ini terus meningkat. Pada tahun 2010, pekerja komuter mencapai 5,4 persen dan melonjak hingga 6,1 persen pada tahun 2014. Sebaliknya dengan pekerja sirkuler, dari 2,2 persen turun menjadi 2,0 persen pada periode waktu yang sama. Pada publikasi ini terjadi perbedaan pengukuran untuk pekerja sirkuler karena yang dimasukkan sebagai pekerja sirkuler adalah khusus untuk kepala rumah tangga. Hal ini mengacu kepada konsep dan definisi penduduk yang digunakan oleh BPS.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Mantra bahwa kejadian mobilitas ulang-alik lebih banyak dilakukan dibandingkan mobilitas sirkuler. Pembahasan secara mendalam mengenai karakteristik pekerja komuter dan pekerja sirkuler akan diulas pada subbab berikut ini.

4.2.1 Karakteristik Pekerja Komuter dan Sirkuler Ditinjau dari Aspek Sosiodemografi

Soeharno (1979), Mantra (1986), dan Tarigan (2004) menemukan bahwa pelaku mobilitas sirkuler adalah laki-laki.

Kasus serupa juga berlaku untuk komuter, di mana laki-laki lebih besar proporsinya dibandingkan perempuan, dan proporsinya akan jauh lebih besar lagi untuk kasus mobilitas sirkuler di mana hampir semua pelaku mobilitas sirkuler adalah laki-laki (Leinbach dan Suwarno, 1985). Ketidaksebandingan tersebut disebabkan karena status laki-laki sebagai kepala keluarga harus bertanggungjawab memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan cara datang ke kota untuk bekerja tanpa membawa keluarganya.

Tabel 4.4 Karakteristik Sosiodemografi Pekerja Pelaku Mobilitas Nonpermanen, 2014

Karakteristik	Status Mobilitas							
	Pekerja Komuter		Pekerja Sirkuler		Stayers		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jenis Kelamin								
Laki-laki	4.855.688	6,8	2.184.934	3,1	64.422.685	90,1	71.463.307	100,0
Perempuan	2.082.992	4,8	56.793	0,1	41.024.934	94,1	43.164.719	100,0
Status Perkawinan								
Belum kawin	1.955.380	9,4	14.241	0,1	18.896.061	90,5	20.865.682	100,0
Kawin	4.749.154	5,5	2.154.126	2,5	78.832.335	92,0	85.735.615	100,0
Cerai hidup	123.683	4,7	28.765	1,1	2.460.231	94,2	2.612.679	100,0
Cerai mati	110.463	2,0	44.595	0,8	5.258.992	97,2	5.414.050	100,0
Daerah Tempat Tinggal								
Perkotaan	5.803.487	10,4	992.637	1,8	48.847.544	87,8	55.643.668	100,0
Pedesaan	1.135.193	1,9	1.249.090	2,1	56.600.075	96,0	58.984.358	100,0
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan								
dibawah SMA	1.824.478	2,5	1.563.791	2,1	70.918.106	95,4	74.306.375	100,0
SMA ke atas	5.114.202	12,7	677.936	1,7	34.529.513	85,6	40.321.651	100,0
Jumlah	6.938.680	6,1	2.241.727	2,0	105.447.619	91,9	114.628.026	100,0

Kondisi ini masih berlaku hingga saat ini. Proporsi laki-laki yang melakukan kegiatan mobilitas ulang-alik atau sirkuler masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa perempuan lebih cenderung menjadi *stayers* atau bekerja di lokasi yang sama dengan tempat tinggalnya. Kemungkinan hal tersebut terkait dengan peran dan tugasnya dalam rumah tangga.

Teori yang ada sampai saat ini masih sejalan dengan data yang tersaji. Status perkawinan berpotensi mempengaruhi seseorang dalam melakukan perpindahan. Pada umur muda (15-24 tahun) proporsi tenaga kerja yang berstatus tidak/belum kawin lebih tinggi dibandingkan mereka yang sudah kawin. Terjadinya peningkatan usia perkawinan pertama sebagai dampak dari peningkatan pendidikan, globalisasi dan kesempatan kerja yang besar telah mendorong para tenaga kerja usia muda menunda perkawinan. Setelah mencapai usia 35 tahun pola perpindahan tenaga kerja kemudian didominasi oleh mereka yang bertatus kawin.

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa berdasarkan status perkawinannya, proporsi mereka yang belum kawin yang melakukan mobilitas ulang-alik lebih besar dibandingkan yang berstatus kawin dan cerai. Sebaliknya untuk mobilitas sirkuler, justru proporsi tertinggi adalah mereka yang berstatus kawin. Yang menarik di sini ditemukan bahwa mereka yang tidak melakukan mobilitas nonpermanen (*stayers*) yang terbesar adalah yang berstatus cerai.

Teori migrasi mengungkapkan bahwa migrasi selektif terhadap laki-laki (khususnya sirkuler), dan kelompok usia muda dan yang lebih berpendidikan. Beberapa penemuan membuktikan

bahwa pendidikan pelaku mobilitas sirkuler rendah dan mereka tidak memiliki keterampilan yang memadai (Mantra, 1986; Hugo, 2000; Tarigan, 2004; Widaryatmo, 2009). Sebaliknya, menurut BKLH (1985), Zo, Orasem dan Otto (2001), Widaryatmo (2009) dan Sahara (2010) mereka yang menjadi komuter adalah yang lebih berpendidikan. Mereka lebih suka tinggal di daerah perkotaan, dan akan meningkatkan utilitasnya dengan bekerja di kota lain yang akan memberikan upah lebih tinggi.

Data Sakernas 2014 memberikan gambaran yang sejalan dengan teori di atas. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa mereka yang melakukan mobilitas adalah yang berpendidikan SMA ke atas. Untuk yang berpendidikan di bawah SMA paling banyak menjadi *stayers*. Ini menunjukkan bahwa utilitas pekerja berbeda menurut tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin individu ingin memaksimalkan utilitasnya dengan melakukan mobilitas ke daerah lain. Pada kasus komuter dan sirkuler, tampak bahwa proporsi terbesar komuter adalah pekerja yang berpendidikan SMA ke atas. Sebaliknya untuk pekerja sirkuler adalah pekerja dengan pendidikan di bawah SMA.

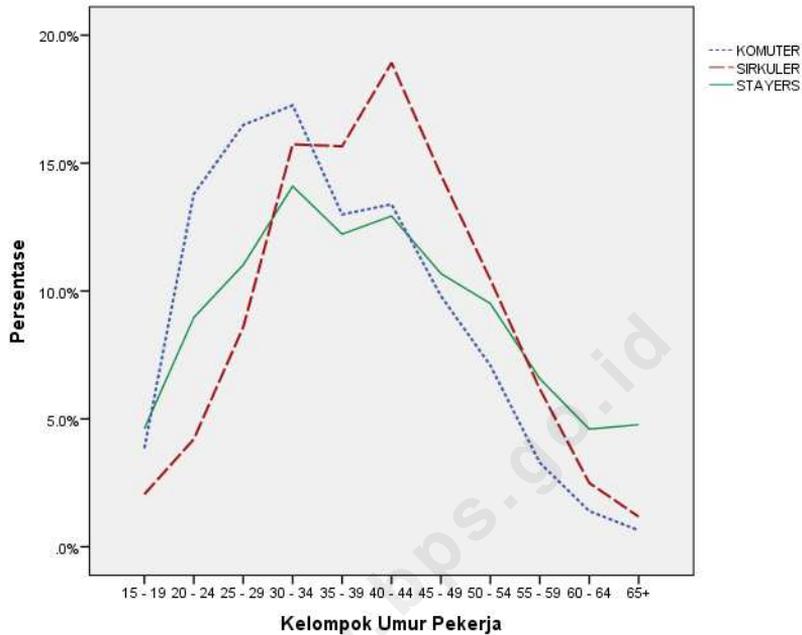
Karakteristik pekerja komuter dan pekerja sirkuler yang dikelompokkan menurut umur lima tahunan, akan memberikan penggambaran yang lebih detil dari pola mobilitas nonpermanen. Ananta *et al.* (2001) menemukan pola migrasi menurut kelompok umur berbeda untuk setiap kelompok umur. Terdapat puncak-puncak migrasi di kelompok umur lima tahunan, yaitu pada usia produktif dan usia pensiun. Selain itu, pengelompokkan ini dibuat untuk melihat pola dan perbedaan bermigrasi menurut kelompok umur terkait dengan potensi tenaga kerja produktif yang

melakukan mobilitas nonpermanen, khususnya mobilitas ulang-alik di tahun 2025.

Pada tahun 2020 hingga 2030 negara Indonesia akan dihadiahi Bonus Demografi, yaitu ketika jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Terkait hal tersebut, menurut Adioetomo (2001), di era bonus demografi terdapat peluang besar atau "*windows of opportunity*" di tahun 2025 dimana pada titik tersebut jumlah tenaga kerja akan mencapai puncaknya. Dengan melihat kecenderungan bermigrasi pada kelompok-kelompok umur produktif maka akan dapat dilacak dan dirancang bentuk kebijakan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menyongsong era tersebut.

Alasan lain dibuat pengelompokan umur karena selektivitas umur juga terjadi ketika ada mobilitas, khususnya mobilitas nonpermanen (Hugo, 2001). Kebanyakan pelaku mobilitas berumur antara 20 sampai awal 30 tahun. Setelah umur tersebut akan terjadi penurunan mobilitas, dan kembali meningkat pada usia pensiun. Tetapi selektivitas ini tidak harus selalu mengikuti aturan tersebut. Kadang pola mobilitas yang terjadi justru kebalikannya, dan bahkan tidak berpola sama sekali. Hal ini disebabkan karena ketika membahas tentang mobilitas maka yang akan diulas adalah perilaku dari subjek yang melakukan perpindahan tersebut. Padahal konsep perilaku bersifat sangat relatif, dengan kata lain sangat unik dan tidak dapat disamaratakan untuk semua orang.

Gambar 4.1 Pola Mobilitas Nonpermanen Menurut Kelompok Umur Pekerja, 2014



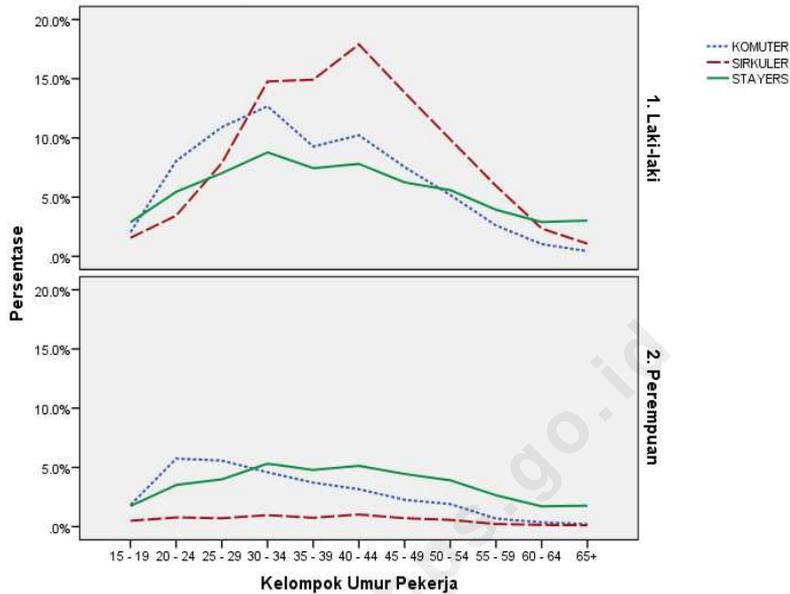
Saefullah (1996) mengungkapkan bahwa pada umumnya pelaku mobilitas nonpermanen terdiri dari kelompok umur potensial yang kebanyakan berumur antara 20 – 40 tahun. Bahkan pada waktu mulai melakukan mobilitas atau pergi dari daerahnya, mereka berumur rata-rata di bawah 30 tahun. Mereka masih idealis, penuh semangat dan memegang sangat besar peranannya dalam pembangunan. Ananta dan Wongkaren (1996) juga menyatakan bahwa secara agregat mobilitas penduduk dipengaruhi oleh struktur penduduk di suatu wilayah. Yang lebih muda mempunyai kecenderungan melakukan mobilitas lebih tinggi daripada mereka yang lebih tua. Didukung temuan Widaryatmo (2009) yang menemukan bahwa semakin tua

semakin kecil kecenderungan pekerja untuk melakukan mobilitas ulang-alik atau sirkuler ke tempat lain.

Untuk kejadian mobilitas sirkuler, Mantra (1986) dalam penelitiannya menemukan bahwa hampir 95 persen pekerja sirkuler berumur 15–44 tahun (44 persen berusia 15–24 tahun dan 50 persen berusia 25–44 tahun), dan sisanya berusia 45 tahun ke atas. Untuk kasus komuter, pelakunya adalah mereka yang lebih muda (Zo, Orasem, Otto, 2001). Sama seperti migrasi, kecenderungan komuter menurun mengikuti pola terbalik huruf U (Bottai dan Borsatti, 2006). Sedangkan BKLH (1985) mengungkapkan bahwa komuter pada umumnya berumur 25–34 tahun atau 35–44 tahun.

Sejalan dengan temuan-temuan sebelumnya, ternyata hasil olahan data yang tampak pada Gambar 4.1 menunjukkan hal yang serupa. Mobilitas nonpermanen lebih terjadi pada kelompok umur 20–49 tahun. Baik pekerja komuter ataupun pekerja sirkuler keduanya membentuk huruf U terbalik. Keduanya berpuncak pada kelompok umur 25–49 tahun. Perbedaannya adalah komuter terjadi lebih banyak pada usia muda sebaliknya sirkuler bergeser ke yang lebih tua. Yang menarik adalah kenyataan bahwa pada kelompok usia 15–19 tahun dan kelompok usia tua 55 tahun ke atas, proporsi mereka yang tidak melakukan mobilitas nonpermanen merupakan yang tertinggi. Semakin tua, semakin kecil kecenderungan pekerja melakukan mobilitas nonpermanen. Mereka lebih memilih bekerja di kabupaten/kota yang sama dengan tempat tinggal mereka.

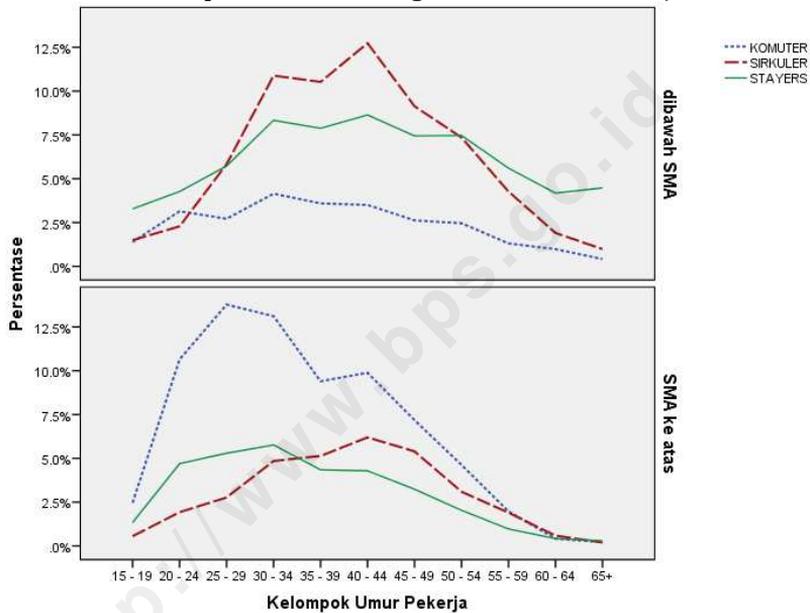
Gambar 4.2 Pola Mobilitas Nonpermanen Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Pekerja, 2014



Untuk melihat perbedaan pola mobilitas non permanen berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 4.2. Terlihat perbedaan pola antara pekerja laki-laki dan perempuan. Pola laki-laki mengikuti pola mobilitas nonpermanen secara umum. Ini menandakan adanya dominasi laki-laki sebagai pelaku mobilitas. Berbeda dengan pola pekerja perempuan, proporsi pekerja perempuan yang menjadi komuter terbesar pada usia 15-30 tahun. Perempuan cenderung menjadi *stayers*. Mungkin terkait dengan tugasnya sebagai ibu rumah tangga sehingga mereka masih bisa mengkombinasikan fungsi dan tugasnya dalam rumah tangga. Untuk mobilitas sirkuler, ternyata perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ini terkait dengan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang tidak begitu terikat dengan

aktifitas mengurus rumah tangga, sehingga memudahkan laki-laki melakukan mobilitas ke luar kabupaten/kota tempat tinggal dan secara rutin pulang ke rumah dalam waktu mingguan atau bulanan.

Gambar 4.3 Pola Mobilitas Nonpermanen Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Pendidikan Pekerja, 2014



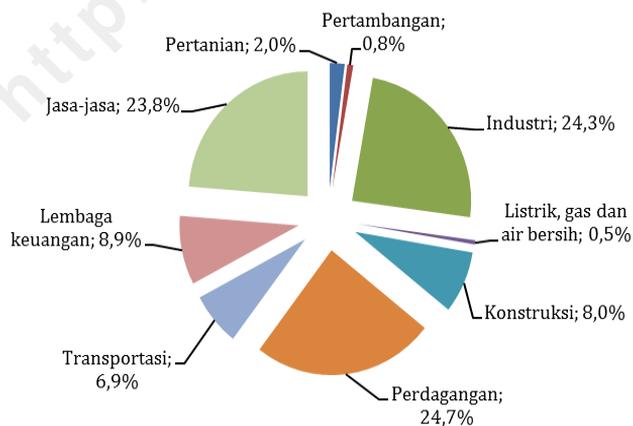
Bagaimanakah pola mobilitas nonpermanen menurut tingkat pendidikan para pekerja. Jelas terlihat pada Gambar 4.3 bahwa proporsi pelaku mobilitas ulang-alik paling tinggi adalah untuk mereka yang berpendidikan SMA ke atas. Sebaliknya untuk mobilitas sirkuler paling tinggi proporsinya adalah pekerja dengan pendidikan di bawah SMA. Jadi mereka yang berpendidikan tinggi lebih cenderung menjadi komuter. Terkait dengan *rate of return*, mereka akan meningkatkan utilitasnya mengejar penghasilan yang

lebih tinggi mendorong mereka bekerja keluar kabupaten/kota tempat tinggalnya.

4.2.2 Karakteristik Pekerja Komuter dan Sirkuler Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Teori menyebutkan bahwa mobilitas tenaga kerja dapat disebabkan karena adanya pemusatan ekonomi di suatu wilayah. Pemusatan ekonomi ini dapat berupa pembukaan wilayah untuk pembangunan pabrik dan sebagainya. Adanya aktivitas ekonomi ini kemudian membawa dampak pengganda pada kegiatan ekonomi lain yang berfungsi sebagai penopang dan penyerta. Hal ini kemudian menjadi faktor penarik orang yang tinggal di luar wilayah tersebut untuk bekerja di daerah sentra perekonomian. Hal lain yang turut terimbas adalah terjadinya perubahan fungsi pada wilayah-wilayah perbatasan.

Gambar 4.4 Distribusi Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Pekerja Komuter, 2014

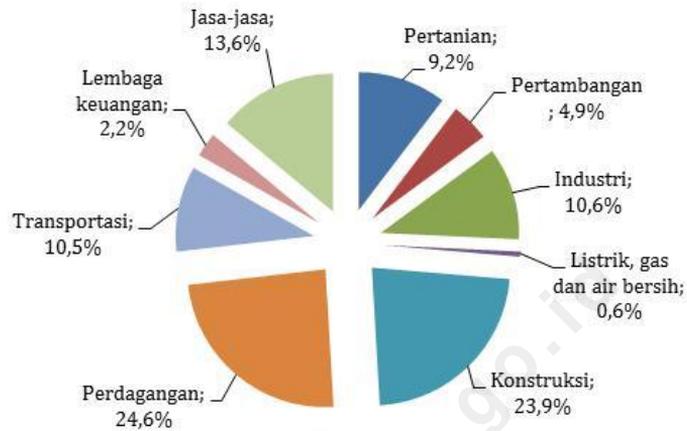


Lapangan pekerjaan utama merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dengan demikian akan ada sembilan sektor ekonomi besar tempat seluruh pekerja komuter dan sirkuler melakukan aktivitas ekonominya.

Lapangan pekerjaan utama penyerap komuter terbesar adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (24,7 persen), sektor industri (24,3 persen), dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan (23,8 persen). Apabila dibanding tahun 2012, persentase pekerja komuter di sektor industri menurun sebesar 1,1 persen. Sementara itu, persentase pekerja komuter pada sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan masing-masing meningkat sebesar 1,6 persen dan 0,5 persen.

Berbeda dengan pekerja komuter, lapangan pekerjaan utama penyerap sirkuler terbesar adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (24,6 persen), sektor konstruksi (23,9 persen), dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan (13,6 persen). Pola tersebut hampir sama dengan tahun 2012 bahwa penyerapan pekerja sirkuler di sektor konstruksi jauh lebih besar dibandingkan komuter. Hal ini menandakan bahwa sektor konstruksi merupakan sektor pilihan yang dicari oleh para pekerja sirkuler. Ketika menunggu musim panen, mereka sementara pindah ke kota untuk terlibat pada kegiatan konstruksi.

Gambar 4.5 Distribusi Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Pekerja Sirkuler, 2014



Tabel 4.5 memperlihatkan kualitas tenaga kerja di ketiga sektor penyerap pekerja komuter terbesar. Lebih dari separuh tenaga kerja yang menggeluti ketiga sektor tersebut merupakan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA ke atas. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2012, terjadi peningkatan yang signifikan pada persentase pekerja komuter yang berpendidikan SMA ke atas di ketiga sektor tersebut. Di antara ketiga sektor tersebut, peningkatan persentase pekerja komuter terbesar dibanding tahun 2012 diserap sektor industri, yaitu dari 62,2 persen menjadi 69,8 persen.

Tabel 4.5 Distribusi Persentase Pekerja Komuter menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Tiga Sektor Unggulan, 2014

Tingkat Pendidikan	Sektor unggulan penyerap tenaga kerja		
	Perdagangan	Industri	Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)
Di bawah SMA	30,4	30,2	12,5
Tidak sekolah	0,8	0,3	0,2
Tidak tamat SD	3,8	2,5	1,6
Tamat SD	11,4	10,2	4,2
Tamat SMP	14,4	17,3	6,5
SMA ke atas	69,6	69,8	87,5
Tamat SMA	53,1	55,8	34,3
Perguruan Tinggi	16,4	14,0	53,3
Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sementara itu, pada tiga sektor terbesar penyerap pekerja sirkuler, ternyata rata-rata persentase pekerja yang berpendidikan SMA ke atas masih di bawah lima puluh persen (lihat Tabel 4.6). Sebagian besar dari mereka hanyalah tenaga kerja dengan pendidikan tamatan SMP ke bawah. Bahkan di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi dan sektor konstruksi, lebih dari separuhnya adalah tamatan SD ke bawah. Di lain sisi, persentase pekerja sirkuler yang berpendidikan SMA ke atas di sektor perdagangan hanya mencapai 20,2 persen, sektor konstruksi 17,7 persen dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 43,8 persen.

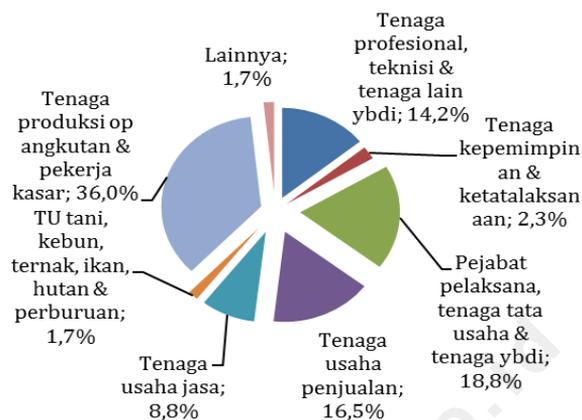
Tabel 4.6 Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Tiga Sektor Unggulan, 2014

Tingkat Pendidikan	Sektor unggulan penyerap tenaga kerja		
	Perdagangan	Kontruksi	Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)
Di bawah SMA	79,8	82,3	56,2
Tidak sekolah	1,6	1,2	1,1
Tidak tamat SD	12,3	12,9	8,8
Tamat SD	50,0	48,8	31,1
Tamat SMP	15,9	19,4	15,2
SMA ke atas	20,2	17,7	43,8
Tamat SMA	15,2	13,6	24,8
Perguruan Tinggi	5,0	4,1	19,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0

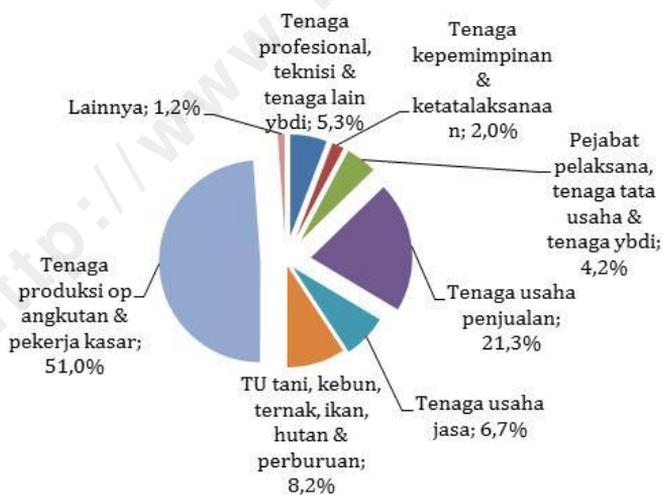
Menurut jenis pekerjaannya, Gambar 4.6 memperlihatkan bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh pekerja komuter adalah tenaga produksi, operator alat angkutan dan pekerja kasar (36,0 persen). Disusul kemudian oleh pejabat pelaksana, tenaga tata usaha, dan yang sejenis (18,8 persen), dan tenaga usaha penjualan (16,5 persen).

Pola yang hampir serupa terjadi pada distribusi persentase jenis pekerjaan utama pekerja sirkuler (lihat Gambar 4.7). Separuh pekerja sirkuler menggeluti profesi sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar. Selanjutnya sekitar 21,3 persen pekerja sirkuler sebagai tenaga usaha penjualan, dan sisanya bervariasi sebagai tenaga lain.

Gambar 4.6 Distribusi Persentase Jenis Pekerjaan Utama Pekerja Komuter, 2014



Gambar 4.7 Distribusi Persentase Jenis Pekerjaan Utama Pekerja Sirkuler, 2014



Pada tahun 2014, jika diamati lebih jauh tentang kualifikasi pekerja komuter yang berpendidikan SMA ke atas, terlihat bahwa sebagian besar pekerja komuter bekerja sebagai tenaga produksi, operator alat angkutan dan pekerja kasar. Selanjutnya pekerja komuter yang berprofesi sebagai pejabat pelaksana, tenaga tata usaha dan yang sejenis serta pekerja komuter yang berprofesi sebagai tenaga profesional, teknisi dan yang berkaitan. Hal ini berhubungan dengan persyaratan kualifikasi keahlian yang lebih tinggi bagi para tenaga kerja yang bekerja di kedua jenis pekerjaan tersebut.

Berbeda dengan pekerja komuter yang berpendidikan di bawah SMA, lebih dari separuh pekerja komuter bekerja sebagai tenaga produksi, angkutan dan pekerja kasar. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2012.

Tabel 4.7 Distribusi Persentase Pekerja Komuter menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2014

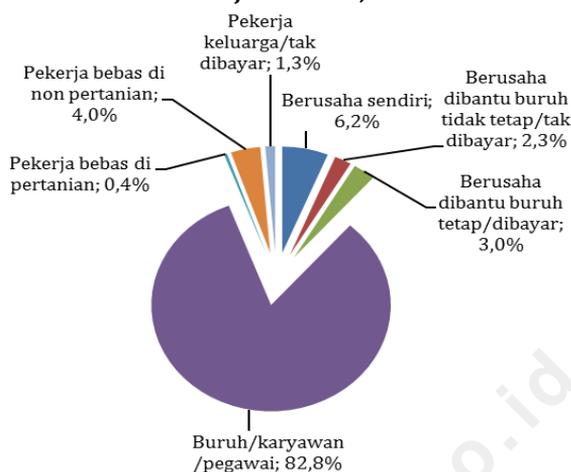
Jenis pekerjaan utama	Tingkat pendidikan yang ditamatkan	
	Di bawah SMA	SMA ke atas
(1)	(2)	(3)
Profesional, teknisi & ybdi	0,5	19,1
Kepemimpinan & ketatalaksanaan	0,4	3,0
Pejabat pelaksana, tata usaha & ybdi	2,6	24,6
Tenaga usaha penjualan	21,7	14,7
Tenaga usaha jasa	7,9	9,1
Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan & perburuan	4,6	0,6
Tenaga produksi, angkutan & pekerja kasar	62,1	26,7
Lainnya	0,2	2,2
Jumlah	100,0	100,0

Tabel 4.8 Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2014

Jenis pekerjaan utama	Tingkat pendidikan yang ditamatkan	
	Di bawah SMA	SMA ke atas
(1)	(2)	(3)
Profesional, teknisi & ybdi	0,4	16,7
Kepemimpinan & ketatalaksanaan	0,5	5,5
Pejabat pelaksana, tata usaha & ybdi	0,7	12,3
Tenaga usaha penjualan	25,0	12,9
Tenaga usaha jasa	5,6	9,2
Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan & perburuan	9,7	4,5
Tenaga produksi, angkutan & pekerja kasar	57,9	35,1
Lainnya	0,1	3,8
Jumlah	100,0	100,0

Pola hampir serupa juga terjadi pada pekerja sirkuler. Persentase pekerja sirkuler yang berpendidikan di bawah SMA dan bekerja sebagai tenaga pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perburuan dua kali lipat lebih besar dari pekerja komuter yang bekerja pada profesi yang sama. Sementara itu, pekerja sirkuler yang berpendidikan SMA ke atas ternyata juga didominasi oleh tenaga produksi, angkutan dan pekerja kasar. Sedangkan persentase pekerja sirkuler yang berprofesi sebagai pejabat pelaksana, tata usaha dan yang sejenis, jauh lebih rendah dibandingkan pekerja komuter.

Gambar 4.8 Distribusi Persentase Status Pekerjaan Utama Pekerja Komuter, 2014

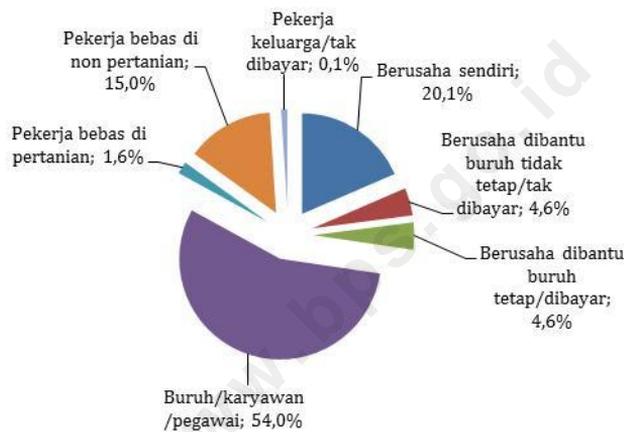


Selanjutnya jika dilihat dari status pekerjaan utama pekerja komuter, status sebagai buruh/karyawan/pegawai mendominasi para pekerja ini (lihat Gambar 4.8). Dapat dikatakan bahwa 8 dari 10 pekerja komuter (82,8 persen) merupakan buruh/karyawan/pegawai. Sisanya 6,2 persen berusaha sendiri, 5,3 persen berusaha dibantu buruh tetap atau buruh tidak tetap, 4,4 persen pekerja bebas, dan 1,3 persen pekerja keluarga/tak dibayar. Dari data di atas dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari pekerja komuter merupakan pekerja di sektor formal, baik yang berstatus buruh/karyawan/pegawai ataupun yang berusaha dengan dibantu buruh tetap. Terlepas dari bukti empiris tentang karakteristik khusus komuter, besarnya persentase komuter yang bekerja di sektor formal mengindikasikan secara tidak langsung bahwa tingkat pendidikan komuter relatif lebih tinggi.

Tingginya persentase pekerja komuter yang berstatus buruh/karyawan/pegawai dikarenakan buruh/karyawan/pegawai tidak mempunyai kuasa untuk memilih tempat bekerja. Mereka

harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau kantor tempat mereka bekerja. Sementara bagi mereka yang berstatus selain buruh/karyawan/pegawai lebih mempunyai kuasa untuk memilih tempat bekerjanya sehingga lebih banyak yang memilih bekerja dekat dengan tempat tinggalnya.

Gambar 4.9 Distribusi Persentase Status Pekerjaan Utama Pekerja Sirkuler, 2014



Sementara itu, Gambar 4.9 memperlihatkan dominasi proporsi pekerja sirkuler yang berstatus buruh/karyawan/pegawai (54,0 persen) yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pekerja komuter. Selain itu, pekerja sirkuler yang berstatus pekerja bebas dan berusaha sendiri memiliki proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan komuter. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pekerja sirkuler yang bekerja di sektor formal jauh lebih sedikit dibandingkan pekerja komuter. Hal tersebut tidak terlepas dari tingkat pendidikan pekerja sirkuler yang lebih rendah dari pekerja komuter.

Produktivitas pekerja yang melakukan mobilitas nonpermanen dapat diukur dari jumlah jam kerja per minggu.

Idealnya jam kerja normal yang dimiliki oleh seorang pekerja paling sedikit 35 jam per minggu, atau biasa dikenal dengan sebutan “bekerja dengan jam kerja normal”. Pengklasifikasian jam kerja per minggu menjadi di bawah 35 jam dan paling sedikit 35 jam per minggu juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penentuan penganggur terselubung, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal.

Tabel 4.9 Distribusi Persentase Pekerja Komuter menurut Status Pekerjaan Utama dan Jam Kerja/Minggu, 2014

Status pekerjaan utama	Jam kerja / minggu	
	< 35	≥ 35
(1)	(2)	(3)
Berusaha sendiri	21,5	78,5
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	23,1	76,9
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	14,3	85,7
Buruh/karyawan/pegawai	6,8	93,2
Pekerja bebas di pertanian	27,2	72,8
Pekerja bebas di nonpertanian	17,0	83,0
Pekerja tak dibayar	32,7	67,3
Jumlah	9,2	90,8

Dari Tabel 4.9 secara umum pekerja komuter telah bekerja dengan jam kerja normal, hanya sebagian kecil saja yang masih bekerja di bawah jam kerja normal yaitu sebesar 9,2 persen. Besarnya proporsi pekerja komuter yang bekerja sesuai jam kerja normal ini terjadi karena mayoritas pekerja komuter berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Idealnya buruh/karyawan/pegawai bekerja sesuai jam kerja normal, namun ternyata tidak semua pekerja komuter yang berstatus ini bekerja dengan jumlah jam kerja normal. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi, pertama adanya hambatan terkait transportasi menuju ke tempat kerja baik

itu disebabkan karena adanya kemacetan ataupun gangguan lainnya. Kedua, mental *shirk* yang dimiliki oleh sebagian kecil buruh/karyawan/pegawai secara sadar maupun tidak sadar berpotensi terhadap hal tersebut.

Pekerja bebas dan pekerja tak dibayar merupakan status pekerjaan komuter yang memiliki persentase terbesar pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal. Diduga tujuan bekerja dari kelompok ini hanyalah untuk membantu orang lain serta tidak menerima upah sehingga tidak ada ikatan khusus bagi mereka untuk menghabiskan waktu 35 jam per minggu di pasar kerja.

Tabel 4.10 Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler menurut Status Pekerjaan Utama dan Jam Kerja/Minggu, 2014

Status pekerjaan utama	Jam kerja / minggu	
	< 35	≥ 35
(1)	(2)	(3)
Berusaha sendiri	22,3	77,7
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	23,9	76,1
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	36,6	63,4
Buruh/karyawan/pegawai	12,7	87,3
Pekerja bebas di pertanian	7,8	92,2
Pekerja bebas di nonpertanian	9,4	90,6
Pekerja tak dibayar	0,0	100,0
Jumlah	15,6	84,4

Pada pekerja sirkuler, secara umum persentase yang bekerja dengan jam kerja normal masih lebih rendah dibandingkan pekerja komuter, yaitu hanya mencapai 84,4 persen. Terlihat bahwa persentase pekerja sirkuler yang berstatus buruh/karyawan/pegawai dengan jumlah jam kerja normal lebih rendah dibandingkan yang berstatus pekerja bebas.

Produktivitas sektoral pelaku mobilitas nonpermanen dapat diketahui dengan menggunakan tabel silang antara penggunaan jam kerja dengan sektor pekerjaan. Sebagian besar komuter yang bekerja di sektor ekonomi bekerja pada jam kerja normal. Komuter yang bekerja sesuai jam kerja normal paling banyak ditemui di sektor listrik, gas dan air bersih, sektor lembaga keuangan, sektor industri, sektor transportasi, sektor pertambangan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan. Sementara komuter yang bekerja tidak sesuai dengan jam kerja normal, atau bekerja di bawah jam kerja normal dominan ditemui di sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Kondisi ini menyiratkan bahwa komuter yang merupakan penganggur terselubung banyak ditemui di dua sektor ini.

Tabel 4.11 Distribusi Persentase Pekerja Komuter menurut Lapangan Usaha Utama dan Jam Kerja/Minggu, 2014

Lapangan pekerjaan utama (1)	Jam kerja / minggu	
	< 35 (2)	≥ 35 (3)
Pertanian	24,6	75,4
Pertambangan	8,9	91,1
Industri	4,8	95,2
Listrik, gas dan air bersih	4,4	95,6
Konstruksi	9,1	90,9
Perdagangan	9,1	90,9
Transportasi	7,8	92,2
Lembaga keuangan	4,4	95,6
Jasa-jasa	14,7	85,3
Jumlah	9,2	90,8

Tabel 4.12 Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jam Kerja/Minggu, 2014

Lapangan pekerjaan utama	Jam kerja / minggu	
	< 35	≥ 35
(1)	(2)	(3)
Pertanian	21,8	78,2
Pertambangan	15,1	84,9
Industri	11,4	88,6
Listrik, gas dan air bersih	0,7	99,3
Konstruksi	13,6	86,4
Perdagangan	18,4	81,6
Transportasi	14,2	85,8
Lembaga keuangan	12,7	87,3
Jasa-jasa	15,9	84,1
Jumlah	15,6	84,4

Pola serupa juga berlaku pada pekerja sirkuler. Sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor industri menduduki posisi tertinggi penggunaan jam kerja normal dan sektor pertanian menduduki peringkat terendah penggunaan jam kerja normal. Jika dibandingkan dengan pekerja komuter terbukti bahwa pekerja sirkuler kalah produktif dengan pekerja komuter hampir di semua lapangan pekerjaan.

Tingkat pendidikan merupakan hal yang telah diketahui sebagai faktor penentu sektor pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diduduki seseorang maka akan semakin nyaman pula pekerjaan yang dimiliki. Mincer (1974) dalam tulisannya yang membahas tentang tingkat pengembalian dari sekolah terhadap pendapatan menegaskan bahwa adanya perbedaan tingkat pendidikan di antara para pekerja merupakan faktor yang paling

berpotensi dalam membedakan pekerjaan dan penghasilan yang diterima, di luar pengaruh umur dan pengalaman.

Kondisi tersebut dibuktikan oleh para pekerja yang melakukan mobilitas ulang alik pada Tabel 4.13, terlihat bahwa hampir seluruh pekerja yang berpendidikan tamat SMA ke atas terserap sebagai pekerja formal. Hal ini juga telah dijelaskan sebelumnya oleh Ehrenberg dan Smith (2006) bahwa meskipun keputusan untuk bersekolah ke level yang lebih tinggi memerlukan waktu dan biaya moneter maupun psikis yang lebih banyak, namun manfaat yang diperoleh juga akan lebih berlimpah, antara lain adanya kepastian untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak yang ditandai dengan tingkat upah yang lebih baik, adanya jaminan sosial, kondisi dan lingkungan kerja yang lebih nyaman serta adanya manfaat eksternal dalam bentuk pengakuan dari lingkungan sekitar.

Tabel 4.13 Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Sektor Pekerjaan, 2014

Tingkat Pendidikan	Sektor pekerjaan	
	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
Di bawah SMA		
Tidak sekolah	41,1	58,9
Tidak tamat SD	50,3	49,7
Tamat SD	62,7	37,3
Tamat SMP	78,7	21,3
SMA ke atas		
Tamat SMA	93,4	6,6
Perguruan Tinggi	98,2	1,8
Jumlah	88,2	11,8

Kondisi yang berbeda dialami oleh pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Ketika tidak bisa menembus pasar kerja sektor formal karena tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat kualifikasi minimal, mereka yang berpendidikan seperti ini terdorong untuk menggeluti pekerjaan informal. Pada akhirnya, selain tidak adanya jaminan sosial yang dimiliki, tingkat kesejahteraan mereka akan relatif lebih rendah.

Tabel 4.14 Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Sektor Pekerjaan, 2014

Tingkat Pendidikan	Sektor pekerjaan	
	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
Di bawah SMA		
Tidak sekolah	45,9	54,1
Tidak tamat SD	46,2	53,8
Tamat SD	45,2	54,8
Tamat SMP	65,3	34,7
SMA ke atas		
Tamat SMA	83,4	16,6
Perguruan Tinggi	96,9	3,1
Jumlah	61,7	38,3

Secara umum, sebagian besar komuter (88,2 persen) merupakan pekerja sektor upahan atau biasa disebut pekerja sektor formal. Ketika dirinci menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, terdapat pola yang menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan komuter semakin besar pula kecenderungan mereka masuk dalam pekerjaan formal. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin besar kemungkinan mereka terjun ke dalam pekerjaan informal.

Tabel 4.15 Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Lapangan Usaha Utama dan Sektor Pekerjaan, 2014

Lapangan usaha utama	Sektor pekerjaan	
	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
Pertanian	44,6	55,4
Pertambangan	94,7	5,3
Industri	97,8	2,2
Listrik, gas dan air bersih	100,0	0
Konstruksi	65,1	34,9
Perdagangan	79,9	20,1
Transportasi	82,3	17,7
Lembaga keuangan	99,0	1,0
Jasa-jasa	95,7	4,3
Jumlah	88,2	11,8

Hal serupa juga berlaku untuk pekerja sirkuler. Yang membedakannya dengan pekerja komuter adalah persentase pekerja sirkuler yang bekerja di sektor formal jauh lebih rendah dibandingkan pekerja komuter. Berdasarkan Tabel 4.14, pekerja sirkuler yang merupakan pekerja formal hanya mencapai 61,7 persen dan sisanya adalah pekerja informal. Dari sini dapat dikatakan bahwa kesejahteraan pekerja komuter lebih baik dibandingkan pekerja sirkuler.

Jika dikaitkan dengan lapangan usaha yang digeluti oleh para pekerja komuter maka jelas terlihat bahwa penyerapan terbesar pada sektor informal ada di sektor tradisional (pertanian) yang tidak mensyaratkan keahlian khusus. Sektor konstruksi yang membutuhkan tenaga kuli kasar, sektor perdagangan khususnya perdagangan eceran dan sektor transportasi juga tidak membutuhkan kualifikasi keahlian tertentu. Dengan demikian

pekerja yang bergelut pada sektor tersebut merupakan pekerja sektor informal. Di lain sisi, pekerja komuter yang terserap pada sektor formal paling banyak ditemui di sektor listrik, gas dan air bersih, sektor lembaga keuangan, sektor industri, sektor jasa-jasa, dan sektor pertambangan.

Pada kasus pekerja sirkuler, yaitu hampir seluruh pekerja pada sektor listrik, gas, dan air bersih, lembaga keuangan, dan industri terserap pada sektor formal. Bahkan pekerja sirkuler di sektor listrik, gas dan air bersih seluruhnya terserap pada sektor formal. Sementara itu, penyerapan pekerja sirkuler terbesar pada sektor informal adalah pada sektor perdagangan, konstruksi dan pertanian.

Tabel 4.16 Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Lapangan Usaha Utama dan Sektor Pekerjaan, 2014

Lapangan usaha utama	Sektor pekerjaan	
	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
Pertanian	50,0	50,0
Pertambangan	88,1	11,9
Industri	92,9	7,1
Listrik, gas dan air bersih	100,0	0
Konstruksi	46,7	53,3
Perdagangan	45,3	54,7
Transportasi	73,8	26,2
Lembaga keuangan	96,7	3,3
Jasa-jasa	75,5	24,5
Jumlah	61,7	38,3

Ditinjau dari jenis pekerjaan, sebagian besar pekerja komuter berstatus sebagai pekerja formal hampir di seluruh jenis pekerjaan. Sementara itu, persentase tertinggi pekerja komuter yang berstatus sebagai pekerja informal adalah pekerja yang menekuni usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perburuan.

Tabel 4.17 Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Sektor Pekerjaan, 2014

Jenis pekerjaan utama	Sektor pekerjaan	
	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
Profesional, teknisi & ybdi	99,9	0,1
Kepemimpinan & ketatalaksanaan	100,0	0,0
Pejabat pelaksana, tata usaha & ybdi	100,0	0,0
Tenaga usaha penjualan	70,7	29,3
Tenaga usaha jasa	92,9	7,1
Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan & perburuan	35,9	64,1
Tenaga produksi, angkutan & pekerja kasar	85,5	14,5
Lainnya	100,0	0,0
Jumlah	88,2	11,8

Sama halnya dengan pekerja komuter, sebagian besar pekerja sirkuler juga berstatus sebagai pekerja formal hampir di seluruh jenis pekerjaan. Bahkan untuk pekerja sirkuler yang bekerja sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan, ketatalaksanaan pejabat pelaksana, dan tata usaha, seluruhnya berstatus sebagai pekerja formal.

Tabel 4.18 Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Sektor Pekerjaan, 2014

Jenis pekerjaan utama	Sektor pekerjaan	
	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
Profesional, teknisi & ybdi	100,0	0,0
Kepemimpinan & ketatalaksanaan	100,0	0,0
Pejabat pelaksana, tata usaha & ybdi	100,0	0,0
Tenaga usaha penjualan	38,9	61,1
Tenaga usaha jasa	73,6	26,4
Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan & perburuan	44,2	55,8
Tenaga produksi, angkutan & pekerja kasar	63,0	37,0
Lainnya	100,0	0,0
Jumlah	61,7	38,3

4.2.3 Karakteristik Pekerja Komuter Ditinjau dari Aspek Aksesibilitas

Mobilitas yang dilakukan oleh pekerja tidak semata-mata ditentukan oleh kemauan mereka sendiri, melainkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tersebut (Hugo, 2001). Hubungan antara peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana di satu sisi dengan peningkatan sosial ekonomi di sisi lain melahirkan dua konsekuensi logis. Di satu sisi perjalanan pribadi akan semakin mudah dan relatif murah sehingga sangat memungkinkan bagi individu untuk menjangkau ke berbagai tempat untuk bekerja. Proses ini kemudian diperkuat dengan adanya penetrasi media oleh media massa yang menayangkan iklan lowongan pekerjaan yang memungkinkan untuk bekerja di luar wilayah tempat tinggal. Terkait dengan ini, penelitian telah membuktikan bahwa yang cenderung melakukan

ulang-alik adalah mereka yang waktu tempuh tidak lama dan tersedia sarana transportasi yang mudah.

Tabel 4.19 Distribusi Persentase Waktu Tempuh Pekerja Komuter Menurut Jenis Transportasi yang Digunakan, 2014

Waktu Tempuh	Jenis Transportasi				Jumlah
	Umum	Bersama	Pribadi	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
≤ 30 menit	23,4	17,7	29,4	77,7	28,3
30 – 60 menit	39,8	49,0	47,9	14,2	46,4
61 – 120 menit	29,2	28,0	19,7	1,7	21,4
> 120 menit	7,6	5,2	3,0	6,4	3,9
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sepuluh lebih pekerja komuter membutuhkan waktu satu jam menuju tempat kerja. Sebagian kecil lainnya memakan waktu di atas dua jam.

Pekerja komuter yang tidak menggunakan angkutan sama sekali atau dapat dikatakan hanya berjalan kaki menuju tempat kerjanya membutuhkan kurang dari tiga puluh menit. Wajar saja karena tempat kerja dan tempat tinggalnya berbatasan langsung dan jaraknya tidak jauh.

Sementara itu pola yang serupa berlaku untuk jenis transportasi umum, bersama dan kendaraan pribadi. Sepuluh lebih pekerja komuter menghabiskan waktu sekitar satu jam menuju tempat kerjanya. Dan sebagian kecil lainnya memerlukan waktu di atas dua jam.

4.3 Mobilitas Nonpermanen menurut Provinsi

4.3.1 Distribusi *Stayers* dan *Movers* menurut Provinsi

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa pekerja di Indonesia lebih banyak bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi tempat tinggalnya yaitu dalam satu kabupaten/kota (*stayers*). Tercatat

bahwa pada tahun 2014 sebanyak 91,9 persen pekerja merupakan *stayers*, sisanya 8,1 persen merupakan pelaku mobilitas nonpermanen (*movers*).

Berdasarkan distribusi *stayers* dan *movers* menurut provinsi, dapat dilihat bahwa ada enam provinsi dengan persentase *stayers* berada di bawah angka nasional yaitu DKI Jakarta (75,6 %), Banten (80,3 %), DI Yogyakarta (85,1 %), Jawa Barat (87,1 %), Bali (90,0 %), dan Jawa Tengah (91,4 %). Hal ini berarti persentase *movers* di enam provinsi tersebut berada di atas angka nasional. Kondisi tersebut terjadi karena kota-kota besar di Indonesia terdapat di provinsi-provinsi tersebut, sehingga terdapat sarana prasarana yang cukup baik yang mendukung para pekerja untuk melakukan mobilitas baik secara harian, mingguan, maupun bulanan.

Tabel 4.20 juga menunjukkan bahwa persentase pekerja komuter lebih banyak dibandingkan dengan pekerja sirkuler (6,1 % untuk pekerja komuter dan 2,0 % untuk pekerja sirkuler). Sebanyak 24 provinsi memiliki pola yang sama dengan pola nasional, yaitu persentase pekerja komuternya lebih besar jika dibandingkan dengan persentase pekerja sirkuler. Provinsi-provinsi yang persentase pekerja komuternya lebih besar dari pekerja sirkuler umumnya didominasi oleh provinsi-provinsi di kawasan barat Indonesia. Sebaliknya provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia, persentase pekerja sirkulernya lebih besar dari pekerja komuter.

Tabel 4.20. Distribusi Persentase *Stayers* dan *Movers* menurut Provinsi, 2014

Provinsi	<i>Stayers</i>	<i>Movers</i>		Jumlah
		Komuter	Sirkuler	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	96,5	3,1	0,4	100,0
Sumatera Utara	94,9	4,3	0,8	100,0
Sumatera Barat	95,0	3,8	1,2	100,0
Riau	97,6	1,4	1,0	100,0
Jambi	96,9	2,1	1,0	100,0
Sumatera Selatan	97,3	1,8	0,9	100,0
Bengkulu	97,2	1,3	1,5	100,0
Lampung	95,8	2,7	1,5	100,0
Bangka Belitung	96,5	2,8	0,7	100,0
Kepulauan Riau	98,3	0,9	0,8	100,0
DKI Jakarta	75,6	23,8	0,6	100,0
Jawa Barat	87,1	9,0	3,9	100,0
Jawa Tengah	91,4	5,0	3,6	100,0
DI Yogyakarta	85,1	13,7	1,2	100,0
Jawa Timur	94,3	4,5	1,2	100,0
Banten	80,3	16,9	2,8	100,0
Bali	90,0	9,5	0,5	100,0
Nusa Tenggara Barat	97,1	2,2	0,7	100,0
Nusa Tenggara Timur	99,2	0,4	0,4	100,0
Kalimantan Barat	96,6	2,5	0,9	100,0
Kalimantan Tengah	98,8	0,3	0,9	100,0
Kalimantan Selatan	94,4	4,2	1,4	100,0
Kalimantan Timur	97,3	0,9	1,8	100,0
Sulawesi Utara	94,6	3,8	1,6	100,0
Sulawesi Tengah	97,1	2,2	0,7	100,0
Sulawesi Selatan	95,6	3,2	1,2	100,0
Sulawesi Tenggara	96,8	1,4	1,8	100,0
Gorontalo	94,0	5,3	1,7	100,0
Sulawesi Barat	98,8	0,3	0,9	100,0
Maluku	98,4	0,8	0,8	100,0
Maluku Utara	98,3	0,9	0,8	100,0
Papua Barat	97,0	1,3	1,7	100,0
Papua	98,6	0,2	0,2	100,0
Indonesia	91,9	6,1	2,0	100,0

Banyaknya jumlah komuter di suatu daerah menandakan adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik sehingga memudahkan mereka melakukan perjalanan ulang alik. Sebaliknya, sulitnya kondisi geografis dan akses yang menghubungkan dua wilayah di suatu provinsi sebagai dampak dari kondisi alam dan sangat luasnya suatu wilayah akan menyulitkan pekerja untuk dapat melakukan mobilitas ulang alik. Contohnya, sebagian besar kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua yang menggunakan jalur laut atau udara sebagai akses perjalanan untuk ke wilayah lainnya. Kemudian kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat yang membutuhkan waktu sangat lama untuk menempuh wilayah lain, walaupun perjalanan di tempuh dengan transportasi darat, dikarenakan wilayahnya sangat luas. Hal itulah yang mengakibatkan di daerah-daerah tersebut persentase pekerja sirkuler lebih besar dibandingkan pekerja komuternya, karena tidak memungkinkan para pekerja untuk melakukan mobilitas ulang alik.

4.3.2 Karakteristik Pekerja Komuter menurut Provinsi

Para pekerja komuter secara administratif tidak terdaftar sebagai penduduk di wilayah tempat kerja, sehingga hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk di tempat tinggalnya. Namun keberadaannya pada pagi dan siang hari di tempat kerja mempengaruhi kepadatan kota tempat tujuan bekerjanya. Jika keadaan ini tidak didukung oleh sarana dan prasarana transportasi yang baik, maka kemacetan dan kepadatan jalan akan semakin parah. Selain itu, mereka juga menggunakan fasilitas kota yang menimbulkan beban dan permasalahan bagi kota yang akan membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan sosial budaya dari penduduk di kota dan sekitarnya (Kantor Menteri

Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 1986). Apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat, pekerja komuter ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Terkait dengan hal tersebut maka informasi tentang karakteristik komuter yang dirinci menurut provinsi akan sangat bermanfaat khususnya bagi para pengambil kebijakan kependudukan dan pembangunan.

Penyumbang komuter terbesar di Indonesia adalah provinsi-provinsi di pulau Jawa yang mencapai angka 81,1 persen. Hal ini wajar karena memang kota-kota besar di Indonesia kebanyakan berada di Pulau Jawa. Pada tingkat provinsi, Jawa Barat adalah provinsi dengan persentase pekerja komuter yang paling besar yaitu sebesar 25 persen. Provinsi DKI Jakarta berada di urutan berikutnya yakni 15,9 persen. Selanjutnya diikuti oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan DI Yogyakarta. Sementara untuk Provinsi Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Selatan dan Lampung merupakan provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa dengan persentase pekerja komuter yang cukup besar.

Untuk analisis lebih lanjut, maka hanya dipilih sepuluh provinsi dengan persentase pekerja komuter terbesar. Kesepuluh provinsi tersebut yaitu enam provinsi dari Pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten) dan empat provinsi lain dari luar Pulau Jawa (Sumatera Utara, Lampung, Bali, dan Sulawesi Selatan).

Tabel 4.21. Distribusi Persentase Pekerja Komuter menurut Provinsi di Indonesia, 2014

Provinsi	Pekerja Komuter
(1)	(2)
Aceh	0,9
Sumatera Utara	3,6
Sumatera Barat	1,2
Riau	0,5
Jambi	0,4
Sumatera Selatan	1,0
Bengkulu	0,2
Lampung	1,4
Bangka Belitung	0,2
Kepulauan Riau	0,1
DKI Jakarta	15,9
Jawa Barat	25,0
Jawa Tengah	12,0
DI Yogyakarta	3,9
Jawa Timur	12,5
Banten	11,8
Bali	3,1
Nusa Tenggara Barat	0,7
Nusa Tenggara Timur	0,1
Kalimantan Barat	0,8
Kalimantan Tengah	0,1
Kalimantan Selatan	1,1
Kalimantan Timur	0,2
Sulawesi Utara	0,5
Sulawesi Tengah	0,4
Sulawesi Selatan	1,6
Sulawesi Tenggara	0,2
Gorontalo	0,4
Sulawesi Barat	0,0
Maluku	0,1
Maluku Utara	0,1
Papua Barat	0,1
Papua	0,0
Indonesia	100,0

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, semua provinsi terpilih memiliki persentase pekerja komuter dengan tingkat pendidikan SMA ke atas jauh lebih besar daripada yang berpendidikan di bawah SMA. Pola yang sama juga terjadi di sepuluh provinsi terpilih pada tahun 2012. Perbandingan antara pekerja komuter yang berpendidikan SMA ke atas dengan yang berpendidikan di bawah SMA di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali adalah sekitar 4 banding 1. Untuk provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan adalah sekitar 2 banding 1, sementara di provinsi lainnya yakni Jawa Tengah dan Lampung perbandingannya hampir sama. Dengan demikian secara umum, pekerja komuter memang didominasi oleh pekerja yang berpendidikan cukup tinggi.

Tabel 4.22. Distribusi Persentase Pekerja Komuter menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan pada Provinsi Terpilih, 2014

Provinsi	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	
	Di bawah SMA	SMA ke Atas
(1)	(2)	(3)
DKI Jakarta	13,4	86,6
Jawa Barat	21,0	79,0
Jawa Tengah	45,7	54,3
DI Yogyakarta	24,7	75,3
Jawa Timur	30,2	69,8
Banten	22,9	77,1
Sumatera Utara	34,3	65,7
Lampung	45,1	54,9
Bali	20,2	79,8
Sulawesi Selatan	35,2	64,8

Tabel 4.23. Distribusi Persentase Pekerja Komuter menurut Sektor Pekerjaan pada Provinsi Terpilih, 2014

Provinsi	Sektor Pekerjaan	
	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
DKI Jakarta	95,3	4,7
Jawa Barat	92,6	7,4
Jawa Tengah	79,5	20,5
DI Yogyakarta	85,4	14,6
Jawa Timur	83,9	16,1
Banten	94,6	5,4
Sumatera Utara	89,5	10,5
Lampung	69,3	30,7
Bali	85,3	14,7
Sulawesi Selatan	81,0	19,0

Jika dikaitkan antara pendidikan dan sektor pekerjaan, terlihat bahwa mereka yang melakukan mobilitas ulang alik adalah yang berpendidikan tinggi dan bekerja di sektor formal. Seperti diuraikan sebelumnya, kualifikasi pendidikan menjadi syarat bagi tenaga kerja untuk dapat masuk ke dalam pekerjaan sektor formal. Akhirnya yang dapat masuk ke sektor formal adalah mereka yang berpendidikan cukup tinggi. Sebagian besar pekerja komuter di sepuluh provinsi terpilih bekerja pada sektor formal. Bahkan di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat persentasenya mencapai di atas 90 persen.

Tabel 4.24 menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja komuter di sepuluh provinsi terpilih bekerja di sektor jasa-jasa, kemudian diikuti dengan sektor manufaktur dan hanya sedikit dari mereka yang bekerja di sektor pertanian. Namun ada hal yang cukup menarik disini yaitu mengenai persentase pekerja komuter yang bekerja di sektor pertanian di Provinsi Lampung cukup besar bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Hal ini

merupakan topik yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut, sehingga dapat diketahui alasan pekerja komuter yang cukup banyak bekerja pada lahan pertanian di luar kabupaten/kota tempat tinggalnya di Provinsi Lampung.

Tabel 4.24. Distribusi Persentase Pekerja Komuter menurut Lapangan Usaha Utama Pada Provinsi Terpilih, 2014

Provinsi	Lapangan Usaha Utama		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa
(1)	(2)	(3)	(4)
DKI Jakarta	0,2	23,7	76,0
Jawa Barat	0,5	37,6	61,9
Jawa Tengah	1,9	44,5	53,7
DI Yogyakarta	1,8	20,7	77,5
Jawa Timur	2,3	40,2	57,5
Banten	0,9	40,0	59,1
Sumatera Utara	4,8	40,1	55,1
Lampung	22,8	23,6	53,6
Bali	0,6	19,5	79,9
Sulawesi Selatan	3,0	22,2	74,7

Tabel 4.25 menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja komuter membutuhkan waktu tempuh kurang dari dua jam untuk mencapai tempat kerjanya. Hal ini merupakan suatu yang wajar karena apabila perjalanan menuju tempat kerja membutuhkan waktu tempuh yang lama, tentunya mereka akan lebih memilih untuk melakukan sirkuler daripada perjalanan ulang alik.

Apabila dikategorikan menurut waktu tempuhnya, sebagian besar pekerja komuter di provinsi-provinsi terpilih memiliki waktu tempuh antara tiga puluh menit sampai satu jam, kecuali di Jawa Tengah dan Lampung dimana lebih banyak yang memiliki waktu tempuh kurang dari setengah jam. Kondisi Jawa Tengah ini hampir sama dengan tahun 2012, sedangkan kondisi di

Lampung berbeda bila dibandingkan tahun 2012 dimana sebagian besar pekerja komuter memiliki waktu tempuh antara tiga puluh menit sampai satu jam.

Tabel 4.25. Distribusi Persentase Pekerja Komuter menurut Waktu Tempuh pada Provinsi Terpilih, 2014

Provinsi	Waktu Tempuh (menit)			
	≤30	31-60	61-120	> 120
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DKI Jakarta	15,6	52,0	28,7	3,7
Jawa Barat	18,6	44,2	32,7	4,5
Jawa Tengah	47,8	41,3	9,4	1,5
DI Yogyakarta	46,0	47,2	5,1	1,7
Jawa Timur	31,3	47,3	17,9	3,5
Banten	18,6	48,4	27,0	6,0
Sumatera Utara	33,7	58,6	6,0	1,7
Lampung	40,8	36,5	15,9	6,8
Bali	43,0	49,8	6,3	0,9
Sulawesi Selatan	27,4	60,0	10,6	2,0

Untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, persentase pekerja komuter yang memiliki waktu tempuh antara satu hingga dua jam ternyata cukup besar yaitu diatas 27 persen. Padahal di provinsi-provinsi lainnya persentasenya dibawah 18 persen. Hal ini terjadi karena tingkat kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi di ketiga provinsi tersebut, sehingga lebih banyak membutuhkan waktu di jalan. Hal ini juga menandakan bahwa pekerja komuter di tiga provinsi tersebut membutuhkan perjuangan yang lebih berat untuk mencapai tempat kerjanya.

Tabel 4.26. Distribusi Persentase Pekerja Komuter menurut Jenis Transportasi pada Provinsi Terpilih, 2014

Provinsi	Jenis Transportasi			
	Umum	Bersama	Pribadi	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DKI Jakarta	21,1	2,6	75,0	1,3
Jawa Barat	24,0	5,6	69,5	0,9
Jawa Tengah	10,4	3,6	85,0	1,0
DI Yogyakarta	2,2	3,3	94,0	0,4
Jawa Timur	7,3	2,2	90,1	0,4
Banten	18,0	6,2	74,8	1,0
Sumatera Utara	17,9	6,4	75,1	0,5
Lampung	13,2	13,3	73,0	0,6
Bali	2,0	2,5	95,5	0,1
Sulawesi Selatan	9,0	5,5	85,1	0,4

Tabel 4.26 menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja komuter memilih untuk menggunakan alat transportasi pribadi dalam melakukan perjalanan ulang alik. Keadaan pekerja komuter yang paling mencolok adalah di Provinsi DI Yogyakarta dan Bali dimana hampir seluruhnya menggunakan jenis transportasi pribadi yaitu masing-masing sebanyak 94,0 persen dan 95,5 persen. Dengan menggunakan alat transportasi pribadi, pekerja komuter akan lebih fleksibel dalam menentukan waktu keberangkatan dan rute perjalanan yang akan ditempuh.

Pemilihan jenis transportasi yang digunakan juga dapat dijadikan sebagai pendekatan terhadap tingkat kesejahteraan pekerja. Semakin banyak pekerja yang menggunakan jenis transportasi pribadi mengindikasikan adanya mobilitas sosial yakni peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Selain menggunakan alat transportasi pribadi, alat transportasi umum juga cukup banyak dipilih oleh pekerja komuter untuk mencapai tempat kerjanya. Besarnya persentase pekerja komuter yang menggunakan alat transportasi umum

menggambarkan ketersediaan dan kelayakan fasilitas transportasi publik di wilayah tersebut. Contohnya di Provinsi DKI Jakarta yang telah tersedia berbagai macam fasilitas transportasi publik seperti kereta rel listrik (KRL), bus, mikrolet, bajaj, dan taxi. Walaupun begitu, pekerja komuter di Provinsi DKI Jakarta ternyata tetap lebih banyak yang memilih menggunakan alat transportasi pribadi daripada transportasi umum. Oleh karena itu, perlu dikaji lagi mengenai kelayakan dan kenyamanan fasilitas transportasi umum, khususnya di DKI Jakarta.

4.3.3 Karakteristik Pekerja Sirkuler menurut Provinsi

Tiga provinsi penyumbang pekerja sirkuler terbanyak di Indonesia berada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebanyak 33,1 persen pekerja sirkuler berada di Jawa Barat, 26,9 persen di Jawa Tengah, 10,5 persen di Jawa Timur, dan sisanya tersebar di provinsi-provinsi lainnya. Pada tahun sebelumnya memiliki pola yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2014.

Apabila dilihat menurut pulau-pulau besar di Indonesia maka pekerja sirkuler terbanyak di Pulau Sumatera adalah di Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Pekerja sirkuler terbanyak di Pulau Jawa berturut-turut adalah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang sekaligus merupakan tiga provinsi penyumbang pekerja sirkuler terbesar di Indonesia. Kemudian pekerja sirkuler terbanyak di Pulau Kalimantan adalah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Pekerja sirkuler terbanyak di Pulau Sulawesi adalah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, persentase pekerja sirkuler di kawasan timur Indonesia (Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua) berkisar antara 0,2 sampai 0,3 persen.

Tabel 4.27. Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler menurut Provinsi di Indonesia, 2014

Provinsi	Pekerja Sirkuler
(1)	(2)
Aceh	0,4
Sumatera Utara	2,1
Sumatera Barat	1,1
Riau	1,1
Jambi	0,6
Sumatera Selatan	1,4
Bengkulu	0,6
Lampung	2,4
Bangka Belitung	0,2
Kepulauan Riau	0,3
DKI Jakarta	1,3
Jawa Barat	33,1
Jawa Tengah	26,9
DI Yogyakarta	1,0
Jawa Timur	10,5
Banten	6,2
Bali	0,5
Nusa Tenggara Barat	0,6
Nusa Tenggara Timur	0,4
Kalimantan Barat	0,9
Kalimantan Tengah	0,4
Kalimantan Selatan	1,2
Kalimantan Timur	1,3
Sulawesi Utara	0,7
Sulawesi Tengah	0,4
Sulawesi Selatan	1,9
Sulawesi Tenggara	0,8
Gorontalo	0,4
Sulawesi Barat	0,2
Maluku	0,2
Maluku Utara	0,2
Papua Barat	0,3
Papua	0,2
Indonesia	100,0

Selanjutnya, pembahasan mengenai pekerja sirkuler akan dibatasi pada provinsi-provinsi dengan persentase pekerja sirkuler terbanyak di pulau-pulau besar di Indonesia yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Tabel 4.28. Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan pada Provinsi Terpilih, 2014

Provinsi	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	
	Di bawah SMA	SMA ke Atas
(1)	(2)	(3)
Sumatera Utara	49,9	50,1
Sumatera Selatan	46,5	53,5
Lampung	56,7	43,3
DKI Jakarta	33,4	66,6
Jawa Barat	77,6	23,4
Jawa Tengah	81,8	18,2
Jawa Timur	61,4	38,6
Banten	69,9	30,1
Kalimantan Timur	35,0	65,0
Sulawesi Selatan	59,4	40,6

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, hampir semua provinsi terpilih memiliki persentase pekerja sirkuler dengan pendidikan di bawah SMA lebih besar daripada yang berpendidikan SMA ke atas kecuali Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur. Pada umumnya pekerja yang berpendidikan tinggi lebih banyak yang terserap di sektor formal. Walaupun begitu, pekerja sirkuler yang berstatus sebagai pekerja formal tetap jauh lebih banyak daripada yang berstatus sebagai pekerja informal sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 4.29.

Tabel 4.29. Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler menurut Sektor Pekerjaan pada Provinsi Terpilih, 2014

Provinsi	Sektor Pekerjaan	
	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
Sumatera Utara	81,5	18,5
Sumatera Selatan	79,0	21,0
Lampung	54,5	45,5
DKI Jakarta	90,1	9,9
Jawa Barat	52,5	47,5
Jawa Tengah	55,2	44,8
Jawa Timur	71,2	28,8
Banten	80,9	19,1
Kalimantan Timur	87,1	18,8
Sulawesi Selatan	61,1	38,9

Tabel 4.30. Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler menurut Lapangan Usaha Utama pada Provinsi Terpilih, 2014

Provinsi	Lapangan Usaha Utama		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatera Utara	28,8	31,7	39,5
Sumatera Selatan	21,7	40,2	38,1
Lampung	35,0	25,3	39,7
DKI Jakarta	3,5	42,5	54,0
Jawa Barat	2,5	35,9	61,6
Jawa Tengah	7,4	46,6	46,0
Jawa Timur	7,2	47,3	45,5
Banten	0,5	34,7	64,8
Kalimantan Timur	21,6	52,3	26,1
Sulawesi Selatan	32,3	22,5	45,2

Berdasarkan distribusi persentase pekerja sirkuler menurut lapangan usaha utama pada provinsi terpilih, dapat

dilihat bahwa Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menunjukkan pola distribusi yang sama, yaitu persentase pekerja sirkuler yang terbanyak adalah yang bekerja di sektor jasa, kemudian di sektor manufaktur dan terkecil di sektor pertanian. Pada dua provinsi lainnya yaitu Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan juga menunjukkan pola yang sama, yaitu persentase pekerja sirkuler yang terbanyak adalah yang bekerja di sektor jasa, kemudian di sektor pertanian dan terkecil di sektor manufaktur. Sementara itu untuk provinsi lainnya yaitu Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur juga menunjukkan pola yang sama, yaitu persentase pekerja sirkuler yang terbanyak adalah yang bekerja di sektor manufaktur, kemudian di sektor jasa dan terkecil di sektor pertanian.

4.4 Mobilitas Pekerjaan di Indonesia

Mobilitas pekerjaan merupakan konsep yang menggambarkan perpindahan lapangan pekerjaan pada tingkat individu. Jika pada konsep migrasi yang diangkat hanya terbatas pada perpindahan fisik individu yang melintasi batas geografis wilayah, maka mobilitas pekerjaan merupakan perpindahan dalam format nonfisik dari pola migrasi yang dilakukan. Konsep mobilitas pekerjaan erat kaitannya dengan perilaku tenaga kerja di tempat kerja dan di pasar kerja. Analisis tentang perpindahan pekerjaan banyak ditemui pada studi tentang perilaku tenaga kerja di pasar kerja. Istilah lain yang juga menjelaskan hal yang sama adalah *labour shift* yang sering ditemui dalam ranah ilmu ekonomi. Namun tulisan ini berada dalam lingkup demografi yang mengulas tentang mobilitas, dimana lingkup mobilitas tersebut tidak hanya terkait dengan perpindahan fisik (mobilitas spasial) individu tapi juga pada perubahan non fisik yang terekam dari perubahan tempat bekerja. Dengan demikian, untuk analisis selanjutnya akan

dipakai istilah mobilitas pekerjaan untuk setiap hal yang terkait dengan perubahan lapangan pekerjaan dan status pekerjaan.

Perekonomian Indonesia dapat dikategorikan sebagai perekonomian dengan ciri surplus tenaga kerja. Dengan demikian, aspek ketenagakerjaan menjadi isu yang cukup penting bagi perekonomian. Masalah ketenagakerjaan dipengaruhi oleh banyak aspek, diantaranya iklim investasi, regulasi pemerintah, tingkat upah dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Di lain sisi, transformasi struktural ekonomi yang terjadi sejak tahun 1980-an tidak disertai dengan transformasi tenaga kerja. Arah perekonomian yang cenderung mengarah ke sektor industri tidak disertai dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut. Tenaga kerja justru membengkak di sektor pertanian.

Idealnya transformasi struktural berjalan seiring dengan mobilitas pekerjaan yang dialami para tenaga kerja. Dengan begitu, angka pertumbuhan ekonomi yang terjadi berdampak riil terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Salah satu hal yang dapat dilihat tercermin dari tingkat upah yang diterima tenaga kerja. Tingkat upah biasanya diukur dari produktivitas tenaga kerja. Sementara produktivitas dapat terekam dari pendidikan dan pengalaman tenaga kerja. Tingkat upah yang jauh dibawah produktivitas yang diberikan tenaga kerja berpotensi mendorong tenaga kerja untuk berpindah atau berhenti dari pekerjaan tersebut. Selain faktor upah, terdapat beberapa faktor lain yang juga dapat menjadi pencetus. Ehrenberg dan Smith (2002), menyebutkan bahwa terdapat tiga skema yang dilakukan oleh perusahaan untuk menahan tenaga kerja untuk tidak keluar atau berhenti. Pertama, memberikan tingkat upah yang lebih tinggi daripada tingkat upah yang ada di pasar kerja. Kedua, menaikkan tingkat upah dengan percepatan yang lebih tinggi, terlebih kepada tenaga kerja yang

sudah berpengalaman. Ketiga, dengan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan dan mengharuskan tenaga kerja tersebut untuk mengabdikan dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya di perusahaan dalam kurun waktu tertentu.

4.4.1 Karakteristik Pelaku Mobilitas Pekerjaan

Dalam menganalisis pelaku mobilitas pekerjaan, menggunakan unit analisis penduduk berumur 15 tahun ke atas yang saat survei masih bekerja dan pernah pindah pekerjaan setelah 31 Agustus 2013. Mereka yang saat survei tidak bekerja tidak akan dianalisis, meskipun sebelum 31 Agustus 2013 bekerja. Analisis ini hanya melihat perpindahan pekerjaan secara makro, karena data yang digunakan bukanlah data panel dimana bisa dilihat perpindahan pekerjaan pada individu yang sama.

Proporsi pekerja di Indonesia yang pernah pindah dan yang tidak pernah pindah pekerjaan menurut karakteristik ditampilkan pada Tabel 4.31. Jika dilihat menurut jenis kelamin, proporsi pekerja laki-laki yang pernah pindah pekerjaan sedikit lebih banyak dibandingkan pekerja perempuan. Perempuan cenderung tidak pernah pindah pekerjaan. Kondisi ini disebabkan karena perempuan sudah merasa cukup dengan pekerjaan yang ada. Kemungkinan lainnya adalah karena perempuan bukan pencari nafkah utama dalam keluarga sehingga mereka tidak berkeinginan untuk mencari pekerjaan yang lain.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pekerja di perkotaan sedikit lebih banyak yang pernah pindah pekerjaan daripada pekerja yang tinggal di perdesaan. Kondisi ini didukung oleh karena perkotaan menyediakan pekerjaan di sektor *nonfarm* (bukan pertanian) dalam jumlah yang sangat besar. Dengan

demikian, memudahkan mereka untuk mencari/pindah pekerjaan sesuai minatnya.

Data pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa semakin tua umur pekerja semakin kecil proporsi yang pernah pindah pekerjaan. Pekerja muda, yaitu pekerja yang berumur antara 15 – 34 tahun, cenderung pernah pindah pekerjaan karena pada usia muda masih banyak kesempatan untuk memilih lapangan pekerjaan yang lebih sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, kecenderungan untuk pindah pekerjaan juga disebabkan karena adanya sistem kontrak pegawai. Bagi para pekerja berumur muda yang baru masuk dunia kerja, biasanya mereka masih menjadi pegawai kontrak sehingga ketika masa kontrak habis, mereka akan mencari pekerjaan yang lain. Sementara pekerja yang berusia lebih tua biasanya sudah menjadi pegawai tetap sehingga mobilitas pekerjaannya sudah mulai berkurang.

Jika dilihat menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar proporsi mereka yang pernah pindah pekerjaan. Seperti pernah diulas sebelumnya bahwa tingkat pendidikan sangat terkait dengan tingkat kepuasan terhadap nilai nominal penghasilan yang diperoleh setiap individu. Harapan tingkat upah yang tinggi berdasarkan tingkat pendidikannya merupakan nilai *rate of return* yang ingin dicapai setiap pekerja. Pekerja dengan pendidikan tamat SD ke bawah cenderung tidak berpindah pekerjaan. Mereka sudah cukup puas dengan pekerjaannya sekarang karena ketiadaan pilihan untuk bisa masuk ke pekerjaan lain akibat rendahnya tingkat pendidikan yang dimilikinya.

Apabila dilihat menurut status perkawinan, pekerja yang belum kawin cenderung pernah pindah pekerjaan. Mereka masih ingin mencoba-coba mencari pekerjaan yang paling sesuai. Belum adanya keluarga yang harus ditanggung membuat mereka lebih

berani untuk melakukan perpindahan pekerjaan. Sementara bagi pekerja yang berstatus kawin cenderung untuk tidak pindah pekerjaan.

Tabel 4.31. Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah dan yang Tidak Pernah Pindah Pekerjaan menurut Karakteristik Demografi, 2014

Karakteristik	Pernah pindah	Tidak pernah pindah
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	13,2	86,8
Perempuan	10,1	89,9
Daerah Tempat Tinggal		
Perkotaan	12,4	87,6
Perdesaan	11,1	88,9
Kelompok Umur		
15 - 24	32,1	67,9
25 - 34	14,4	85,6
35 - 44	9,1	90,9
45 - 54	8,1	91,9
55+	5,7	94,3
Pendidikan		
SD ke bawah	9,7	90,3
SMP	13,3	86,7
SMA ke atas	14,2	85,8
Status Perkawinan		
Belum Kawin	28,8	71,2
Kawin	9,6	90,4
Cerai Hidup	13,6	86,4
Cerai Mati	5,3	94,7
Jumlah	11,8	88,2

Berdasarkan lapangan usaha/pekerjaan sebelum pindah pekerjaan, terlihat bahwa yang paling banyak pindah pekerjaan adalah mereka yang bekerja di sektor jasa. Tabel 4.32 menunjukkan ada sebesar 43,8 persen dari seluruh pekerja yang

pernah pindah pekerjaan berasal dari sektor jasa. Pola yang sama juga terjadi pada tahun 2012, dimana pekerja yang pernah pindah pekerjaan sebagian besar berasal dari sektor jasa yaitu sebanyak 39,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja pada sektor jasa lebih mudah untuk keluar-masuk bekerja di sektor ini. Pekerja pada sektor industri berada pada urutan kedua dengan persentase sebesar 33,5 persen. Mereka yang bekerja pada sektor pertanian adalah kelompok yang paling sedikit mengalami perpindahan pekerjaan, yaitu sebesar 22,7 persen. Seperti pernah dibahas sebelumnya bahwa sektor pertanian didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan rendah (*low skill worker*). Ketika tingkat pendidikan yang melekat pada diri mereka membuat mereka tidak memiliki daya tawar atau pilihan, pada akhirnya mereka bertahan pada pekerjaan yang ada meskipun kemungkinan ada keinginan untuk berpindah pada lapangan pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Pola serupa juga terjadi pada tahun 2012, dimana pekerja pada sektor industri berada pada urutan kedua (31,8 persen) dan yang paling sedikit mengalami perpindahan pekerjaan adalah mereka yang bekerja pada sektor pertanian (28,4 persen).

Tabel 4.32. Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah Pekerjaan menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama Sebelum Pindah Pekerjaan, 2014

Kelompok Umur	Lapangan usaha utama sebelum pindah pekerjaan		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa
(1)	(2)	(3)	(4)
15 - 24	10,7	36,4	52,9
25 - 34	16,0	36,9	47,1
35 - 44	28,0	33,0	39,0
45 - 54	36,3	30,6	33,1
55+	46,8	20,7	32,5
Jumlah	22,7	33,5	43,8

Berdasarkan Tabel 4.32 terlihat adanya perbedaan perilaku dari pekerja yang menekuni sektor modern (sektor industri dan jasa) dengan pekerja yang terpapar sektor tradisional (sektor pertanian). Semakin tua umur pekerja pada sektor modern, kecenderungan untuk pindah pekerjaan akan semakin kecil. Sebaliknya, bagi pekerja di sektor tradisional, semakin tua semakin besar kecenderungan untuk pindah lapangan pekerjaan. Hal ini mengindikasikan bahwa bekerja di sektor pertanian sebenarnya relatif lebih ringan dan tidak kontinyu sehingga secara umum faktor umur tidak mempengaruhi minat pekerja terhadap pekerjaan di sektor pertanian. Sebaliknya pekerjaan pada sektor modern lebih membutuhkan pekerja-pekerja dengan kualifikasi tertentu, misalnya: keahlian dan persyaratan umur tertentu. Dengan adanya persyaratan tersebut, biasanya pekerjaan di sektor modern lebih didominasi oleh pekerja-pekerja yang berumur muda. Walaupun ada pekerja golongan usia tua di sektor modern yang melakukan perpindahan pekerjaan, diduga mereka pindah pekerjaan dari sektor modern (nonpertanian) ke sektor pertanian.

Jika dilihat menurut status pekerjaan, kecenderungan untuk pindah pekerjaan paling banyak terjadi pada kaum buruh/karyawan ataupun pegawai. Lebih dari separuh pekerja yang pernah pindah pekerjaan adalah mereka yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Pada Tabel 4.33 juga menunjukkan bahwa seiring dengan bertambahnya umur yang disertai dengan penambahan pengalaman, maka keinginan untuk pindah di kalangan buruh/karyawan/pegawai akan semakin kecil. Kecilnya kecenderungan untuk melakukan *turn over* (keluar dan kemudian masuk kembali ke pasar kerja) dapat bersumber dari dalam diri pekerja tersebut yakni adanya rasa kurang percaya diri (*discourage*) untuk mencari pekerjaan baru, antara lain disebabkan karena pengaruh umur dan

semakin banyaknya saingan yang memiliki umur yang lebih muda dan lebih berkualitas. Peran tempat kerja juga turut mengecilkan hasrat para pekerja ini untuk keluar. Langkah yang biasanya diambil oleh para pemilik tempat kerja (*employer*) agar pekerjanya tidak pergi adalah dengan menerapkan kebijakan sistem upah yang meningkat seiring dengan bertambahnya umur. Dengan demikian, pekerja akan lebih memilih untuk menetap di tempat kerja lama karena upah yang diterima di tempat lama relatif lebih tinggi yang disebabkan karena pertimbangan pengalaman kerja sebagai salah satu faktor pengali upah. Langkah lain yang biasa ditempuh oleh para *employer* adalah dengan memberikan kesempatan kepada pekerjanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya melalui pemberian pendidikan dan keahlian. Namun disertai dengan perjanjian bahwa setelah mengenyam pendidikan/pelatihan harus menerapkan ilmu yang diperolehnya di tempat kerja selama interval waktu tertentu.

Tabel 4.33. Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah Pekerjaan menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan Utama Sebelum Pindah Pekerjaan, 2014

Kelompok umur	Status pekerjaan utama sebelum pindah pekerjaan				
	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh	Buruh	Pekerja bebas	Pekerja tak dibayar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15 - 24	3,8	0,9	75,4	14,8	5,1
25 - 34	10,9	3,5	62,3	19,4	3,9
35 - 44	15,9	8,2	44,0	26,1	5,8
45 - 54	15,8	11,7	33,4	32,1	7,0
55+	20,2	17,7	26,3	27,7	8,1
Jumlah	11,5	6,3	55,0	21,8	5,4

Perilaku yang berbeda tercermin dari mereka yang berstatus selain buruh/karyawan/pegawai. Umur tidak begitu menjadi faktor penentu dalam memutuskan apakah akan berpindah pekerjaan.

Tabel 4.34. Distribusi Persentase Pekerja yang Pindah Pekerjaan menurut Kelompok Umur dan Alasan Pindah Pekerjaan, 2014

Kelompok Umur	Pindah	Alasan pindah pekerjaan		
		Internal	Eksternal	Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15 - 24	28,0	43,5	26,6	29,9
25 - 34	30,0	37,2	30,5	32,3
35 - 44	18,5	32,1	31,0	36,9
45 - 54	12,4	23,5	30,6	45,9
55+	11,1	9,8	25,5	64,7
Jumlah	100,0	33,3	29,0	37,7

Secara umum terlihat bahwa semakin tinggi umur pekerja maka akan semakin kecil kecenderungan untuk pindah dari tempat kerja. Tingginya kecenderungan *turn over* pada kelompok umur produktif (15-24, 25-34, dan 35-44 tahun) mengindikasikan dinamisnya pasar kerja di Indonesia. Namun perlu diperhatikan bahwa dinamika pasar kerja dapat diartikan kedalam dua keadaan yang bertolak belakang. Aspek positif relatif tingginya *turn over* di kalangan tenaga kerja produktif menunjukkan bahwa semakin fleksibelnya tenaga kerja untuk masuk dan keluar dari pasar kerja. Dapat diartikan informasi tenaga kerja terkait pasar kerja relatif simetrik. Tenaga kerja dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang kualifikasi dan tingkat upah yang ditawarkan oleh para pengusaha. Dengan demikian akan relatif lebih mudah bagi tenaga kerja untuk memilih dan memilah jenis pekerjaan mana yang diinginkan.

Namun angka *turn over* yang tinggi juga mengindikasikan terjadinya biaya ekonomi tinggi di suatu wilayah. Perusahaan mengeluarkan biaya dan waktu yang tidak sedikit dalam mencari tenaga kerja. Akibat tingginya biaya produksi perusahaan maka akan berakibat pada pengurangan biaya faktor produksi, yaitu penerimaan upah yang lebih rendah. Kebijakan ketenagakerjaan yang tidak aplikatif justru akan membawa pada dampak *turn over* yang tinggi. Pada akhirnya perusahaan hanya akan melakukan sistem perekrutan lepas kontrak (*outsourcing*). Padahal kondisi ini sama sekali tidak menguntungkan pengusaha atau pekerja.

Pada Tabel 4.34, alasan pindah tempat kerja dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni faktor internal (faktor yang berasal dari dalam diri tenaga kerja seperti upah yang tidak sesuai dan lingkungan kerja yang tidak cocok, serta usaha yang tidak lancar), faktor eksternal (faktor yang berasal dari lingkungan luar, yakni Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tidak ada permintaan (order)/usaha terhenti (bangkrut) dan habis masa kontrak), dan faktor lain (selain faktor internal dan eksternal).

Perpindahan pekerjaan paling besar terjadi karena alasan lain yaitu mencapai 37,7 persen. Jika dilihat menurut kelompok umur, perpindahan pekerjaan pada kelompok umur muda lebih banyak disebabkan karena alasan internal, bahkan pada kelompok umur sekolah (15–24 tahun) mencapai hampir separuh (43,5 persen). Disini terlihat bahwa faktor internal sangat kuat mempengaruhi keinginan untuk berhenti bekerja. Kondisi ini dapat diartikan bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor penentu besarnya tingkat upah. Temuan ini sangat menarik dan bermanfaat bagi para pembuat kebijakan dan para kaum muda usia sekolah bahwa fakta perbedaan tingkat pendidikan terbukti membedakan tingkat upah. Tenaga kerja kelompok ini lebih memilih untuk berhenti bekerja dan mencari pekerjaan lain jika

upah yang mereka terima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu belum matangnya mental pekerja usia sekolah telah menghambat mereka untuk bisa dengan cepat berasimilasi dan beradaptasi dengan lingkungan tempat kerjanya.

Semakin tua umur pekerja, semakin kecil kecenderungan untuk pindah pekerjaan yang disebabkan karena faktor internal. Sebaliknya untuk faktor eksternal dan lainnya memiliki pola yang berlawanan, yaitu semakin tua umur pekerja, semakin besar kecenderungan untuk pindah pekerjaan. Hampir separuh dari pekerja berumur 45–54 tahun dan bahkan lebih dari separuh pekerja berumur 55 tahun ke atas memilih untuk pindah pekerjaan karena alasan faktor lain. Faktor lain dapat berupa keinginan untuk melakukan hal di luar pekerjaan, seperti melakukan hobi dan sebagainya. Selain itu, para pekerja kelompok ini dapat dikatakan sudah melewati masa puncak bekerja dan masa puncak memperoleh penghasilan. Hal ini didasarkan pada penelitian Rangkuti (2009) yang mengungkapkan bahwa umur puncak untuk berpartisipasi dalam pasar kerja dan umur puncak memperoleh penghasilan maksimum, terjadi pada kisaran umur 40 tahun. Dengan demikian, keputusan untuk bekerja bukan lagi karena untuk memperoleh penghasilan, tetapi lebih kepada *passion*. Alasan berhenti paling lumrah bagi kelompok ini adalah bahwa mereka telah masuk pada waktu pensiun.

4.4.2 Mobilitas Pekerjaan menurut Lapangan Usaha/ Pekerjaan Utama

Analisis lebih menarik dapat dilakukan dengan mengamati secara lebih jauh tentang alur perpindahan lapangan usaha/ pekerjaan. Analisis ini bermanfaat untuk melihat pergeseran lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja. Dengan

demikian akan dapat diketahui lapangan pekerjaan mana yang ramah tenaga kerja (*labour friendly*) dan yang mampu "menahan" tenaga kerja. Pada tingkat makro, informasi ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui struktur daya serap tenaga kerja di tiap sektor ekonomi. Selain itu juga dapat dijadikan dasar dalam penentuan arah pembangunan sektoral yang berbasis kependudukan dan ketenagakerjaan, tepatnya pembangunan yang terpusat pada penduduk dan tenaga kerja. Analisis ini juga dapat mendeteksi berapa banyak pekerja yang melakukan mobilitas/ perpindahan pekerjaan dari suatu lapangan pekerjaan ke lapangan pekerjaan lainnya, ataupun yang melakukan mobilitas/ perpindahan pekerjaan namun masih pada lapangan pekerjaan yang sama.

Tabel 4.35 menunjukkan proporsi pekerja yang pernah pindah pekerjaan menurut lapangan pekerjaan utama sebelum dan sesudah pindah pekerjaan. Pada kolom-kolom yang membentuk diagonal, menunjukkan persentase pekerja yang pernah pindah pekerjaan namun masih di lapangan pekerjaan yang sama. Sebagai contoh, ada seseorang yang bekerja pada perusahaan pakaian merk "A", karena ada pengurangan pegawai dia terkena PHK, setelah beberapa bulan ia mendapat pekerjaan lagi di perusahaan sepatu merk "Z". Maka orang ini termasuk pernah pindah pekerjaan, tetapi masih pada lapangan pekerjaan yang sama, yaitu industri pengolahan.

Dari Tabel 4.35 terlihat bahwa pekerja yang lapangan pekerjaan sebelum dan sesudah perpindahan tetap pada sektor pertanian persentasenya cukup tinggi, yaitu mencapai 12,0 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja pada sektor pertanian sulit untuk pindah ke sektor yang lain. Keadaan memaksa untuk tetap berada pada sektor pertanian. Sebagaimana diketahui, pekerja pada sektor pertanian di Indonesia memiliki pendidikan yang

relatif rendah. Sementara untuk masuk ke sektor lainnya memerlukan pendidikan atau keterampilan tertentu sehingga mereka yang bekerja pada sektor pertanian meskipun pindah pekerjaan namun masih tetap pada sektor yang sama.

Tabel 4.35. Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah Pekerjaan menurut Lapangan Pekerjaan Utama Sebelumnya dan Lapangan Pekerjaan Utama Sekarang, 2014

		Lapangan pekerjaan utama sekarang*)									Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Lapangan pekerjaan utama sebelumnya*)	1	12,0	0,7	2,4	0,0**)	3,3	2,7	0,8	0,1	1,5	23,5
	2	2,0	0,4	3,1	0,0**)	0,8	1,8	0,4	0,3	0,8	9,5
	3	1,9	0,1	5,4	0,0**)	0,9	2,0	0,5	0,3	1,0	12,1
	4	-	0,0**)	0,0**)	-	-	0,0**)	0,0**)	-	0,0**)	0,1
	5	4,4	0,2	1,7	0,0**)	3,1	2,5	0,8	0,5	1,3	14,4
	6	3,0	0,3	2,6	0,1	1,5	7,3	1,9	0,8	2,4	20,0
	7	0,8	0,0**)	0,7	0,1	0,4	2,6	0,3	0,7	0,7	6,3
	8	0,1	-	0,1	0,0**)	0,1	0,3	0,1	0,5	0,4	1,6
	9	1,8	0,2	1,4	0,0**)	0,8	3,2	0,6	0,9	3,7	12,5
Jumlah		25,8	1,9	17,5	0,3	10,9	22,4	5,4	4,1	11,7	100

Keterangan :*) merujuk pada klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), 1. Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan; 2. Pertambangan dan penggalian; 3. Industri pengolahan; 4. Listrik, gas dan air bersih; 5. Konstruksi; 6. Perdagangan, hotel dan restoran; 7. Transportasi, pergudangan dan komunikasi; 8. Lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan; 9. Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

**) Kasusnya sangat kecil.

Sektor yang termasuk banyak diantara pekerjaanya yang pindah pekerjaan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor konstruksi. Ada sebesar 20,0 persen pekerja yang pindah pekerjaan berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun sebagian besar dari mereka (7,3 persen) melakukan perpindahan pekerjaan masih dalam sektor yang sama. Selanjutnya, perpindahan pekerjaan di sektor ini tidak hanya mengarah ke sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, tapi

juga mengarah ke sektor jasa. Ini suatu temuan yang menarik, dimana sektor jasa ternyata cukup berpotensi untuk menjadi penyerap tenaga kerja dan juga sebagai penarik terjadinya mobilitas pekerjaan menuju sektor ini.

Sementara untuk sektor konstruksi, tercatat sebesar 14,4 persen dari keseluruhan pekerja yang pindah pekerjaan berasal dari sektor ini. Sebagian dari mereka (3,1 persen) melakukan perpindahan pekerjaan masih dalam sektor yang sama. Dapat dimaklumi bahwa mereka yang bekerja pada sektor konstruksi akan dengan mudah memasuki sektor yang sama karena adanya informasi antarsesama tenaga kerja. Pekerja yang keluar dari sektor ini paling banyak terserap di sektor pertanian, yaitu sebesar 4,4 persen.

Di lain sisi, sektor energi (listrik, gas, dan air bersih) merupakan sektor yang mempunyai daya tahan tenaga kerja yang cukup tinggi. Proporsi pekerja yang keluar dari sektor ini paling kecil jika dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu hanya 0,1 persen. Hal ini menggambarkan bahwa mereka yang bekerja pada sektor listrik, gas dan air bersih sudah merasa nyaman untuk bekerja pada sektor ini sehingga mereka merasa tidak perlu lagi mencari pekerjaan lain.

Tabel 4.35 juga menunjukkan bahwa sekitar 26 persen dari pekerja yang pindah pekerjaan lebih memilih untuk bertahan dan bekerja di sektor pertanian. Selanjutnya, perpindahan pekerjaan tersebut mengarah ke sektor perdagangan dan industri pengolahan, dengan persentase masing-masing sebesar 22,4 persen dan 17,5 persen. Hal ini bisa diartikan bahwa ketiga sektor diatas cukup berpotensi sebagai penyerap tenaga kerja. Jika dikaitkan dengan peranan sektor ekonomi terhadap kegiatan perekonomian Indonesia, memang ketiga sektor tersebut

merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB Indonesia. Selama 3 tahun terakhir, pola tersebut tidak mengalami perubahan.

4.4.3 Mobilitas Pekerjaan menurut Status Pekerjaan Utama

Analisis lebih lanjut untuk melihat pola mobilitas pekerjaan adalah melalui perubahan status pekerjaan. Analisis ini juga bermanfaat untuk mengetahui potensi fleksibilitas tenaga kerja formal dan tenaga kerja informal secara makro. Informasi yang akan diperoleh nantinya juga akan sangat bermanfaat untuk mengetahui potensi perubahan status sosial kemasyarakatan tenaga kerja.

Lebih dari separuh (54,7 persen) dari pekerja yang pernah pindah pekerjaan, sebelumnya berstatus buruh/karyawan/pegawai, dan ini mengalami kenaikan dari tahun 2012. Sebagian besar dari mereka walaupun pindah pekerjaan namun tetap memilih untuk menjadi buruh/karyawan/pegawai. Risiko kerja yang relatif kecil, lingkungan kerja yang nyaman, tingkat upah yang lebih baik serta adanya jaminan sosial dari tempat kerja menjadi daya rekat utama bagi mereka yang pindah pekerjaan namun tetap bertahan pada status pekerjaan yang sama. Adanya sistem kontrak yang diberlakukan pada perusahaan-perusahaan juga diduga menjadi penyebab tingginya perpindahan yang terjadi di kalangan pekerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai. Perpindahan pekerjaan dari mereka yang berstatus buruh/karyawan/pegawai, selain tetap menjadi buruh, berusaha sendiri merupakan pilihan yang banyak diminati, disusul kemudian dengan pekerja tak dibayar dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar.

Perpindahan pekerjaan dari mereka yang berstatus berusaha sendiri ternyata juga memiliki persentase yang cukup

besar. Ada sebesar 12,5 persen dari seluruh pekerja yang pindah pekerjaan berasal dari mereka yang berstatus berusaha sendiri. Dan sekitar 4 persen dari kelompok ini berubah status menjadi buruh/karyawan/pegawai, diikuti selanjutnya dengan mereka yang pindah pekerjaan namun masih dengan status pekerjaan yang sama (3,0 persen). Risiko kerja yang lebih kecil menjadi alasan utama bagi para pekerja yang sebelumnya berusaha sendiri, kemudian memilih untuk menjadi buruh/karyawan/pegawai. Diduga hal ini pula yang menyebabkan sebagian besar dari mereka yang berstatus pekerja bebas nonpertanian memilih untuk menjadi buruh/karyawan/pegawai.

Tabel 4.36. Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah Pekerjaan menurut Status Pekerjaan Utama Sebelumnya dan Status Pekerjaan Utama Sekarang, 2014

		Status pekerjaan utama sekarang*)							Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	
Status pekerjaan utama sebelumnya*)	1	3,0	1,5	0,3	4,5	0,9	1,5	0,8	12,5
	2	0,9	2,1	0,2	1,2	0,4	0,7	0,3	5,8
	3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,0	0,1	0,1	1,7
	4	6,8	3,5	1,2	34,4	1,1	3,0	4,6	54,7
	5	1,4	1,3	0,1	1,6	1,8	1,8	1,0	9,0
	6	1,4	1,9	0,2	3,3	1,0	3,0	1,3	12,1
	7	0,6	0,4	0,1	1,3	0,3	0,2	1,4	4,2
Jumlah		14,6	11,0	2,3	46,7	5,5	10,3	9,5	100

Keterangan : *) Status pekerjaan dibedakan menjadi 1. Berusaha sendiri; 2. Berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar; 3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar; 4. Buruh/karyawan/pegawai; 5. Pekerja bebas di pertanian; 6. Pekerja bebas di nonpertanian; 7. Pekerja tak dibayar.

Menjadi buruh/karyawan/pegawai seolah sudah menjadi pilihan utama bagi para pekerja yang melakukan perpindahan pekerjaan. Alternatif lain dari perpindahan status pekerjaan ini menuju ke arah berusaha, baik berusaha sendiri maupun berusaha

dibantu buruh. Kondisi ini ditunjukkan pada Tabel 4.36, dimana sebanyak 46,7 persen dari mereka yang pindah pekerjaan memilih untuk menjadi buruh/karyawan/pegawai. Selanjutnya diikuti dengan berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh baik tidak tetap maupun tetap, masing-masing sebesar 14,6 persen dan 13,3 persen. Status pekerjaan yang banyak dipilih/diminati oleh para pekerja yang melakukan perpindahan pekerjaan menunjukkan pola yang sama selama 3 tahun terakhir.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Keputusan untuk melakukan mobilitas dapat dianggap sebagai sebuah alternatif untuk mempertahankan kehidupan dan dalam usaha mencapai penghidupan yang lebih baik. Studi maupun ulasan tentang mobilitas penduduk, khususnya mobilitas tenaga kerja masih relatif jarang dilakukan di Indonesia. Keterbatasan data tentang mobilitas maupun migrasi menjadi penyebab sedikitnya studi tentang hal ini. Kalaupun terdapat informasi mengenai perpindahan individu, itu juga masih terbatas pada mobilitas spasial. Sementara informasi tentang mobilitas tenaga kerja baru tersedia pada data Sakernas tahun 2007. Pada Sakernas tahun 2008 informasi mobilitas tenaga kerja lebih lengkap karena juga menyajikan informasi tentang mobilitas pekerjaan tenaga kerja.

Migrasi merupakan satu dari tiga komponen dinamika penduduk. Migrasi sedikit berbeda dengan dua komponen lainnya yaitu kelahiran dan kematian, karena ketika mempelajari dan mengulas migrasi berarti mempelajari dan mengulas perilaku individu yang melakukan perpindahan. Sementara, seperti diketahui bahwa tiap individu memiliki keunikan tersendiri, begitu juga dengan perilakunya. Dengan demikian studi tentang mobilitas maupun migrasi merupakan studi yang mempelajari tentang perilaku individu yang melakukannya.

Penulisan publikasi tentang analisis mobilitas tenaga kerja hasil Sakernas 2014 ini berusaha untuk mengisi kelonggaran studi tentang perpindahan penduduk, khususnya tentang mobilitas

nonpermanen tenaga kerja maupun tentang mobilitas pekerjaan tenaga kerja.

Analisa data menunjukkan terjadinya peningkatan mobilitas nonpermanen pekerja di Indonesia sejak Tahun 2010 hingga 2014, baik mobilitas ulang-alik atau pun mobilitas sirkuler. Proporsi pekerja yang melakukan mobilitas ulang-alik jauh lebih besar dibandingkan yang melakukan mobilitas sirkuler.

Sakernas menunjukkan bahwa terdapat pola yang sama antara mobilitas ulang-alik dan mobilitas sirkuler menurut gender. Lebih banyak pekerja laki-laki yang melakukan kedua mobilitas nonpermanen tersebut dibandingkan pekerja perempuan. Perempuan lebih cenderung menjadi *stayers* yaitu bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi tempat tinggalnya. Menurut pendidikan, proporsi terbesar pelaku mobilitas ulang-alik adalah pekerja berpendidikan SMA ke atas dan sebaliknya untuk mobilitas sirkuler adalah pekerja dengan pendidikan di bawah SMA. Dari aspek wilayah, pekerja yang tinggal di perkotaan lebih *mobile* dibandingkan pekerja yang tinggal di perdesaan. Pekerja yang tinggal di perkotaan mempunyai peluang yang lebih besar untuk melakukan mobilitas ulang-alik, dan sebaliknya pekerja yang tinggal di perdesaan mempunyai peluang lebih besar untuk melakukan mobilitas sirkuler. Dan berdasarkan status perkawinannya, mereka yang tidak/belum menikah memiliki proporsi melakukan mobilitas ulang-alik lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang sudah menikah. Dan sebaliknya pekerja yang sudah menikah memiliki peluang lebih besar untuk melakukan mobilitas sirkuler.

Mobilitas nonpermanen lebih banyak terjadi pada kelompok usia 20-49 tahun. Baik pekerja komuter ataupun pekerja

sirkuler keduanya membentuk huruf U terbalik. Puncaknya pada kelompok umur 25-44 tahun. Perbedaannya adalah komuter terjadi lebih banyak pada usia muda dan sebaliknya mobilitas sirkuler terjadi lebih banyak pada usia di atas 30 tahun. Yang menarik adalah kenyataan semakin tua, semakin kecil kecenderungan pekerja melakukan mobilitas nonpermanen. Mereka lebih senang bekerja di kabupaten/kota di mana mereka tinggal.

Komuter paling banyak bekerja di sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi, diikuti sektor industri. Sedangkan pekerja sirkuler paling banyak terserap pada sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, sektor konstruksi dan sektor jasa kemasyarakatan.

Kegiatan mobilitas didasari oleh motivasi ekonomi untuk mendapatkan tingkat penghasilan yang lebih baik, sehingga banyak pekerja yang memilih untuk meninggalkan sektor pertanian dan melakukan mobilitas nonpermanen ke kabupaten/kota lain dengan bekerja di sektor lain seperti industri, perdagangan, atau jasa-jasa yang dapat memberikan upah yang lebih tinggi dibandingkan mereka harus bekerja sebagai pekerja sektor pertanian. Baik pekerja komuter maupun pekerja sirkuler paling banyak bekerja sebagai tenaga kerja produksi, operasional alat angkutan dan pekerja kasar.

Pekerja komuter yang bekerja dengan jam kerja normal jauh lebih besar dibandingkan pekerja sirkuler. Ini membuktikan pekerja sirkuler kalah produktif dibandingkan pekerja komuter. Pekerja komuter yang bekerja sesuai jam kerja normal paling banyak ditemui di sektor listrik, gas, dan air bersih dan yang

terendah ada pada sektor pertanian. Pola serupa berlaku pada pekerja sirkuler.

Sepuluh lebih pekerja komuter menghabiskan waktu tempuh kurang dari satu jam menuju tempat kerjanya. Dan sebagian kecil lainnya membutuhkan waktu di atas dua jam. Namun demikian, masih ada juga yang membutuhkan waktu dua jam untuk bisa mencapai lokasi tempat kerjanya. Berdasarkan moda transportasi yang digunakan, pekerja komuter yang memanfaatkan jasa transportasi umum dan bersama yang menggunakan waktu tempuh antara satu hingga dua jam menuju tempat kerjanya, lebih banyak dibandingkan yang menggunakan transportasi pribadi.

Pekerja Indonesia lebih banyak yang bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi tempat tinggalnya yaitu dalam satu kabupaten/kota (*stayers*). Meskipun demikian persentase pelaku mobilitas nonpermanen mengalami peningkatan. Dalam lingkup provinsi, provinsi dengan persentase pelaku mobilitas nonpermanen terbesar adalah DKI Jakarta, Banten, DIY, Jawa Barat, Bali, dan Jawa Tengah. Dukungan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, memudahkan pekerja melakukan mobilitas nonpermanen baik harian, mingguan, ataupun bulanan.

Penyumbang komuter terbesar di Indonesia adalah provinsi-provinsi di pulau Jawa dengan capaian 81,1 persen. Hal ini wajar karena memang kota-kota besar di Indonesia kebanyakan berada di Pulau Jawa. Jawa Barat merupakan provinsi dengan distribusi persentase pekerja komuter terbesar.

Mobilitas pekerjaan merupakan suatu bentuk perpindahan non fisik tenaga kerja. Berbeda dengan mobilitas spasial yang memperhatikan dimensi geografis, mobilitas pekerjaan

memberikan perhatian pada perubahan lapangan pekerjaan dan status pekerjaan tenaga kerja. Temuan menunjukkan bahwa pola mobilitas lapangan pekerjaan maupun status pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja relatif fleksibel. Rata-rata sepertiga dari tenaga kerja yang bekerja di tiap sektor ekonomi melakukan perpindahan lapangan pekerjaan maupun status pekerjaan. Tentunya ada pengharapan tenaga kerja untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik di tempat kerja yang baru dan status pekerjaan yang baru.

Harapan tingkat upah yang tinggi berdasarkan tingkat pendidikannya merupakan nilai *rate of return* yang ingin dicapai setiap pekerja. Pekerja dengan tingkat pendidikan tamat SD ke bawah cenderung tidak berpindah pekerjaan, kemungkinan sudah cukup puas karena alasan ketiadaan pilihan untuk bisa masuk ke pekerjaan lainnya akibat rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki. Yang paling banyak melakukan perpindahan pekerjaan adalah pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai.

5.2 **Saran**

Mobilitas penduduk maupun mobilitas tenaga kerja mempunyai dampak pada perubahan penduduk secara makro maupun terhadap lingkup kehidupan individu pada tingkat mikro. Pelaku mobilitas ulang-alik yang diduga akan semakin banyak di masa mendatang akan membawa pada dua kondisi. Pertama, sarana dan prasana transportasi yang kian dibutuhkan para komuter hendaknya menjadi pemikiran bagi para pembuat kebijakan agar lebih memberikan perhatian secara fokus dan kontinyu terhadap ketersediaan sarana dan prasarana publik

khususnya untuk transportasi yang layak, mudah diakses, aman, nyaman dan ramah penduduk, khususnya bagi para lansia.

Kedua, pendapatan/penghasilan lebih besar yang diperoleh saat bekerja di luar kabupaten/kota tempat tinggal dibandingkan ketika bekerja di dalam kabupaten/kota tempat tinggal, digunakan untuk memenuhi biaya hidup yang lebih murah di tempat tinggalnya, membuat rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga sebagai pekerja komuter dan pekerja sirkuler mampu menyisakan selisihnya untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya atau bahkan dijadikan tabungan. Ini akan mempengaruhi konsumsi dan perekonomian wilayah tempat tinggal para pelaku mobilitas nonpermanen sehingga mampu mengurangi ketimpangan perekonomian antar wilayah. Diperkirakan akan semakin banyak pekerja yang memilih menetap di daerah pinggiran meskipun bekerja di kota-kota besar. Kebutuhan perumahan bagi para pekerja komuter harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah.

Temuan juga menunjukkan bahwa *turn over* paling banyak ditemui pada tenaga kerja usia sekolah. Alasan untuk keluar atau pindah dari tempat kerja disebabkan karena tingkat upah yang diterima tidak sesuai atau karena lingkungan kerja yang kurang nyaman. Pemerintah harus membuat kebijakan yang terkait dengan pendidikan. Pemerintah harus mampu meyakinkan penduduk untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui pemberian bantuan beasiswa, akses yang lebih mudah dan murah serta memperhatikan aspek pemerataan pendidikan bagi seluruh wilayah Indonesia.

Terkait dengan tingginya arus perpindahan dari pasar kerja, pemerintah perlu melakukan kajian khusus tentang arus

perputaran tenaga kerja serta studi tentang keterkaitan antara pendidikan dan lapangan usaha. Dengan demikian pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih konkrit dan akurat. Badan Pusat Statistik, selaku badan profesional penyedia dan diseminasi data mempunyai kemampuan dan berpotensi menjadi *partner* pemerintah dalam melakukan studi tersebut.

Terkait dengan kebijakan di pasar kerja, pemerintah perlu memberi perhatian akan tingginya angka *turn over* tenaga kerja. Pemerintah bersama dengan pengusaha dan tenaga kerja perlu duduk bersama dan merumuskan hal-hal yang terkait dengan perputaran tenaga kerja. Relatif banyaknya tenaga kerja yang melakukan mobilitas lapangan pekerjaan dan status pekerjaan juga harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Gejala ini perlu dikaji lebih mendalam baik oleh BPS maupun para peneliti yang menggeluti kajian tentang mobilitas pekerjaan untuk melihat lebih jauh determinan apa yang mempengaruhi tenaga kerja melakukan hal tersebut.

Dalam tatanan makro, pemerintah hendaknya menelaraskan arah pembangunan ekonomi makro dengan penyerapan tenaga kerja di tiap sektor ekonomi. Mobilitas lapangan pekerjaan harus seiring dengan transformasi ekonomi. Mobilitas status pekerjaan sebaiknya sejalan dengan kualifikasi tenaga kerja.

Informasi tentang indikator mobilitas lapangan pekerjaan maupun status pekerjaan yang lebih akurat sangat dibutuhkan dalam melakukan studi mobilitas tenaga kerja. Diharapkan di masa mendatang, BPS mampu melaksanakan survei khusus terkait dengan mobilitas spasial dengan lebih detail dan juga mengangkat

isu dan pertanyaan yang terkait dengan mobilitas pekerjaan ataupun kalau memungkinkan mobilitas sosial.

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris & Chotib.(1996). *Mobilitas penduduk dan pembangunan daerah analisis SUPAS 1995 (Indonesia)*. Jakarta: LDFEUI dan Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.
- Aritonang, W. (1998). *Perilaku Migran Usia Kerja di Indonesia : Analisa Data Sakerda 1993*. Tesis. Depok : Program Studi Pasca Sarjana Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- BPS. (1982). *Perpindahan Penduduk dan Urbanisasi di Indonesia*. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1985. Seri: S4. Jakarta.
- _____. (1992). *Perpindahan Penduduk dan Urbanisasi di Indonesia*. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995. Seri: S4. Jakarta.
- _____. (2001). *Statistik Indonesia : BPS, Jakarta Indonesia Tahun 2001*.
- _____. (2006). *Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi : BPS, Jakarta Indonesia Tahun 2006*.
- Brown, L.A. & V.A. Lawson (1985). *Migration In Third World Setting, Uneven Development and Conventional Modelling : A Case Study of Costa Rica*. Annals of Association of American Geographers, 75(1), Washington.
- Chotib. (1997). *Dinamika Mobilitas Internal dan Urbanisasi di Indonesia: Kajian Data Sensus Penduduk 1980, 1990, dan SUPAS 1995*. Mamograph.
- _____. (2001). *Inter-provincial Migration In Indonesia 1990 - 1995: "Application of Spatial Interaction Model Using the 1995 Intercensal Population Survey Data"*. Journal of Population, 7(1), 41-62.
- _____. (2003). *Tinjauan Ekonometrika Model Migrasi dan Pembangunan Regional di Indonesia*, Warta Demografi, 33(4).
- Ehrenberg G.Ronald & Robeth S. Smith. (2002). *Modern Labor Economics, Theory and Public Policy* : Pearson Education Inc. United States of America.
- Fei. J.H & G. Ranis. (1961). *A theory of Economic Development* : American Economic Review, 51, 533-565.

- Ghatak et al. (1996). Migration Theories and Evidence : An Assessment. *Journal of Economic Surveys* 10.2. Jstor database.
- Goldstein, Sidney.(1978).*Circulation in the context of total mobility in southeast asia*.Hawaii: East West Center Honolulu.
- Haryono, Tri Joko S.(n.d).*Jaringan sosial migran sirkuler: Analisis tentang bentuk dan fungsi*. Unair. <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Jaringan%20Sosial%20Migran%20Sirkuler>.
- Hugo, Graeme. (1977). *Circular Migration*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 13(3) : Australian National University Canberra.
- _____. (1978). *Population Mobility in West Java* : Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- _____.(1999, October).*Changing patterns of internal and international population mobility in Indonesia*.Makalah disampaikan pada seminar sehari Tantangan Mobilitas Penduduk Indonesia Menyongsong Era Globalisasi, Kantor Menteri Negara Kependudukan, Jakarta.
- _____. (2000). *The Impact of The Crisis on Internal Population Movement in Indonesia*. Bulletin of Indonesia Economic Studies. 36(2) : Australian National University Canberra.
- _____. (2007). *International Migration and Development in Asia*, paper presented at The 8th International Conference of Asia Pasific Migration Research Network : Migration, Development and Proverty Reduction. Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian China.
- ILO. (2004).*Migrasi: Peluang Dan Tantangan Bagi Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Author.
- Jellinek.(1977).*The pondok of Jakarta*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 13,70-89.
- Keyfitz, N.(1985).*Development in an east Javanese village, 1953 and 1985*.*Population and Development Review*,11,695-719.

- Leinbach, Thomas.R & Suwarno, Bambang.(1985).*Rural urban mobility and employment: Indonesia*.Ottawa: International Development Research Center.
- Mangalam, J.J. (1968). *Human Migration* : University Press of Kentucky.
- Mantra, Ida Bagus. (1978). *Pola Mobilitas Penduduk dari Desa ke Kota*. Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.
- _____.(1981).*Population movement in west rice communities; A case study of two dukuh in Yogyakarta special region*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- McConnel R. Campbell & Brue L. Stanley. (1995). *Contemporary Labor Economics*, New York : Mc Graw Hill.
- Patersen, J. 1968). *Internal Migration In Australia : Mathematical Models*. North Melbourne, Australia.
- Rahayu, Trophy E. (2010). *Pengaruh Perbedaan Penghasilan Terhadap Keputusan Pindah Kerja Tahun 2008-2009*. Tesis. Depok: Program Studi Pasca Sarjana Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Rangkuti, H. (2009). *Pengaruh Kesenjangan Penghasilan Dalam Keputusan Bermigrasi Tenaga Kerja Di Indonesia : Analisa Data IFLS 1993 Dan 2000*. Tesis. Depok : Program Studi Pasca Sarjana Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- _____. (2009). *Analisis Penelusuran Kesejahteraan Migran Pra dan Pasca Migrasi yang menggunakan Data Longitudinal Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 1993-2000*. Laporan Penelitian Berbasis Kompetensi. Universitas Indonesia (Forthcoming).
- Saefullah, H.A.Djaja.(1996).*Mobilitas internal nonpermanen*. In Aris Ananta dan Chotib(Eds.).*Mobilitas penduduk di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Kantor Menteri Negara Kependuduk/BKKBN.
- Sahara, I. (2010). *Pola Waktu Tempuh Pekerja dalam melakukan Mobilitas Ulang-alik di Kota Metropolitan Indonesia Tahun 2008*. Tesis. Depok: Program Studi Pasca Sarjana Kajian

Kependudukan dan Ketenagakerjaan Program Pascasarjana
Universitas Indonesia.

- Singarimbun, M. (1986). Sriharjo revisited. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 12, 117-125.
- Sudibia, I Ketut. 2007. *Mobilitas Penduduk Nonpermanen dan Kontribusi Remitan Terhadap Kehidupan Ekonomi dan Sosial Rumah Tangga di Daerah Asal*. *Piramida: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Vol III. No.1 Juli 2007*. Denpasar: PPK dan PSDM Universitas Udayana.
- Tarigan, Herlina. (2004). *Proses adaptasi migran sirkuler: Kasus migran asal komunitas perkebunan teh rakyat Cianjur, Jawa Barat*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Tjiptoherijanto, P. (1997). *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*. Jakarta : Penerbit UI Press.
- _____. (2000). *Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*, makalah disajikan dalam Simposium Dua Hari Kantor Mentrans dan Kependudukan/BAKMP di Jakarta.
- Todaro, M.P. (1969). *A Model Of Labour Migration And Urban Unemployment In Less Develop Countries* : *American Economic Review*, 59(1), 138-148.
- _____. (1976). *Internal Migration In Development Countries: A Review Of Theory, Evidence, Methodology And Research Priority*. Geneva:BIT.
- _____. (1999). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* : Penerbit Erlangga.
- United, Nations. (1953). *Principles For A Vital Statistics System* : Statistical Paper. Series M, 19.
- _____. (1958). *Multilingual Demographic Dictionary*. English Section. New York.
- _____. (1970). *National Migration Survey : Guideline for Analysis*, New York : Economic and Social Commission for Asia and Pacific.

- _____. (2003). *World Urbanization Prospects*. United Nations of Population Division. <http://esa.un.org/unup/>
- _____. (2005). *World Urbanization Prospects : The 2005 Revision*. Department of Economic And Social Affair. <http://www.un.org/esa/population/publications/WUP2005/2005wup.htm>
- White, Michelle J.(1986, May). *Sex differences in urban commuting patterns*. *The American Economic Review*,76(2), 386-372, April 07,2008. <http://www.jstor.org/stable/1818798> .
- Widaryatmo, (2009). *Karakteristik Pekerja Pelaku Mobilitas Non Permanen Indonesia 2007*. Tesis. Depok: Program Studi Pasca Sarjana Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Zlotnik, Hania. (1998). *Migrants Rights, Forced Migration and Migration Policy in Africa*. Proceeding in Conference on African Migration, Johannesburg, South Africa : United Nation.

LAMPIRAN

<http://www.wps.go.id>

LAMPIRAN

Hasil Pengolahan Sakernas 2013

Tabel L.1. Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Tiga Sektor Unggulan, 2013

Tingkat Pendidikan	Sektor unggulan penyerap tenaga kerja		
	Perdagangan	Industri	Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)
Di bawah SMA	29,4	36,0	12,7
Tidak sekolah	1,0	0,1	0,4
Tidak tamat SD	3,5	2,1	1,1
Tamat SD	10,1	10,9	5,0
Tamat SMP	14,8	21,0	6,2
SMA ke atas	70,6	64,0	87,3
Tamat SMA	52,5	53,1	36,7
Perguruan Tinggi	18,1	12,9	50,6
Jumlah	100,0	100,0	100,0

Tabel L.2. Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Tiga Sektor Unggulan, 2013

Tingkat Pendidikan	Sektor unggulan penyerap tenaga kerja		
	Perdagangan	Kontruksi	Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)
Di bawah SMA	79,5	78,0	55,8
Tidak sekolah	1,1	1,8	1,5
Tidak tamat SD	12,5	13,1	8,7
Tamat SD	49,7	43,7	32,3
Tamat SMP	16,2	19,3	13,3
SMA ke atas	20,5	22,0	44,2
Tamat SMA	16,9	17,4	23,6
Perguruan Tinggi	3,6	4,6	20,6
Jumlah	100,0	100,0	100,0

Tabel L.3 Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2013

Jenis pekerjaan utama	Tingkat pendidikan yang ditamatkan	
	Di bawah SMA	SMA ke atas
(1)	(2)	(3)
Profesional, teknisi & ybdi	0,6	19,2
Kepemimpinan & ketatalaksanaan	0,5	3,1
Pejabat pelaksana, tata usaha & ybdi	2,6	25,3
Tenaga usaha penjualan	20,0	13,6
Tenaga usaha jasa	7,9	8,4
Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan & perburuan	4,8	0,7
Tenaga produksi, angkutan & pekerja kasar	63,2	27,1
Lainnya	0,3	2,6
Jumlah	100,0	100,0

Tabel L.4. Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2013

Jenis pekerjaan utama	Tingkat pendidikan yang ditamatkan	
	Di bawah SMA	SMA ke atas
(1)	(2)	(3)
Profesional, teknisi & ybdi	0,4	16,3
Kepemimpinan & ketatalaksanaan	0,5	4,4
Pejabat pelaksana, tata usaha & ybdi	0,7	12,8
Tenaga usaha penjualan	26,2	13,8
Tenaga usaha jasa	8,0	8,0
Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan & perburuan	9,8	4,6
Tenaga produksi, angkutan & pekerja kasar	54,5	37,3
Lainnya	0,0	2,7
Jumlah	100,0	100,0

Tabel L.5. Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jam Kerja/Minggu, 2013

Status pekerjaan utama	Jam kerja / minggu	
	< 35	≥ 35
(1)	(2)	(3)
Berusaha sendiri	43,6	56,4
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	43,2	56,8
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	-	100,0
Buruh/karyawan/pegawai	16,9	83,1
Pekerja bebas di pertanian	15,9	84,1
Pekerja bebas di nonpertanian	25,7	74,3
Pekerja tak dibayar	29,9	70,1
Jumlah	20,0	80,0

Tabel L.6. Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jam Kerja/Minggu, 2013

Status pekerjaan utama	Jam kerja / minggu	
	< 35	≥ 35
(1)	(2)	(3)
Berusaha sendiri	32,9	67,1
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	24,2	75,8
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	10,4	89,6
Buruh/karyawan/pegawai	30,2	69,8
Pekerja bebas di pertanian	34,9	65,1
Pekerja bebas di nonpertanian	28,5	71,5
Pekerja tak dibayar	71,7	28,3
Jumlah	30,3	69,7

Tabel L.7. Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jam Kerja/minggu, 2013

Lapangan usaha utama	Jam kerja / minggu	
	< 35	≥ 35
(1)	(2)	(3)
Pertanian	35,8	64,2
Pertambangan	10,8	89,2
Industri	16,9	83,1
Listrik, gas dan air bersih	17,7	82,3
Konstruksi	18,2	81,8
Perdagangan	16,1	83,9
Transportasi	13,5	86,5
Lembaga keuangan	11,2	88,8
Jasa-jasa	23,0	77,0
Jumlah	17,9	82,1

Tabel L.8. Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Lapangan Usaha dan Jam Kerja/minggu, 2013

Lapangan usaha utama	Jam kerja / minggu	
	< 35	≥ 35
(1)	(2)	(3)
Pertanian	37,8	62,2
Pertambangan	27,6	72,4
Industri	33,2	66,8
Listrik, gas dan air bersih	13,2	86,8
Konstruksi	32,3	67,7
Perdagangan	37,9	62,1
Transportasi	23,8	76,2
Lembaga keuangan	20,7	79,3
Jasa-jasa	34,8	65,2
Jumlah	33,1	66,9

Tabel L.9. Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Sektor Pekerjaan, 2013

Tingkat Pendidikan	Sektor pekerjaan	
	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
Di bawah SMA		
Tidak sekolah	36,1	63,9
Tidak tamat SD	54,6	45,4
Tamat SD	68,5	31,5
Tamat SMP	83,5	16,5
SMA ke atas		
Tamat SMA	94,6	5,4
Perguruan Tinggi	98,2	1,8
Jumlah	90,1	9,9

Tabel L.10. Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Sektor Pekerjaan, 2013

Tingkat Pendidikan	Sektor pekerjaan	
	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
Di bawah SMA		
Tidak sekolah	40,3	58,7
Tidak tamat SD	51,3	49,7
Tamat SD	54,6	45,4
Tamat SMP	66,8	33,2
SMA ke atas		
Tamat SMA	83,8	16,2
Perguruan Tinggi	97,3	2,7
Jumlah	68,1	31,9

Tabel L.11. Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Lapangan Usaha Utama dan Sektor Pekerjaan, 2013

Lapangan usaha utama	Sektor pekerjaan	
	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
Pertanian	51,8	48,2
Pertambangan	95,6	4,4
Industri	98,9	1,1
Listrik, gas dan air bersih	99,4	0,6
Konstruksi	68,0	32,0
Perdagangan	82,2	17,8
Transportasi	85,0	15,0
Lembaga keuangan	99,1	0,9
Jasa-jasa	96,6	3,4
Jumlah	90,1	9,9

Tabel L.12. Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Lapangan Usaha Utama dan Sektor Pekerjaan, 2013

Lapangan usaha utama	Sektor pekerjaan	
	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
Pertanian	59,3	40,7
Pertambangan	84,2	15,8
Industri	94,9	5,1
Listrik, gas dan air bersih	97,6	2,4
Konstruksi	52,9	47,1
Perdagangan	51,7	48,3
Transportasi	74,6	25,4
Lembaga keuangan	97,1	2,9
Jasa-jasa	77,5	12,5
Jumlah	68,1	31,9

Tabel L.13. Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Sektor Pekerjaan, 2013

Jenis pekerjaan utama	Sektor pekerjaan	
	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
Profesional, teknisi & ybdi	100,0	0,0
Kepemimpinan & ketatalaksanaan	100,0	0,0
Pejabat pelaksana, tata usaha & ybdi	99,9	0,1
Tenaga usaha penjualan	74,0	26,0
Tenaga usaha jasa	92,4	7,6
Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan & perburuan	44,3	55,7
Tenaga produksi, angkutan & pekerja kasar	88,4	11,6
Lainnya	100,0	0,0
Jumlah	90,1	9,9

Tabel L.14. Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Sektor Pekerjaan, 2013

Jenis pekerjaan utama	Sektor pekerjaan	
	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
Profesional, teknisi & ybdi	100,0	0,0
Kepemimpinan & ketatalaksanaan	100,0	0,0
Pejabat pelaksana, tata usaha & ybdi	100,0	0,0
Tenaga usaha penjualan	43,8	56,2
Tenaga usaha jasa	81,6	18,4
Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan & perburuan	55,1	44,9
Tenaga produksi, angkutan & pekerja kasar	69,9	30,1
Lainnya	100,0	0,0
Jumlah	68,1	31,9

Tabel L.15. Distribusi Persentase Waktu Tempuh Pekerja Komuter Menurut Jenis Transportasi yang Digunakan, 2013

Waktu Tempuh	Jenis Transportasi				Jumlah
	Umum	Bersama	Pribadi	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
≤ 30 menit	22,7	20,1	29,5	77,0	28,2
30 – 60 menit	38,3	48,0	48,7	12,8	46,7
61 – 120 menit	30,8	24,5	18,9	2,9	21,0
> 120 menit	8,2	7,4	2,9	7,3	4,1
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel L.16. Distribusi Persentase Stayers dan Movers Menurut Provinsi, 2013

Provinsi	Stayers	Movers		Jumlah
		Komuter	Sirkuler	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	96,8	2,7	0,5	100,0
Sumatera Utara	94,3	5,0	0,7	100,0
Sumatera Barat	94,9	3,8	1,3	100,0
Riau	97,8	1,4	0,8	100,0
Jambi	96,7	2,4	0,9	100,0
Sumatera Selatan	97,5	1,6	0,9	100,0
Bengkulu	96,9	1,4	1,7	100,0
Lampung	96,0	2,9	1,1	100,0
Bangka Belitung	95,5	3,5	1,0	100,0
Kepulauan Riau	98,4	0,8	0,8	100,0
DKI Jakarta	77,1	22,2	0,7	100,0
Jawa Barat	88,3	8,1	3,6	100,0
Jawa Tengah	92,4	4,8	2,8	100,0
DI Yogyakarta	85,1	13,6	1,3	100,0
Jawa Timur	95,3	3,7	1,0	100,0
Banten	81,0	16,4	2,6	100,0
Bali	90,2	9,2	0,6	100,0
Nusa Tenggara Barat	97,4	1,8	0,8	100,0
Nusa Tenggara Timur	99,5	0,3	0,2	100,0
Kalimantan Barat	96,9	2,5	0,6	100,0
Kalimantan Tengah	98,8	0,2	0,9	100,0
Kalimantan Selatan	95,0	3,6	1,4	100,0
Kalimantan Timur	96,7	1,2	2,1	100,0
Sulawesi Utara	94,0	4,2	1,8	100,0
Sulawesi Tengah	97,2	2,4	0,4	100,0
Sulawesi Selatan	96,4	2,5	1,1	100,0
Sulawesi Tenggara	97,0	1,4	1,6	100,0
Gorontalo	94,5	4,4	1,1	100,0
Sulawesi Barat	99,1	0,2	0,7	100,0
Maluku	98,3	0,7	1,0	100,0
Maluku Utara	98,6	0,6	0,8	100,0
Papua Barat	96,7	2,0	1,3	100,0
Papua	99,5	0,2	0,3	100,0
Indonesia	92,6	5,7	1,7	100,0

Tabel L.17. Distribusi Persentase Pekerja Komuter menurut Provinsi di Indonesia, 2013

Provinsi	Pekerja Komuter
(1)	(2)
Aceh	0,8
Sumatera Utara	4,8
Sumatera Barat	1,2
Riau	0,6
Jambi	0,5
Sumatera Selatan	0,9
Bengkulu	0,2
Lampung	1,6
Bangka Belitung	0,3
Kepulauan Riau	0,1
DKI Jakarta	16,3
Jawa Barat	23,6
Jawa Tengah	12,3
DI Yogyakarta	4,0
Jawa Timur	11,3
Banten	12,0
Bali	3,2
Nusa Tenggara Barat	0,6
Nusa Tenggara Timur	0,1
Kalimantan Barat	0,8
Kalimantan Tengah	0,0
Kalimantan Selatan	1,0
Kalimantan Timur	0,3
Sulawesi Utara	0,6
Sulawesi Tengah	0,5
Sulawesi Selatan	1,3
Sulawesi Tenggara	0,2
Gorontalo	0,3
Sulawesi Barat	0,0
Maluku	0,1
Maluku Utara	0,0
Papua Barat	0,1
Papua	0,0
Indonesia	100,0

Tabel L.18. Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan pada Provinsi Terpilih, 2013

Provinsi	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	
	Di bawah SMA	SMA ke Atas
(1)	(2)	(3)
Sumatera Utara	42,7	57,3
Lampung	35,4	64,6
DKI Jakarta	13,2	86,8
Jawa Barat	21,0	79,0
Jawa Tengah	46,5	53,5
DI Yogyakarta	25,4	74,6
Jawa Timur	33,9	66,1
Banten	21,6	78,4
Bali	18,7	81,3
Sulawesi Selatan	26,8	73,2

Tabel L.19. Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Sektor Pekerjaan pada Provinsi Terpilih, 2013

Provinsi	Sektor Pekerjaan	
	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
Sumatera Utara	89,8	10,2
Lampung	67,2	32,8
DKI Jakarta	97,7	2,3
Jawa Barat	94,3	5,7
Jawa Tengah	81,2	18,8
DI Yogyakarta	86,6	13,4
Jawa Timur	87,3	12,7
Banten	95,6	4,4
Bali	88,5	11,5
Sulawesi Selatan	83,9	16,1

Tabel L.20. Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Lapangan Usaha Utama Pada Provinsi Terpilih, 2013

Provinsi	Lapangan Usaha Utama		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatera Utara	4,0	39,7	56,3
Lampung	23,1	22,6	54,2
DKI Jakarta	0,3	23,4	76,3
Jawa Barat	0,8	37,9	61,3
Jawa Tengah	2,4	43,9	53,6
DI Yogyakarta	1,2	20,5	78,3
Jawa Timur	2,2	40,3	57,5
Banten	0,5	36,8	62,7
Bali	0,9	18,1	81,0
Sulawesi Selatan	2,1	24,7	73,2

Tabel L.21. Distribusi Persentase Pekerja Komuter Menurut Waktu Tempuh pada Provinsi Terpilih, 2013

Provinsi	Waktu Tempuh (menit)			
	≤30	31-60	61-120	> 120
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera Utara	33,8	52,9	10,0	3,3
Lampung	31,9	43,0	20,8	4,2
DKI Jakarta	17,9	50,3	28,0	3,8
Jawa Barat	18,3	45,3	30,8	5,6
Jawa Tengah	44,8	42,4	11,0	1,8
DI Yogyakarta	44,9	46,7	5,7	2,7
Jawa Timur	32,3	45,6	18,1	4,0
Banten	17,9	50,8	27,2	4,1
Bali	40,7	53,6	5,2	0,5
Sulawesi Selatan	33,0	53,1	10,4	3,6

**Tabel L.22. Distribusi Persentase Pekerja Komuter
Menurut Jenis Transportasi pada Provinsi Terpilih, 2013**

Provinsi	Jenis Transportasi			
	Umum	Bersama	Pribadi	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera Utara	23,8	6,7	69,4	0,1
Lampung	14,9	11,4	73,7	0,0
DKI Jakarta	20,6	2,7	76,2	0,6
Jawa Barat	23,9	5,2	69,8	1,1
Jawa Tengah	12,9	4,5	81,4	1,2
DI Yogyakarta	3,9	3,0	92,5	0,5
Jawa Timur	8,4	5,9	85,5	0,2
Banten	16,6	6,5	76,8	0,1
Bali	2,3	2,6	95,2	0,0
Sulawesi Selatan	12,6	4,1	83,1	0,2

Tabel L.23. Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler menurut Provinsi di Indonesia, 2013

Provinsi	Pekerja Sirkuler
(1)	(2)
Aceh	0,5
Sumatera Utara	2,1
Sumatera Barat	1,4
Riau	1,0
Jambi	0,6
Sumatera Selatan	1,5
Bengkulu	0,7
Lampung	1,9
Bangka Belitung	0,3
Kepulauan Riau	0,3
DKI Jakarta	1,7
Jawa Barat	35,3
Jawa Tengah	23,5
DI Yogyakarta	1,3
Jawa Timur	10,4
Banten	6,3
Bali	0,7
Nusa Tenggara Barat	0,9
Nusa Tenggara Timur	0,2
Kalimantan Barat	0,6
Kalimantan Tengah	0,6
Kalimantan Selatan	1,3
Kalimantan Timur	1,7
Sulawesi Utara	0,9
Sulawesi Tengah	0,3
Sulawesi Selatan	1,9
Sulawesi Tenggara	0,8
Gorontalo	0,3
Sulawesi Barat	0,2
Maluku	0,3
Maluku Utara	0,2
Papua Barat	0,2
Papua	0,3
Indonesia	100,0

Tabel L.24. Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan pada Provinsi Terpilih, 2013

Provinsi	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	
	Di bawah SMA	SMA ke Atas
(1)	(2)	(3)
Sumatera Utara	51,7	48,3
Sumatera Barat	44,0	56,0
Sumatera Selatan	40,0	60,0
Lampung	62,4	37,6
Jawa Barat	78,4	21,6
Jawa Tengah	79,5	20,5
Jawa Timur	60,4	39,6
Banten	72,5	27,5
Kalimantan Timur	29,8	70,2
Sulawesi Selatan	61,1	38,9

Tabel L.25. Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Sektor Pekerjaan pada Provinsi Terpilih, 2013

Provinsi	Sektor Pekerjaan	
	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
Sumatera Utara	75,4	24,6
Sumatera Barat	81,1	18,9
Sumatera Selatan	82,0	18,0
Lampung	71,4	28,6
Jawa Barat	54,8	45,2
Jawa Tengah	64,6	35,4
Jawa Timur	72,4	27,6
Banten	78,3	21,7
Kalimantan Timur	88,4	11,6
Sulawesi Selatan	61,7	38,3

Tabel L.26. Distribusi Persentase Pekerja Sirkuler Menurut Lapangan Usaha Utama pada Provinsi Terpilih, 2013

Provinsi	Lapangan Usaha Utama		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatera Utara	27,5	34,1	38,3
Sumatera Barat	14,3	29,1	56,6
Sumatera Selatan	26,8	32,3	40,9
Lampung	35,8	29,6	34,6
Jawa Barat	3,1	36,7	60,2
Jawa Tengah	7,6	42,3	50,0
Jawa Timur	7,4	48,1	44,6
Banten	2,1	40,5	57,5
Kalimantan Timur	17,4	48,6	34,0
Sulawesi Selatan	28,0	27,7	44,3

Tabel L.27. Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah dan Yang Tidak Pernah Pindah Pekerjaan Menurut Karakteristik Demografi, 2013

Karakteristik	Pernah pindah	Tidak pernah pindah
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	10,6	86,8
Perempuan	27,7	89,9
Daerah Tempat Tinggal		
Perkotaan	12,2	87,6
Perdesaan	9,8	88,9
Kelompok Umur		
15 - 24	14,1	85,9
25 - 34	14,0	86,0
35 - 44	11,8	88,2
45 - 54	7,4	92,6
55+	9,7	90,3
Pendidikan		
SD ke bawah	10,8	89,2
SMP	11,9	88,1
SMA ke atas	10,7	89,3
Status Perkawinan		
Belum Kawin	10,7	89,3
Kawin	36,0	64,0
Cerai Hidup	28,9	71,1
Cerai Mati	22,8	77,2
Jumlah	10,9	89,1

Tabel L.28. Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah Pekerjaan Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha Utama Sebelum Pindah Pekerjaan, 2013

Kelompok Umur	Lapangan usaha utama sebelum pindah pekerjaan		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa
(1)	(2)	(3)	(4)
15 - 24	11,5	38,2	50,3
25 - 34	16,8	38,1	45,1
35 - 44	26,8	36,8	36,4
45 - 54	35,5	31,4	33,1
55+	46,1	19,2	34,7
Jumlah	22,8	35,0	42,2

Tabel L.29. Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah Pekerjaan Menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan Utama Sebelum Pindah Pekerjaan, 2013

Kelompok umur	Status pekerjaan utama sebelum pindah pekerjaan				
	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh	Buruh	Pekerja bebas	Pekerja tak dibayar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15 - 24	4,4	1,0	73,6	15,6	5,4
25 - 34	10,0	3,9	60,8	20,7	4,6
35 - 44	15,1	8,0	43,7	27,4	5,9
45 - 54	16,5	12,9	30,7	32,9	7,0
55+	18,7	17,2	29,3	27,3	7,5
Jumlah	11,2	6,4	53,9	22,8	5,7

Tabel L.30. Distribusi Persentase Pekerja yang Pindah Pekerjaan Menurut Kelompok Umur dan Alasan Pindah Pekerjaan, 2013

Kelompok Umur	Pindah	Alasan pindah pekerjaan		
		Internal	Eksternal	Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15 - 24	27,4	44,1	24,8	31,1
25 - 34	30,0	36,0	31,1	32,9
35 - 44	19,5	29,6	32,4	38,1
45 - 54	12,3	21,8	30,6	47,6
55+	10,7	10,5	26,4	63,1
Jumlah	100,0	32,5	29,1	38,5

Tabel L.31. Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah Pekerjaan Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Sebelumnya dan Lapangan Pekerjaan Utama Sekarang, 2013

	Lapangan pekerjaan utama sekarang*)									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	12,4	0,7	2,1	0,0**)	2,5	3,3	0,9	0,2	1,9	24,1
2	1,1	0,4	0,4	0,0**)	0,2	0,5	0,3	0,1	0,2	3,1
3	2,2	0,1	7,7	0,1	1,1	3,9	0,9	0,6	2,2	18,8
4	0,1	0,0**)	0,0**)	0,0**)	0,0**)	0,1	0,0**)	0,0**)	0,1	0,4
5	4,5	0,1	1,3	0,1	2,1	1,9	0,7	0,3	1,0	12,0
6	2,7	0,2	2,8	0,0**)	1,3	8,6	1,1	0,9	2,6	20,2
7	0,9	0,1	0,6	0,0**)	0,5	1,1	1,3	0,2	0,7	5,5
8	0,3	0,1	0,3	0,0**)	0,2	1,1	0,3	1,0	0,5	3,9
9	2,2	0,1	1,4	0,1	0,6	2,7	0,5	0,6	4,0	12,1
Jumlah	26,3	1,8	16,6	0,4	8,5	23,3	6,0	3,8	13,2	100

Keterangan : *) merujuk pada klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), 1. Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan; 2. Pertambangan dan penggalian; 3. Industri pengolahan; 4. Listrik, gas dan air bersih; 5. Konstruksi; 6. Perdagangan, hotel dan restoran; 7. Transportasi, pergudangan dan komunikasi; 8. Lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan; 9. Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

***) Angkanya sangat kecil, dimana untuk pembulatan dua angka di belakang koma masih 0,00

Tabel L.32. Distribusi Persentase Pekerja yang Pernah Pindah Pekerjaan Menurut Status Pekerjaan Utama Sebelumnya dan Status Pekerjaan Utama Sekarang, 2013

Status pekerjaan utama sebelumnya*)	Status pekerjaan utama sekarang*)							Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	
1	2,8	1,6	0,4	4,0	0,8	1,1	1,2	11,8
2	0,9	2,8	0,2	1,2	0,3	0,6	0,4	6,3
3	0,4	0,3	0,2	0,5	0,0	0,1	0,1	1,6
4	6,1	4,1	1,0	34,2	1,2	2,6	4,9	54,1
5	1,5	1,2	0,0	1,6	1,4	1,4	1,5	8,6
6	1,6	1,9	0,1	3,5	1,3	2,3	1,9	12,6
7	0,4	0,6	0,0	1,2	0,5	0,3	1,9	5,0
Jumlah	13,6	12,5	1,9	46,3	5,5	8,4	11,8	100

Keterangan : *) Status pekerjaan dibedakan menjadi 1. Berusaha sendiri; 2. Berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar; 3. Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar; 4. Buruh/karyawan/pegawai; 5. Pekerja bebas di pertanian; 6. Pekerja bebas di nonpertanian; 7. Pekerja tak dibayar.

LAMPIRAN

Kuesioner Sakernas 2014



SAK14.AK
Dibuat 1 (satu)
rangkap untuk
BPS Kab/Kota

SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL 2014

KETERANGAN RUMAH TANGGA

RAHASIA

I. PENGENALAN TEMPAT								
1.	PROVINSI		□ □					
2.	KABUPATEN/KOTA ¹⁾		□ □					
3.	KECAMATAN		□ □ □ □					
4.	DESA/KELURAHAN ¹⁾		□ □ □ □					
5.	KLASIFIKASI DESA/KELURAHAN	PERKOTAAN -1 PERDESAAN -2	□					
6.	NOMOR BLOK SENSUS							
7.	NOMOR KODE SAMPEL SAKERNAS AGUSTUS		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □					
8.	NOMOR URUT RUMAH TANGGA SAMPEL {SAK14.DSRT BLOK III KOLOM (1)}		□ □					
9.	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA							
10.	HASIL KUNJUNGAN	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px dashed black;">1. BERHASIL</td> <td rowspan="3" style="width: 5%; text-align: center;">}</td> <td rowspan="3" style="width: 45%; vertical-align: middle;">BLOK III, STOP</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">2. MENOLAK</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">3. TIDAK DAPAT DITEMUI</td> </tr> </table>	1. BERHASIL	}	BLOK III, STOP	2. MENOLAK	3. TIDAK DAPAT DITEMUI	□
1. BERHASIL	}	BLOK III, STOP						
2. MENOLAK								
3. TIDAK DAPAT DITEMUI								

II. RINGKASAN			
1.	JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA		□ □
2.	JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS		□ □

III. KETERANGAN PETUGAS			
1.	A. KODE PENCACAH:		□ □ □ □
	B. NO. HP PENCACAH:		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
2.	NAMA PENCACAH:	TANGGAL PENCACAHAN:	TANDA TANGAN:
	
3.	A. NAMA PENGAWAS:	TANGGAL PEMERIKSAAN:	TANDA TANGAN:
	
	B. NO HP PENGAWAS:		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

¹⁾ Coret yang tidak perlu

IV. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA						
No. urut	Nama anggota rumah tangga	Hubungan dengan kepala rumah tangga (kode)	Jenis kelamin Lk - 1 Pr - 2	Umur (tahun)	HANYA UNTUK ART 10 TAHUN KE ATAS	
					Status perkawinan (kode)	Partisipasi sekolah (kode)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>Kode Kolom (3): <u>Hubungan dengan kepala rumah tangga</u></p> <p>1. Kepala rumah tangga 2. Istri/suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu</p>	<p>Kode Kolom (6): <u>Status perkawinan</u></p> <p>6. Orang Tua/Mertua 7. Famili Lain 8. Pembantu Rumah Tangga 9. Lainnya</p>	<p>Kode Kolom (7): <u>Partisipasi sekolah</u></p> <p>1. Tidak/belum pernah bersekolah 2. Masih bersekolah di jenjang pendidikan formal 3. Masih bersekolah di jenjang pendidikan non formal 4. Tidak bersekolah lagi</p>
<p>1. SETIAP SELESAI MENCATAT SEMUA ART DI KOLOM (2) DAN KOLOM (3) TANYAKAN SEKALI LAGI APAKAH ADA ART LAIN SEPERTI PEMBANTU RUMAH TANGGA, SOPIR, TUKANG KEBUN, PENGASUH ANAK/ORANG TUA DAN YANG SEJENISNYA YANG TINGGAL BERSAMA DALAM RUMAH TERSEBUT. JIKA ADA, MASUKKAN DALAM DAFTAR.</p>		
<p>2. TANYAKAN PULA APAKAH ADA NAMA-NAMA YANG TERLEWAT SEPERTI BAYI YANG BARU LAHIR DAN ART YANG SEMENTARA BEPERGIAN. JIKA ADA, MASUKKAN KE DALAM DAFTAR.</p>		
<p>3. SEMENTARA ITU, UNTUK ART YANG BEPERGIAN KURANG DARI 6 BULAN TETAPI DENGAN TUJUAN PINDAH ATAU AKAN MENINGGALKAN RUMAH SELAMA 6 BULAN ATAU LEBIH TIDAK DIANGGAP SEBAGAI ART, KELUARKAN DARI DALAM DAFTAR.</p>		
<p>4. URUTKAN KEMBALI KE NOMOR URUT YANG ADA DI KOLOM (1).</p>		

V. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS																	
NAMA: NO. URUT ART: <input type="text"/>	7. Jika ada penawaran pekerjaan, apakah (NAMA) masih mau menerima? YA 1 TIDAK 2 (JIKA R2.a.1 = 2 dan R3 = 2, LANJUTKAN KE SUB BLOK V.E)																
PEMBERI INFORMASI: <input type="text"/>	R8 s.d R18 HANYA UNTUK ART YANG BEKERJA (R2.a.1=1 ATAU R3=1)																
V.A. PENDIDIKAN																	
1.a. Apakah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki (NAMA) ? Tdk/blm tamat SD 2 SMA/Aliyah 8 SD/ltkidayah 3 SMK 9 Paket A 4 R1.c Diploma I/II 11 SMP/Tsanawiyah 5 Diploma III 12 SMP Kejuruan 6 Diploma IV/Universitas 13 Paket B 7 S2/S3 14	8. a. Berapa jumlah hari kerja seluruh pekerjaan selama seminggu yang lalu? hari <input type="text"/> b. Berapa jumlah jam kerja dari seluruh pekerjaan setiap hari selama seminggu yang lalu?																
b. Jurusan pendidikan/bidang studi: <input type="text"/>	<table border="1"> <tr> <th>Sen</th> <th>Sel</th> <th>Rab</th> <th>Kam</th> <th>Jum</th> <th>Sab</th> <th>Ming</th> <th>Jmh</th> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Jmh	<input type="text"/>							
Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Jmh										
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>										
c. Apakah (NAMA) pernah mendapatkan pelatihan kerja dan memperoleh sertifikat? YA 1 TIDAK 2 → SUB BOK V.B	V.C. PEKERJAAN UTAMA																
d. Sebutkan dua jenis pelatihan kerja yang utama? <input type="text"/>	9. Apakah lapangan usaha/bidang pekerjaan utama dari tempat bekerja (NAMA) selama seminggu yang lalu? <input type="text"/> (TULIS SELENGKAP-LENGKAPNYA)	DISI PENGAWAS															
1. <input type="text"/>	10. Apakah jenis pekerjaan/jabatan dari pekerjaan utama (NAMA) selama seminggu yang lalu? <input type="text"/> (TULIS SELENGKAP-LENGKAPNYA)	DISI PENGAWAS															
2. <input type="text"/>	11. Berapakah jumlah jam kerja (NAMA) pada pekerjaan utama selama seminggu yang lalu? jam <input type="text"/>	DISI PENGAWAS															
V.B. KEGIATAN SEMINGGU YANG LALU		12. Apakah status/kedudukan (NAMA) dalam pekerjaan utama selama seminggu yang lalu? Berusaha sendiri 1 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar 2 Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar 3 } R14 Buruh/karyawan/pegawai 4 Pekerja bebas di pertanian 5 Pekerja bebas di non pertanian 6 Pekerja keluarga/tak dibayar 7 → R15															
2.a. Selama seminggu yang lalu: YA TIDAK 1. Apakah (NAMA) bekerja? 1 2 2. Apakah (NAMA) sekolah? 1 2 3. Apakah (NAMA) mengurus rumah tangga? 1 2 4. Apakah (NAMA) melakukan kegiatan lainnya, selain kegiatan pribadi? 1 2	13. Berapakah upah/gaji/pendapatan bersih yang diterima (NAMA) selama sebulan yang lalu dari pekerjaan utama baik berupa uang maupun barang? Uang: Rp <input type="text"/> Barang: <input type="text"/>																
JIKA KEGIATAN 1 s.d 4 BERKODE "2" LANJUTKAN ke R3 b. Dari kegiatan 1 s.d 4 yang menyatakan "Ya" di atas, kegiatan apakah yang menggunakan waktu terbanyak selama seminggu yang lalu? 1 → R4 2 3 4 (JIKA R2.a.1=1, LANJUTKAN KE R4)	Rp <input type="text"/>																
3. Apakah (NAMA) mempunyai pekerjaan/usaha, tetapi sementara tidak bekerja ¹⁾ selama seminggu yang lalu? YA 1 TIDAK 2	TULISKAN																
4. Apakah (NAMA) sedang mencari pekerjaan? YA 1 TIDAK 2																	
5. Apakah (NAMA) sedang mempersiapkan usaha baru? YA 1 TIDAK 2																	
DITANYAKAN JIKA R4 = 2 DAN R5 = 2																	
6. Apakah alasan utama (NAMA) tidak mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha baru? Putus asa: Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan ²⁾ 1 Sudah diterima bekerja, tapi belum mulai bekerja 2 Sedang bersekolah 3 Mengurus rumah tangga 4 Sudah mempunyai pekerjaan/usaha 5 Merasa sudah cukup 6 Tidak mampu melakukan pekerjaan 7 → R.23 Lainnya (.....) 8																	

¹⁾ Sementara tidak bekerja: Jika R3 = 1 maka R12 tidak boleh berkode 5 atau 6 atau 7.

²⁾ Rincian 6 kode 1: Alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga ia merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang merasa karena situasi/kondisi/iklim/musim, tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

DITANYAKAN JIKA R12 = 1,2,3 ATAU 4	
14. Sudah berapa lama (NAMA) bekerja di pekerjaan utama sekarang? TAHUN <input type="text"/> <input type="text"/> BULAN <input type="text"/> <input type="text"/>	20. Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA) ketika mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru? YA TIDAK
15. a. Dimanakah lokasi tempat kerja (NAMA) selama seminggu yang lalu? Provinsi : <input type="text"/> <input type="text"/> } <i>DISI PENGAWAS</i> Kabupaten/Kota* : <input type="text"/> <input type="text"/> } (JIKA PROP & KAB/KOTA = R1 & R2 BLOK 1, LANJUTKAN KE R16.a)	1. Mendaftar pada bursa kesempatan kerja 1 2 2. Menghubungi perusahaan/kantor 3 4 3. Melamar dengan memanfaatkan iklan 1 2 4. Menghubungi keluarga/kenalan 3 4 5. Mengumpulkan modal/perengkapan 1 2 6. Mencari lokasi/tempat usaha 3 4 7. Mengurus surat perizinan usaha 1 2 8. Lainnya (.....) 3 4 <i>TULISKAN</i>
b. Apabila di luar kabupaten/kota tempat tinggal, apakah (NAMA) pergi dan pulang ke/dari tempat kerja setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan? Setiap hari 1 Setiap minggu 2 Setiap bulan 3 (JIKA R15.b = 2 ATAU 3, LANJUTKAN KE R16.a)	21. Sudah berapa lama (NAMA) mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru? TAHUN <input type="text"/> BULAN <input type="text"/> <input type="text"/>
c. Berapa jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja? < 10 Km 1 > 30 Km 3 10 - 29 Km 2 TT 4	22. Pekerjaan yang dicari/usaha yang sedang dipersiapkan: Pekerjaan penuh waktu (Full time) 1 Pekerjaan paruh waktu (Part time) 2
d. Berapa lama perjalanan dari rumah ke tempat kerja? ≤ 30 Menit 1 61 - 120 Menit 3 31 - 60 Menit 2 > 120 Menit 4	V.F. PENGALAMAN KERJA
e. Apakah jenis transportasi yang biasanya digunakan (NAMA) untuk pergi dan pulang ke/dari tempat kerja? Transportasi umum 1 Transportasi pribadi 3 Transportasi bersama 2 Jalan kaki 4	23. Apakah (NAMA) pernah mempunyai pekerjaan/usaha sebelumnya? YA 1 TIDAK 2 → STOP
16. a. Kapankah (NAMA) pertama kali mulai bekerja/berusaha? lebih dari setahun yang lalu 1 → R17 setahun terakhir 2	24. Apakah (NAMA) berhenti bekerja/pindah pekerjaan selama setahun terakhir? YA 1 TIDAK 2 → STOP
b. Berapa lama (NAMA) mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha? LAMANYA: BULAN <input type="text"/> <input type="text"/>	25. Alasan utama (NAMA) berhenti bekerja/pindah pekerjaan selama setahun terakhir: PHK 1 Usaha terhenti (bangkrut) 2 Pendapatan kurang memuaskan 3 Tidak cocok dengan lingkungan kerja 4 Habis masa kerja/kontrak 5 Lainnya (.....) 6 <i>TULISKAN</i>
V.D. PEKERJAAN TAMBAHAN	26. Apakah lapangan usaha/pekerjaan (NAMA) sebelum berhenti bekerja/pindah pekerjaan terakhir? <i>DISI PENGAWAS</i> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (TULIS SELENGKAP-LENGKAPNYA)
17. Apakah (NAMA) selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan tambahan? YA 1 TIDAK 2 → SUB BLOK V.E	V.E. KEGIATAN MENCARI PEKERJAAN/ MEMPERSIAPKAN USAHA
18. Apakah lapangan usaha/pekerjaan tambahan utama (NAMA)? <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (TULIS SELENGKAP-LENGKAPNYA)	27. Apakah status/kedudukan (NAMA) sebelum berhenti bekerja/pindah pekerjaan terakhir? Berusaha sendiri 1 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar 2 Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 3 Buruh/karyawan/pegawai 4 Pekerja bebas di pertanian 5 Pekerja bebas di non pertanian 6 Pekerja keluarga/tak dibayar 7
R19 s.d R22 DITANYAKAN JIKA R4 = 1 ATAU R5 = 1	
19. Apakah alasan utama (NAMA) mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha baru? Tamat sekolah/tidak bersekolah lagi 1 Tanggung jawab mencari nafkah/membantu ekonomi rumah tangga atau keluarga 2 Menambah penghasilan 3 Pekerjaan yang ada kurang sesuai 4 PHK 5 Usaha terhenti 6 Lainnya (.....) 7 <i>TULISKAN</i>	

*) Coret yang tidak perlu

**) Bila responden bukan kepala rumah tangga maka tidak boleh berkode 2 atau 3.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id

ISBN 978-979-064-877-7



9 789790 648777